



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025- 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang

Penetapan ...

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
5. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
9. Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
14. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
15. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
16. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Maksud dan Tujuan dari penyusunan dokumen RPJDP Tahun 2025-2045 adalah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional serta dalam rangka mendukung pencapaian visi Indonesia emas 2045 yang disesuaikan dengan kondisi, karakteristik serta kewenangan daerah.
- (2) Tujuan dari RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan jangka Panjang daerah tahun 2025-2045;
 - b. sebagai dasar penyusunan RPJMD secara teknokratik dan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program bagi calon Bupati;
 - c. sebagai dasar atau acuan penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan Sasaran, strategi, Arah Kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - d. sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap lima tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tahun 2025-2045.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJPD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJPD meliputi:

a. Bab I ...

- a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum dan kondisi Daerah;
 - c. bab III permasalahan dan isu strategis;
 - d. bab IV visi dan misi Daerah;
 - e. bab V arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. bab VI penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di So'e
pada tanggal ... 2024
PJ. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

SEPERIUS E. SIPA

Diundangkan di So'e
pada tanggal ... 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

YOHANIS LAKAPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024
NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG.../2024

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025- 2045

I. UMUM

Perencanaan pembangunan merupakan langkah awal yang menentukan arah pembangunan ke depan dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Adanya perencanaan pembangunan yang disusun secara baik akan berimplikasi pada penyelenggaraan pembangunan yang optimal. Rencana pembangunan yang baik harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Secara esensial, Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Perencanaan pembangunan yang demikian dikenal sebagai perencanaan pembangunan tersistem. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamantkan bahwa perencanaan pembangunan nasional menghasilkan: a) rencana pembangunan jangka panjang; b) rencana pembangunan jangka menengah; dan c) rencana pembangunan jangka pendek. Rencana pembangunan ini meliputi rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah provinsi dan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota yang disusun secara holistik dan integratif.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) maka RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda.

RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 ini mengangkat Visi “TIMOR TENGAH SELATAN NEKAFMESE (BERINTEGRITAS, KREATIF, MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN) MENUJU INDONESIA EMAS 2045”. Isi dan uraian RPJPD Tahun 2025-2045 di dalam lampiran meliputi:

a. bab I pendahuluan;

b. bab II ...

- b. bab II gambaran umum dan kondisi Daerah;
- c. bab III permasalahan dan isu strategis;
- d. bab IV visi dan misi Daerah;
- e. bab V arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
- f. bab VI penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang pada Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penyusunan rencana pembangunan daerah sendiri dilaksanakan melalui tiga kerangka perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk perencanaan 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk perencanaan 5 tahunan dan Rencana Pembangunan Tahunan. Perencanaan pembangunan tersebut diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW.

Pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang selanjutnya disingkat Kabupaten TTS selama dua puluh tahun telah dilaksanakan berdasarkan RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025, yang dijabarkan dalam empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD. Saat ini RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025 telah memasuki tahap akhir dan akan berakhir pada tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian kinerja pembangunan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025 tercapai sebesar 59,03 persen dengan predikat kinerja rendah. Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 juga dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dengan visi pembangunan Indonesia Tahun 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dan visi RPJPD Provinsi NTT yaitu Nusa Tenggara Timur

Mandiri, Maju dan Berkelanjutan Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Penyusunan RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) penyelarasan visi, misi, arah pembangunan dan indikator kinerja utama nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045; 2) keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang dinilai masih relevan di Kabupaten TTS hingga tahun 2045; 3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025; 4) isu-isu strategis yang berkembang dan 5) regulasi yang berlaku saat ini. Penyusunan RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 juga memperhatikan RTRW dan rekomendasi KLHS RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 .

Penyusunan RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 menggunakan beberapa pendekatan yaitu: 1) pendekatan teknokratik dengan menggunakan data evaluasi RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025 serta menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah; 2) pendekatan partisipatif melalui forum konsultasi publik untuk menjangkau masukan dari *stakeholder*; 3) pendekatan politis melalui pembahasan RANPERDA RPJPD antara Pemerintah Daerah dan DPRD; 4) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas melalui pelaksanaan konsultasi rancangan RPJPD ke Pemerintah Provinsi NTT serta pelaksanaan Musrenbang Rancangan RPJPD; 5) pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan menekankan pentingnya keterkaitan antara bagian-bagian atau aspek dalam mencapai tujuan; 6) pendekatan integratif melalui diskusi bersama *stakeholder* terkait; 7) pendekatan spasial melalui integrasi dokumen RPJPD, RTRW dan KLHS RPJPD Kabupaten TTS 2025-2045.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah:
 - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); dan
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

2. Peraturan Perundang-Undangan terkait materi muatan Peraturan Daerah:
 - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);
 - g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
- j. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- k. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- l. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 - t. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
 - u. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
 - v. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - w. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

459);

- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - bb. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
 - cc. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133); dan
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 10).
3. Dasar aturan kebijakan yang diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah
- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 10 Januari 2023; dan
 - c. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RPJPD disusun selaras dan berpedoman pada:

1. RPJPN dan RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025–2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan.
2. RTRW nasional, provinsi dan kabupaten, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang terutama terkait struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis daerah.

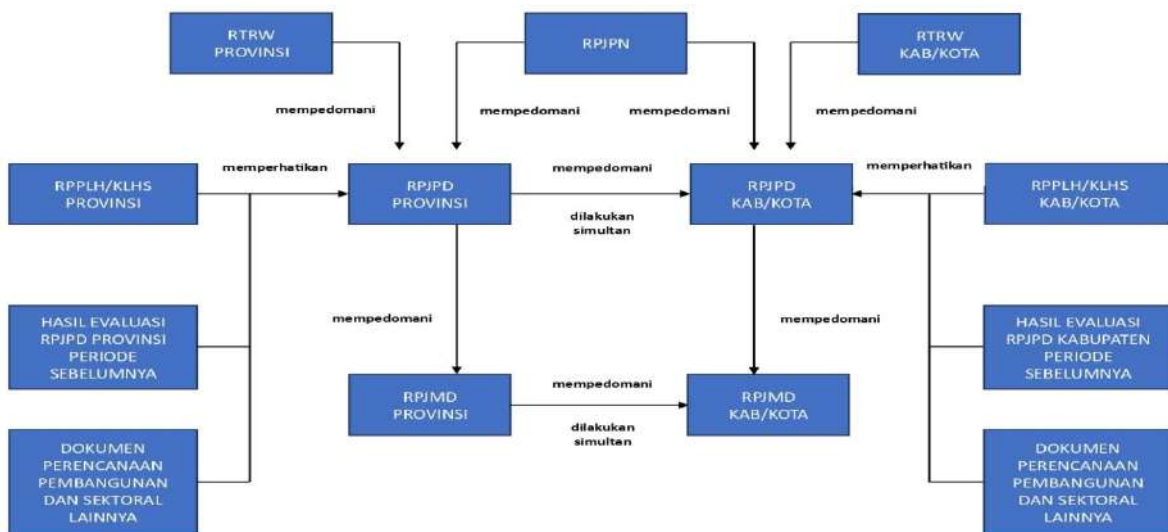
Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 juga memperhatikan:

1. Hasil evaluasi RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025, terutama pada tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS RPJPD, meliputi substansi isu strategis dan arah kebijakan; Keterkaitan kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Substansi KLHS yang diperhatikan yaitu kapasitas daya duung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati serta permasalahan dan isu-isu strategis.
3. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025–2045 akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten TTS pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Gambar 1: Hubungan Antar Dokumen



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 adalah:

1. Sebagai gambaran tentang arah pembangunan jangka panjang Kabupaten TTS dengan mempedomani arah pembangunan jangka panjang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten TTS dalam menyusun Rencana Pembangunan sektoral jangka panjang yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
3. Secara politik menjadi acuan bagi calon Kepala Daerah untuk merumuskan visi dan misi pembangunan daerah; dan

4. Secara materil menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten TTS dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta juga menjadi acuan bagi berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Pemerintah Kabupaten TTS.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 adalah:

1. Menetapkan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten TTS Tahun 2025–2045;
2. Menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten TTS 2025–2045 dan menjadi prioritas pembangunan di setiap tahapan pembangunan jangka panjang daerah;
3. Menetapkan sasaran pokok, indikator dan target capaian sebagai dasar pengukuran capaian visi dan pembangunan jangka panjang Kabupaten TTS Tahun 2025–2045; dan
4. Menjadi landasan operasional bagi pemerintah Kabupaten TTS dalam menentukan visi, misi, tujuan, sasaran serta indikator dan target capaian dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten TTS 2025-2045 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika penulisan RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang diuraikan secara singkat tentang hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 melalui refleksi pembangunan, serta disajikan dalam 7 (tujuh) aspek pembangunan yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Bab ini memuat permasalahan utama yang disimpulkan pada Bab II, selanjutnya akan diuraikan isu strategis sesuai konteks (bersifat global, nasional dan regional), permasalahan daerah, dan isu strategis.
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
Bab ini memuat visi yang merupakan kondisi daerah yang ingin diwujudkan hingga Tahun 2045 dan misi yang merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah.
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini memuat tahapan pembangunan lima tahunan yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung visi sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah, selanjutnya sasaran pokok merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah yang memuat arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator utama pembangunan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini memuat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045 secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. GEOGRAFI

Kabupaten TTS merupakan salah satu Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT. Secara geografis, Kabupaten TTS terletak di antara 9° 26'-10° 10' LS dan 124° 49,01"-124° 04,00" BT. Dilihat dari geostrategis, Kabupaten TTS terletak di bagian tengah Pulau Timor yang berbatasan langsung dengan tiga kabupaten, yaitu:

- Sebelah Utara : Kabupaten Timor Tengah Utara
- Sebelah Selatan : Laut Timor
- Sebelah Timur : Kabupaten Malaka
- Sebelah Barat : Kabupaten Kupang

Secara administratif, Kabupaten TTS terdiri dari 32 kecamatan, 12 kelurahan dan 266 desa dengan luas wilayah 3.955,36 km². Peta Kabupaten TTS dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2: Peta Kabupaten TTS



Sumber: Bappeda TTS

2.1.1.1. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten TTS meliputi daerah pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah termasuk daerah pantai dengan ketinggian yang beragam dari permukaan laut (dpl) dengan perincian sebagai berikut:

- Ketinggian 0-500 m dpl yaitu: seluas 1.584,35 Km² atau 40,06%
- Ketinggian 501-1.000 m dpl yaitu: 1.847,52 Km² atau 46,71%
- Ketinggian 1.001-1.500 m dpl yaitu: 450,28 Km² atau 11,38%
- Ketinggian 1.501-2.000 m dpl yaitu: 73,21 Km² atau 1,85%

Gambar 3: Peta Relief Ketinggian Kabupaten TTS



- Tingkat keterengn 0-8% seluas 1737,42 Km²
- Tingkat keterengn 8-15% seluas 1.146,48 Km²
- Tingkat keterengn 15-25% seluas 826,99 Km²
- Tingkat keterengn 25-40% seluas 244,82 Km²
- Tingkat keterengn 40% ke atas seluas 39,91 Km²

Gambar 4: Peta Kelas Lereng Kabupaten TTS



Sumber: RTRW Kabupaten TTS

2.1.1.2. Klimatologi

Wilayah Kabupaten TTS memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata sebesar 900-2.000 mm/tahun di rentang tahun 2019-2023. Sedangkan berdasarkan jumlah hari hujan di Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir adalah 80-119 hari kecuali pada tahun 2022 dimana terjadi anomali jumlah hari hujan yaitu sebanyak 222 hari akibat cuaca ekstrem ([Badai](#) Rossby). Hal ini mempengaruhi jumlah bulan basah dan kering di Kabupaten TTS dengan jumlah bulan kering antara 8-9 bulan dan bulan basah antara 3-4 bulan kecuali pada tahun 2022 karena

anomali cuaca, bulan basah lebih banyak dibandingkan bulan kering. Minimnya bulan basah yang terjadi mengakibatkan kekeringan di wilayah Kabupaten TTS yang pada akhirnya berpengaruh pada persediaan air baik untuk kebutuhan air minum maupun untuk aktivitas pertanian sebagai sektor utama ekonomi di Kabupaten TTS.

Suhu udara di Kabupaten TTS berdasarkan data tahun 2019-2023 berkisar antara 27°C-29°C dengan kelembaban udara dari 70%-87%, walaupun demikian kondisi suhu udara dan kelembaban yang ada di Kabupaten TTS jika disandingkan dengan standar kenyamanan termal untuk kategori hangat nyaman menurut SNI 03-6572-2001 tidak berada pada kondisi ideal satu wilayah. Sesuai SNI 03-6572-2001 suhu ideal suatu wilayah adalah 25,8^o C-27,1^o C dan kelembaban udara relatif untuk daerah tropis adalah sekitar 40% - 50%.

2.1.1.3. Hidrologi

Kawasan Gunung Mutis dengan ketinggian 2.427 meter di atas permukaan laut di Kabupaten TTS merupakan daerah tangkapan air hujan (*catchmen area*) yang baik. Wilayah Kabupaten TTS terdapat 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Noelmina dan DAS Benanain serta 6 (enam) Sub DAS, yaitu Sub DAS Fail, Sub DAS Muke, Sub DAS Siu, Sub DAS Tuke, Sub DAS Menu dan Sub DAS Tumutu. DAS Mina memiliki tangkapan air seluas 273.300 Ha dan memiliki aliran utama, yaitu sungai Noelmina sepanjang 97 km. DAS Noelmina mencakup 12 kecamatan dan 72 desa/kelurahan di Kabupaten TTS. Sedangkan DAS Benanain memiliki tangkapan seluas 97.750 ha dengan aliran utamanya adalah sungai Benanain sepanjang 135 km. DAS Benanain mencakup 17 kecamatan dan 119 desa/kelurahan di Kabupaten TTS.

Sumber air permukaan di Kabupaten TTS terdiri dari sungai, danau dan embung serta bendungan Temef yang sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan dengan perkiraan kapasitas tampung sebesar 129,6 juta m³. Kondisi sungai-sungai yang cukup besar di wilayah Kabupaten TTS memiliki karakteristik pada musim kemarau umumnya kering, sedangkan pada waktu musim hujan volume airnya meningkat, sehingga menggenangi daerah pinggiran sungai. Kondisi sungai seperti ini sering dikenal dengan istilah sungai *intermittent*. Sedangkan Kondisi air tanah pada daerah daratan menunjukkan adanya sumber-sumber air berupa mata air dengan kapasitas debit relatif kecil dan sumber air tanah dimanfaatkan melalui penggalian dan pengeboran. Sampai tahun 2023 terdapat 72 unit sumur bor di Kabupaten TTS.

2.1.1.4. Tutupan Lahan

Tutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi. Tutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut (SNI 7645, 2010). Pada umumnya pengelompokan tutupan lahan dilihat berdasarkan peta citra satelit. Tutupan lahan Kabupaten TTS telah disusun oleh BIG dan KLHK (Dirjen Planologi) *one map policy*, dengan jumlah klasifikasi sebanyak 15 jenis tutupan lahan sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 1: Profil Tutupan Lahan Kabupaten TTS

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%
1.	Hutan Lahan Kering Primer	16.497,85	4,19
2.	Hutan Lahan Kering Sekunder	104.104,41	26,45
3.	Hutan Mangrove Sekunder	685,17	0,17
4.	Hutan Tanaman	330,24	0,08
5.	Permukiman	21.758,52	5,53
6.	Pertanian Lahan Kering	8.258,49	2,10
7.	Pertanian Lahan Kering Campur	121.282,13	30,82
8.	Rawa	195,45	0,05
9.	Savana	47.119,26	11,97
10.	Sawah	19.027,63	4,83
11.	Semak Belukar	42.656,63	10,84
12.	Semak Belukar Rawa	948,54	0,24
13.	Tambak	224,81	0,06
14.	Tanah Kosong	1.207,63	0,31
15.	Tubuh Air	9.282,94	2,36
TOTAL		393.579,69	100

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

2.1.1.5. Kualitas Lingkungan Hidup

Perubahan iklim berpengaruh terhadap lingkungan di Kabupaten TTS. Kondisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten TTS dapat terlihat dari capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Capaian IKLH Kabupaten TTS tahun 2021-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

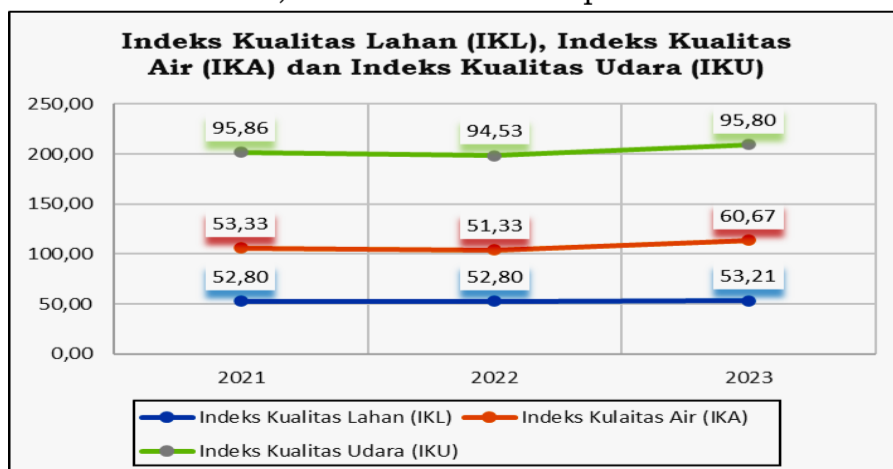
Gambar 5: Nilai IKLH Kabupaten TTS Tahun 2021-2023



Sumber: ppkl.menlhk.go.id (diolah)

Berdasarkan data, nilai IKLH Kabupaten TTS pada tahun 2021 berada pada kategori Baik, sedangkan pada tahun 2022 nilai IKLH mengalami penurunan dan berada pada kategori Sedang. Pada tahun 2023 nilai IKLH kembali meningkat dan berada pada kategori Baik. Nilai IKLH dibentuk dari 3 nilai indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Capaian IKA, IKU dan IKL Kabupaten TTS Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 6: Nilai IKA, IKU dan IKL Kabupaten TTS Tahun 2021-2023



Sumber: ppkl.menlhk.go.id (diolah)

Data menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten TTS selama 3 tahun terakhir berfluktuatif, pada tahun 2023 nilai IKA Kabupaten TTS adalah 60,67, termasuk dalam kategori Baik ($60 < IKA \leq 70$). Dari data di atas juga terlihat bahwa nilai IKU Kabupaten TTS selama 3 tahun terakhir berfluktuatif. Pada tahun 2023 nilai IKU Kabupaten TTS adalah 95,80, termasuk dalam kategori Sangat Baik ($IKU > 91$). Peningkatan nilai IKU menandakan semakin bagusnya kualitas udara di suatu wilayah. Sedangkan untuk nilai IKL Kabupaten TTS perlu menjadi perhatian karena walaupun terjadi peningkatan nilai selama 3 tahun terakhir tetapi nilai IKL Kabupaten TTS berada pada kategori Kurang Baik ($50 < IKL \leq 60$).

2.1.1.6. Ketahanan Pangan

Konsep ketahanan pangan dibentuk dari aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan. Kondisi ketahanan pangan suatu wilayah dapat terlihat dari nilai Indeks Ketahanan Pangan. Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten TTS selama tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Gambar 7: Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023



Sumber: BAPANAS (diolah)

Dari data di atas diketahui bahwa nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten TTS cenderung meningkat dan ada pada kategori agak tahan ($> 59,58 - 67,75$). Kondisi ketahanan pangan secara umum sangat berkaitan dengan perubahan iklim yang terjadi, karena pergeseran musim hujan atau kemarau akan sangat mempengaruhi pola dan waktu tanam yang pada akhirnya akan mempengaruhi produksi tanaman.

2.1.1.7. Daya Dukung Daya Tampung (DDDT)

A. Kapasitas Daya Dukung Pangan

Hasil perhitungan Daya Dukung Lingkungan Hidup penyediaan pangan Kabupaten TTS menunjukkan bahwa terdapat 23 kecamatan yang potensi wilayahnya mampu menopang penyediaan pangan secara aman/berkelanjutan ($\sigma \geq 2$), terdapat 8 kecamatan masuk dalam kategori aman bersyarat ($1 \leq \sigma \leq 2$), sementara 1 kecamatan yaitu Kecamatan Kota SoE yang daya dukung penyediaan pangannya telah terlampaui ($\sigma < 1$). Daya dukung lingkungan hidup untuk penyedia pangan Kabupaten TTS merupakan agregasi nilai DDLH seluruh grid-grid pada wilayah yang bersangkutan, yang nilainya 2,49 atau dalam kategori aman.

Wilayah yang memiliki daya dukung pangan dalam kategori aman dan memiliki nilai $\sigma > 2,47$ mengindikasikan bahwa wilayah tersebut mampu berswasembada pangan dan mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Sementara, wilayah yang memiliki daya dukung pangan dalam kategori aman bersyarat menjadi indikasi bahwa wilayah tersebut mampu swasembada pangan tetapi belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Hasil perhitungan Daya Dukung Lingkungan Hidup penyediaan pangan tiap kecamatan di Kabupaten TTS tersaji pada tabel di bawah ini

Tabel 2: Kinerja Daya Dukung Penyedia Pangan Kabupaten TTS Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Daya Dukung Pangan	Indikatif
1	Mollo Utara	22,96	2,75	Aman (Sustain)
2	Tobu	10,04	2,99	Terlampau
3	Fatumnasi	6,8	1,39	Aman Bersyarat
4	Nunbena	5,54	4,67	Aman (Sustain)
5	Mollo Selatan	17,42	1,82	Aman Bersyarat
6	Mollo Barat	7,31	4,68	Aman (Sustain)
7	Mollo Tengah	7,78	2	Aman Bersyarat
8	Polen	13,79	2,84	Aman (Sustain)
9	Kota SoE	40,84	0,22	Terlampau
10	Amanuban Barat	25,35	2	Aman Bersyarat
11	Kuatnana	16,61	2,99	Aman (Sustain)
12	Batu Putih	13,61	3,21	Aman (Sustain)
13	Amanuban Selatan	24,51	4,81	Aman (Sustain)
14	Noebeba	12,48	2,1	Aman (Sustain)
15	Kuanfatu	19,84	1,95	Aman Bersyarat
16	Kualin	20,53	3,11	Aman (Sustain)
17	Amanuban Tengah	16,13	2,22	Aman (Sustain)
18	Oenino	11,79	3,01	Aman (Sustain)
19	Kolbano	19,42	1,83	Aman Bersyarat
20	Amanuban Timur	16,21	2,74	Aman (Sustain)
21	Fautmolo	7,5	2,31	Aman (Sustain)
22	Fatukopa	6,05	4,64	Aman (Sustain)
23	KiE	23,51	2,82	Aman (Sustain)
24	Kot'olin	10,69	2,35	Aman (Sustain)
25	Amanatun Selatan	18,38	1,66	Aman Bersyarat
26	Nunkolo	13,46	2,88	Aman (Sustain)
27	Boking	9,67	1,32	Aman Bersyarat
28	Noebana	4,81	2,79	Aman (Sustain)
29	Amanatun Utara	16,16	2,73	Aman (Sustain)
30	Kokbaun	3,02	4,97	Aman (Sustain)
31	Toianas	11,91	2,03	Aman (Sustain)
32	Santian	6,02	4,55	Aman (Sustain)
Kabupaten TTS		460,12	2,49	Aman (Sustain)

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

B. Kapasitas Daya Dukung Air

Kebutuhan air total untuk Kabupaten TTS adalah sebesar 736,22 juta m³/tahun, sementara ketersediaannya sebesar 1.073,49 juta m³/tahun, sehingga statusnya surplus sebesar

337,27 juta m³/tahun. Secara administratif, kebutuhan air terbesar terdapat di Kecamatan Kota SoE sebanyak 65,34 juta m³/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Kokbaun sebesar 4,83 juta m³/tahun. Ketersediaan air terbesar terdapat di Kecamatan Amanuban Selatan yaitu 77.11 juta m³/tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Kokbaun sebesar 0.90 juta m³/tahun. Terdapat 11 kecamatan yang status daya dukung airnya telah terlampaui di tahun 2022, yaitu Amanatun Utara, Amanuban Tengah, Fautmollo, Amanuban Barat, KiE, Amanatun Selatan, Kuanfatu, Nunkolo, Kot'olin, Kota SoE dan Kokbaun. Sementara, 9 kecamatan memiliki daya dukung air yang aman (*sustain*) adalah Kecamatan Mollo Barat, Nunbena, Fatumnasi, Pollen, Fatukopa, Mollo Tengah, Amanuban Timur, Noebeba dan Oenino. Selanjutnya, terdapat 12 wilayah yang status daya dukung airnya dalam kondisi aman bersyarat, yaitu Kecamatan Amanuban Selatan, Kualin, Tobu, Mollo Utara, Mollo Selatan, Batu Putih, Boking, Toianas, Santian, Kuatnana, Kolbano dan Noebana. Hasil analisis status daya dukung air setiap kecamatan di Kabupaten TTS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3: Kinerja Daya Dukung Air Kabupaten TTS Tahun 2022

No	Kecamatan	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Daya Dukung Air	Status/Indikatif
1	Mollo Utara	36736000.00	57341381.20	01.56	Aman Bersyarat
2	Tobu	16064000.00	26503494.24	0,0868056	Aman Bersyarat
3	Fatumnasi	10880000.00	41315191.77	0,1805556	Aman (<i>Sustain</i>)
4	Nunbena	8864000.00	8063733.29	04.21	Aman (<i>Sustain</i>)
5	Mollo Selatan	27872000.00	39867322.33	01.43	Aman Bersyarat
6	Mollo Barat	11696000.00	57391261.91	0,2298611	Aman (<i>Sustain</i>)
7	Mollo Tengah	12448000.00	41244869.15	03.31	Aman (<i>Sustain</i>)
8	Polen	22064000.00	76492310.95	03.47	Aman (<i>Sustain</i>)
9	Kota SoE	65344000.00	19423784.99	00.30	Terlampaui
10	Amanuban Barat	40560000.00	34429173.68	0,0590278	Terlampaui
11	Kuatnana	26576000.00	30179527.78	01.14	Aman Bersyarat
12	Batu Putih	21776000.00	28329753.38	01.30	Aman Bersyarat
13	Amanuban Selatan	39216000.00	77105240.13	0,1090278	Aman Bersyarat
14	Noebeba	19968000.00	42946023.99	02.15	Aman (<i>Sustain</i>)
15	Kuanfatu	31744000.00	23597125.73	0,0513889	Terlampaui
16	Kualin	32848000.00	59100776.25	0,0972222	Aman Bersyarat
17	Amanuban Tengah	25808000.00	24509404.75	0,0659722	Terlampaui
18	Oenino	18864000.00	38174173.02	02.02	Aman (<i>Sustain</i>)
19	Kolbano	31072000.00	34844421.58	01.12	Aman Bersyarat
20	Amanuban Timur	25936000.00	74051808.21	0,1430556	Aman (<i>Sustain</i>)
21	Fautmolo	12000000.00	11097635.47	0,0638889	Terlampaui
22	Fatukopa	9680000.00	33008805.67	03.41	Aman (<i>Sustain</i>)
23	KiE	37616000.00	30197098.62	0,0555556	Terlampaui
24	Kot'olin	17104000.00	9751228.04	00.57	Terlampaui
25	Amanatun Selatan	29408000.00	23198174.33	0,0548611	Terlampaui
26	Nunkolo	21536000.00	12440201.33	00.58	Terlampaui
27	Boking	15472000.00	20104842.40	01.30	Aman Bersyarat
28	Noebana	7596000.00	37301626.71	01.05	Aman Bersyarat
29	Amanatun Utara	25856000.00	25117493.93	0,0673611	Terlampaui

No	Kecamatan	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	Daya Dukung Air	Status/Indikatif
30	Kokbaun	4832000.00	901155.28	00.19	Terlampau
31	Toianas	19056000.00	23966583.75	01.26	Aman Bersyarat
32	Santian	9632000.00	11499390.56	01.19	Aman Bersyarat
Kabupaten TTS		736224000.00	1073495014.42	01.46	Aman Bersyarat

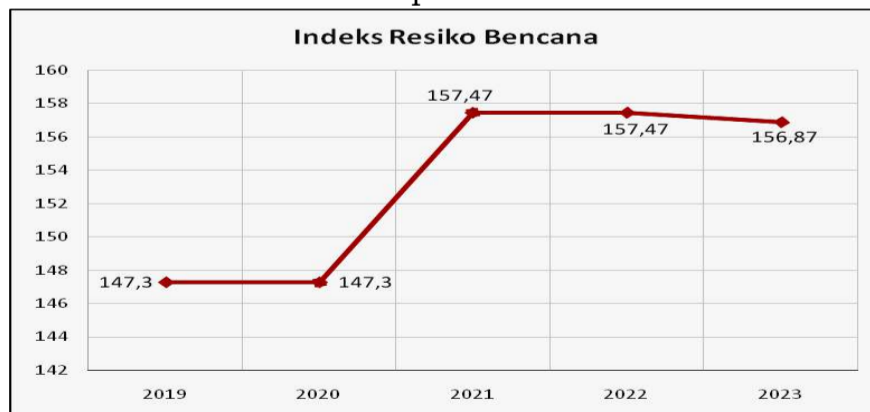
Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Berdasarkan kondisi tersebut, maka secara umum penduduk di Kabupaten TTS mengalami surplus air permukaan. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dan pesisir serta dengan adanya perubahan iklim, maka penggunaan sumber daya air akan meningkat. Hal ini dikarenakan ketersediaan air khususnya air permukaan dari hujan, sangat bervariasi menurut ruang dan waktu, serta ditambah adanya anomali-anomali iklim yang mempengaruhi jumlah dan intensitas hujan menyebabkan variabilitas curah hujan yang tinggi pada masing-masing musim. Kondisi ini harus diperhatikan karena tingginya curah hujan pada waktu yang singkat dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor, sedangkan rendahnya curah hujan pada musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan.

2.1.1.8. Kebencanaan

Bencana alam merupakan tantangan pembangunan yang tidak bisa dihindari di berbagai daerah termasuk Kabupaten TTS. Setiap daerah, memiliki potensi bencana yang berbeda, sesuai dengan tipe, karakteristik dan potensi alam yang ada di wilayah tersebut. Potensi kebencanaan di Kabupaten TTS didominasi oleh bencana alam karena cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir dan kekeringan. **Salah Ssatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana suatu wilayah yaitu Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks ini dihitung berdasarkan komponen penyusun bahaya, kerentanan dan kapasitas pemerintah daerah. Data Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten TTS selama tahun 2019-2023 terdapat di bawah ini.**

Gambar 8: Nilai IRB Kabupaten TTS Tahun 2019-2023



Sumber: Inarisk.bnpp.go.id, (diolah)

Berdasarkan data tersebut di atas, Kabupaten TTS termasuk dalam wilayah dengan kategori risiko tinggi untuk kebencanaan. Penanggulangan bencana (mitigasi dan penanganan pasca bencana) perlu menjadi perhatian karena terjadi berulang setiap tahun dan

merupakan isu yang erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

A. Bencana Banjir

Penyusunan indeks ancaman banjir di Kabupaten TTS menggunakan indikator:

1. Sejarah Banjir (BPBD Kabupaten TTS)
2. Buffer Sungai (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)
3. Litologi (ESDM Provinsi NTT)
4. Curah Hujan (BMKG)
5. Kemiringan lereng (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)

Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman banjir sebagai berikut:

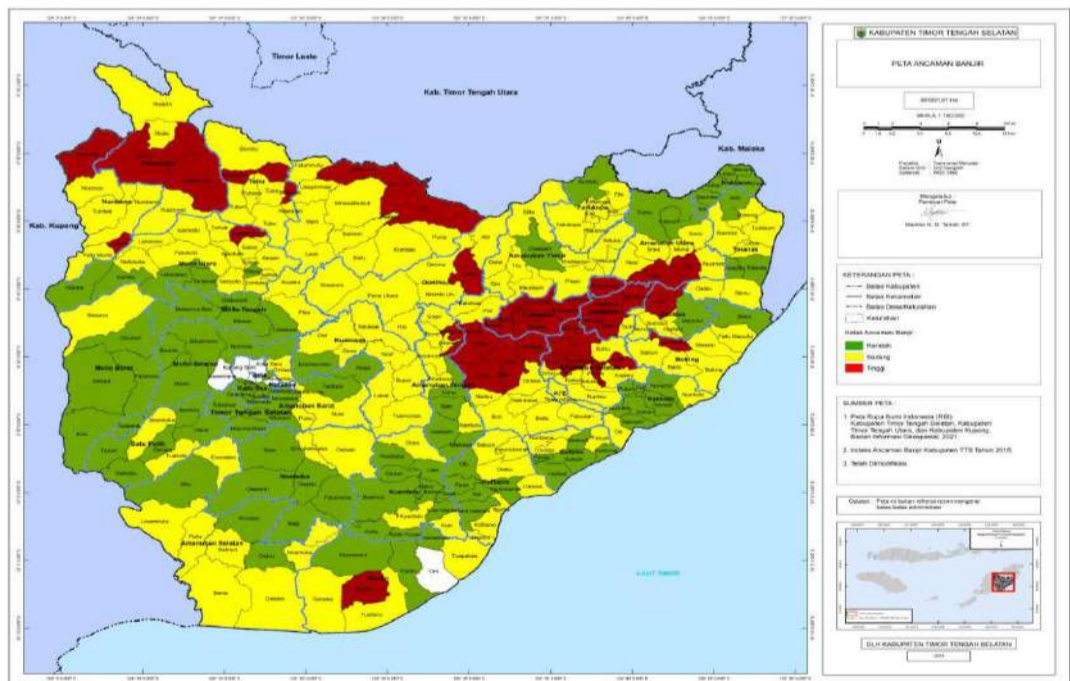
Tabel 4: Pembobotan Indeks Ancaman Banjir

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH (1)	SEDANG (2)	TINGGI (3)
1	SUNGAI	Sejarah Banjir	12	0-1	2-3	>3
		Buffer	8	0 - 150 m	150 - 300 m	>300 m
2	GEOLOGI	Litologi	3	Lava	Breksi, Batugamping, endapan vulkanik/gunung api	Endapan Sungai, aluvial,
3	CUACA & IKLIM	Curah Hujan	5	750-1750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	2751-3750 mm/thn
4	MORFOLOGI	Kemiringan lereng	2	> 25 % (sedang-curam)	15 – 25 % (Miring)	< 15 % (Datar – Cekungan)
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Hasil intersect dari seluruh indikator menghasilkan peta ancaman banjir sebagai berikut:

Gambar 9: Peta Ancaman Banjir Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel 5: Indeks Risiko Banjir menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO BENCANA	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Renah	Kokbaun, Kualin, Noebeba, Nunkolo, Kuanfatu, Amanuban Barat, Kota SoE, Amanuban Tengah, Kot'olin, Kolbano, Mollo Barat, Mollo Tengah, Batuputih, Santian, Mollo Selatan, Mollo Utara, KiE, Kuantana, Amanuban Selatan, Nunbena, Amanuban Timur, Tobu, Toianas, Amanatun Utara, Amanatun Selatan, Oenino	Benahe, Nunusunu, Oepliki, Hoineno, Sahana, Kelle, Kakan, Lasi, Nusa, Cendana, Ofu, Koloto, Naip, Putun, Kusi Taebesa, Hoibeti, Se'I, Pana, Fatukoko, Oelbubuk, Kuatae, Oebesa, Basmuti, Mnelalete, Noebeba, Benlutu, Saenam, Taupi, Manufui, Fatuoni, Nununamat, Tupan, Panite, Biloto, Noemeto, Oehan, Kualin, Nonohonis, Sabun, Kokfeu, Belle, Binenok, Lotas, Enoneontes, Fatuat, Mio, Pene Selatan, Fetomone, Oelekam, Oeuban, Baki, Fatuulan, Baus, Kelle Tunan, Lelobatan, Salbait, Tublopo, Bisene, Hane, Haumeni, Kiki, Oeekam, Fatukoto, Kusi Utara Oinlasi, Obaki, Oeekam, Kampung Baru, Fatukusi, Fatutnana, Tuasene, Koa, To'manat, Bikelkeno, Nunfutu, Bonleu, Niti, SoE, Binaus, O'besi, Lnamnutu, Nefokoko, Noeolin, Tumu, Usapimnasi, Nenoat, Fat, Abi, Kualeu, Oehela, Oekiu, Tubuhue, Oebo, Tesiayofanu, Netpala, Sanbet, Neobesa, Milli, Oeelu, Kuanfatu, Kot'olin, Nifukani, Eno Nabuasa, Nunkolo, Pusu, Sapnala, Bone, Noebesi, Eonbesi, Nekemunifeto, Sono, Kokoi, Olais, Kiubaat, Oebaki, Haumenibaki, Pubasu, Meusin.
Sedang	KiE, Polen, Kolbano, Mollo Tengah, Amanuban Tengah, Kualin, Amanuban Tengah, Toianas, Amanuban Selatan, Tobu, Fatumnasi, Toianas, Mollo Utara, Amanuban Barat, Kuantana, Amanuban Timur, Noebeba, Amanuban Timur, Amanatun Selatan, Batuputih, Nunbena, Kokbaun, Kot'olin, Santian, Boking, Mollo Selatan, Mollo Barat, Fautmolo, Oenino, Amanatun Utara, Noebana	Naifatu, Fatumnutu, Babuin, Pika, Haunobenak, Naifunu, Tuapakas, Sopo, Bokong, Pollo, Eno Neten, Tunc, Kuannoel, Toianas, Sebot, Tuataum, Tobu, Halme, Nulle, Oof, Mnelaanen, Niki-Niki Un, Teas, Tunua, Snok, Oelet, Nunleu, Ajaobaki, Billa, Oe Ue, Boentuka, Taneotob, Lobus, O'obibi, Tauanas, Santian, Anin, Poli, Tofen, Batnun, Noinbila, Supul, Fatukopa, Taebone, Teluk, Tetaf, Naukae, Op, Nualunat, Taiftob, Mauleum, Tuafanu, Lakat, Boking, Nobi-Nobi, Besana, Fatulunu, Bijaepunu, Tliu, Fatumanufui, Tunbes, Bosen, Nunbena, Oeleon, To'I, Puna, Oenino, Nekmese, Pene Utara, Niki-Niki, Pisan, Nuapin, Oelnunuh, Nenotes, Nano, Nenas, Oenai, Skinu, Neke, Ello, Spaha, Hoi, Tutem, Tuakole, Naileu, Tubmonas, Mella, Leloboko, Bijeli, Nifulinah, Pili, Muna, Sainoni, Toineke, Besnam, Oebobo, Netutnana, Falas, Nifukiu, Oebelo, Lanu, Leonmeni, Kolbano, Lil'ana, Lilo, Sunu, Fatumnasi, Oetuke, Iusmollo, Balu, Noemuke, Loli, Boti, Suni, Bena, Nasi, Kaeneno, Oemaman, Tunis, Konbaki, Nifuleo, Noebana, Sini, Sillu.
Tinggi	Tobu, Amanatun Utara, KiE, Amanatun Selatan, Fautmolo, Amanuban Tengah, Polen, Kolbano, Fatumnasi, Oenino.	Saubalan, Fotilo, Eno Napi, Fenun, Besleu, Huetalan, Nunuhkniti, Bestobe, Maunum Niki-Niki, Fac, Mnesatbubuk, Noesiu, Mnelapetu, Bileon, Napi, Mutis, Laob, Noenoni.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

B. Bencana Kekeringan

Penyusunan indeks ancaman kekeringan di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Litologi (ESDM Provinsi NTT)
2. Curah Hujan (BMKG)
3. Tipe Iklim (BMKG)
4. Vegetasi (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)

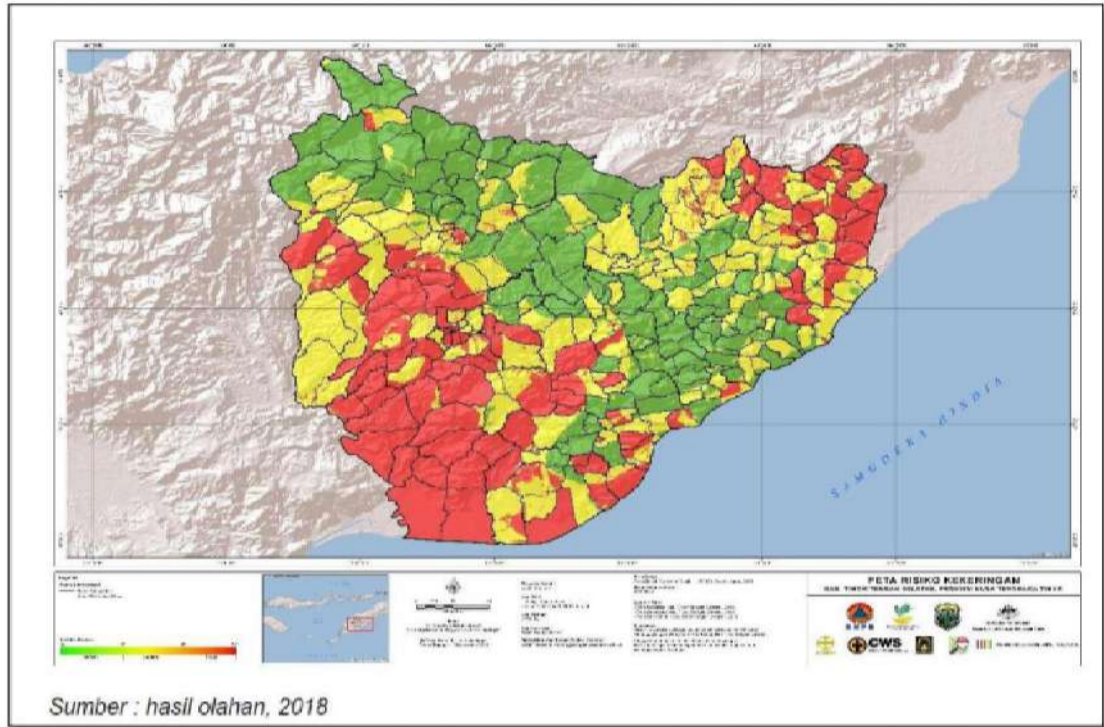
Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman kekeringan sebagai berikut:

Tabel 6: Pembobotan Indeks Ancaman Kekeringan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	GEOLOGI	Litologi	8	breksi	aluvial, batupasir	Batugamping, lava tufan
2	CUACA & IKLIM	Curah Hujan	10	2751-3750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	750-1750 mm/thn
3		Tipe Iklim (Oldeman)	7	B1 - A	D1 - C3	E1 - E4
4	PENGUNAAN LAHAN	Vegetasi	5	>80%	41-80%	<40%
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 10: Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel 7: Indeks Risiko Kekeringan menurut wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO KEKERINGAN	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Renah	Tobu, Polen, Oenino, Fatumnasi, Amanatun Selatan, Nunbena, KiE, Nunkolo, Kuanfatu, Amanuban Barat, Amanuban Tengah, Noebeba, Kot'olin, Amanuban Tengah, Kuanfatu, Fatukopa, Fautmolo, Mollo Tengah, Mollo Utara, Noebana, Amanuban Timur, Bokng, Kolbano, Toianas,	Bonleu, Loli, Pene Utara, Nenas, Kuannoel, Tobu, Anin, Taneotob, Tune, Nuapin, Oelnunuh, Usapimnasi, Nekmese, Netutnana, Fatumnutu, Oinlasi, Hoineno, Sahan, Kelle, Kakan, Lasi, Nusa, Ofu, Naip, Putun, Kusi Hoibeti, Bone, Puna, Hoi, ToT, Belle, Abi, Naukae, Balu, Kiki, Kokoi, Oeleon, Kaeneno, Noebesi, Kualeu, Bosen, Falas, Mella, Tetaf, Sopo, Bijaepunu, Tunua, Oenai, Telukh, Fatumnasi, Sabun, Fatuulan, Pubasu, Babuin, Tesiayofanu, Haunobenak, Oof, Niki-Niki, Noenoni, Pisan, Sebot, Nunleu, Hoibeti, Tutem, Oeleu, Kuanfatu, Kakan, Fatulunu, Lanu, Saubalan, Fae, Oenino, Putun, Fatuat, Tunbes, Napi, Naileu, Sainoni, Bestobe, Mnelaanen, Boti, O'obibi, Baki, Oelet, Kot'olin, Eno Napi, Fatukusi, Bijeli, Ajaobaki, Noebesa, Nobi-Nobi, Mnesatbubuk, Enoneontes, Nakfunu, Kualin, Fatukoko, Noebana, Silla, Huetalan, Nifuleo, Iusmollo, Pika, Konbaki, Fetomone, Mnelapetu, Niki-Niki Un, Oe Ue, Poli.
Sedang	Mollo Utara, Noebana, Nunbena, Nunkolo, Santian, Kota SoE, Amanatun Selatan, Fautmolo, Noebeba, KiE, Kuanfatu, Amanuban Timur, Kuanfatu, Kot'olin, Amanuban Tengah, Bokng, Polen, Kolbano, Fatumnasi, Mollo Tengah, Mollo Barat, Amanatun Utara, Oenino, Fatukopa, Kokbaun, Batuputih, Mollo Selatan, Amanuban Barat, Amanuban Selatan, Kualin.	Fatukoto, Suni, Nunbena, Op, Nenotes, Kobekamusa, Sunu, Tunis, Enonabuasa, Pili, Fenun, Lakat, Mauleum, Supul, Nenoat, Basmuti, Nunkolo, Binconok, Panite, Saenam, Manufui, Maunum Niki Niki, Meusin, Cendana, Eonbesi, Taebesa, Oekefan, Haumeni, Laob, Lil'ana, Tliu, Bileon, Fat, Bokng, SeT, Netpala, Oepiki, Leloboko, Fatumanufui, Mutis, Nekemunifeto, Besana, Fatuoni, Sini, Saibait, Snok, Besleu, Neke, Spaha, O'besi, Kota Baru, Nasi, Nefokoko, Fatukopa, Nunuhkniti, Nualunat, Nununamat, Billa, Santian, Lelobatan, Koa, Bokong, Taebone, Tupan, Oelbubuk, Koloto, Kesenana, Oekam, Kusi Utara, Toineke, Nunfutu, Nunumeu, Kiufatu, Benahe, Bisene, Taupi, Fotilo, To'manat, Nulle, Pana, Hane, Nonohonis, Oetuke, Nunusunu, Tauanas, Noesiu, Tumu, Oekam, Tofen, Taiftob, Kolbano, Mnelalete, Kokfeu, Pene Selatan, Olais, Lilo, Enoneten, Baus, Pusu, Oebo, Tuapakas, Ello, Niti, Nifulinah, Sambet, Sono, Biloto, Oebobo, Kelle Tunan, Oni, Karangisiri, Benlutu, Naifatu, Tuasene, Noemeto, Sapnala, Leonmeni, Oebaki, Oemaman, Oebesa, Kuatae, Nano, Naip, Milli, Oehan, Halme, Oekam, Taubneno, Noinbila.
Tinggi		Fatutnana, Oehela, Bikekno, Tubmonas, Muna, Toianas, Bena, Tublopo, Besnam, Skinu, Kampung Baru, Boentuka, Obaki, Mio, Binaus, Noebeba, Nifukani, Oeuban, Linamnutu, Tuafanu, Kiubaat, Tuataum, Oebelo, Oekiu, So'E, Nifukiu, Haumenibaki, Batnun, Pollo, Tubuhue, Tuakole, Lobus, Lotas, Teas, Noemuke, Noeolin.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman kekeringan dan indeks ancaman kekeringan yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang memiliki litologi jenis batu gamping dan lava serta memiliki curah hujan yang sedikit menempati ancaman tinggi.

C. Bencana Angin Puting Beliung

Penyusunan indeks ancaman angin puting beliung di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Curah Hujan (BMKG)
2. Kemiringan lereng (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)
3. Vegetasi (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)

Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman angin puting beliung sebagai berikut:

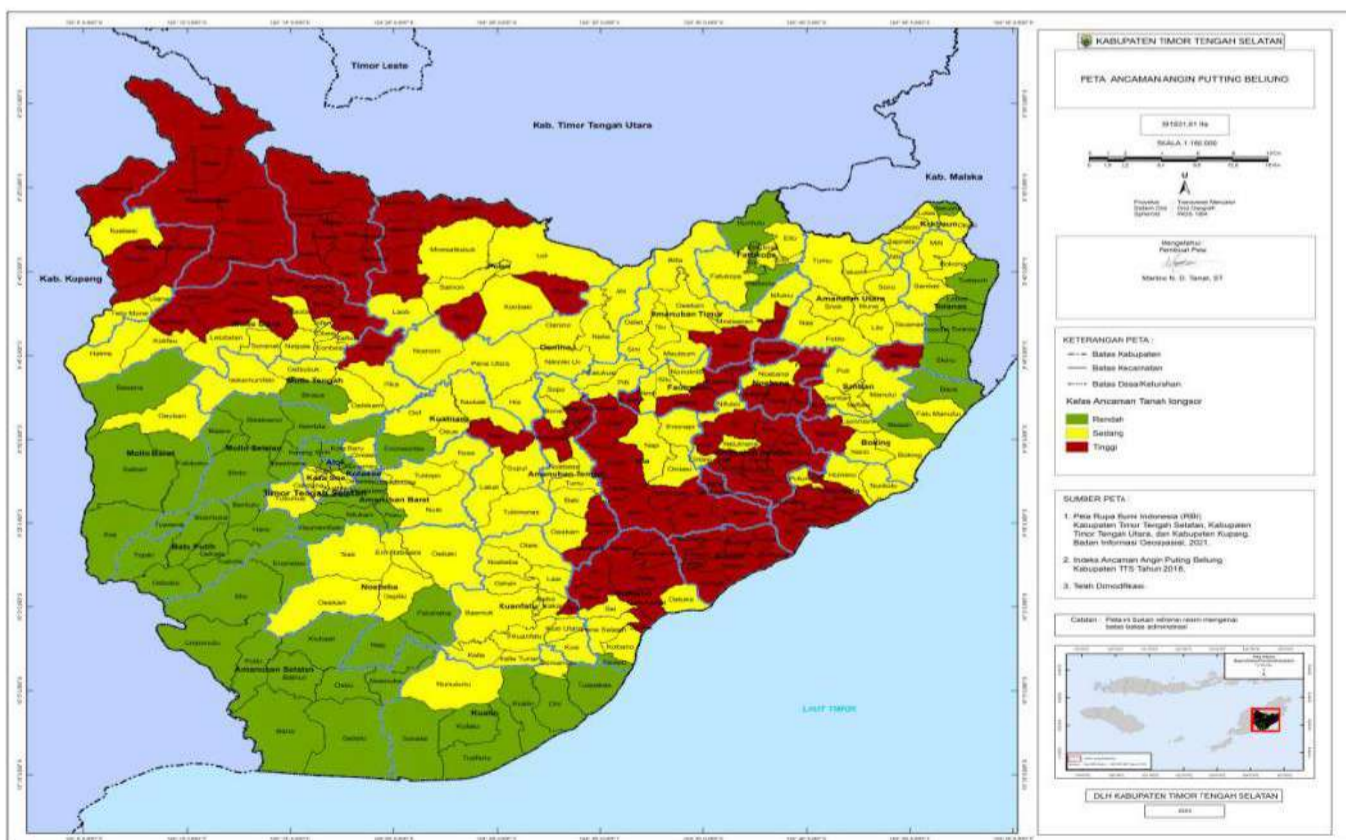
Tabel 8: Pembobotan Indeks Ancaman Angin Puting Beliung

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	IKLIM	Curah Hujan	10	750-1750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	2751-3750 mm/thn
2	MORFOLOGI	Kemiringan Lereng	10	< 15 % (Datar - miring)	15 - 25 % (Miring - Sedang)	>25 % (Sedang - curam)
3	PENGUNAAN LAHAN	Vegetasi	10	>80%	41-80%	<40%
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman angin puting beliung dan indeks ancaman angin puting beliung yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang memiliki curah hujan tinggi dan vegetasi yang sedikit menempati ancaman tinggi disajikan pada gambar berikut.

Gambar 11: Peta Ancaman Angin Puting Beliung di Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel 9: Indeks Risiko Bencana Angin Puting Beliung menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO ANGIN PUTING BELIUNG	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Rendah	Kota So'E, Kualin, Amanuban Selatan, Mollo Barat, Bokong, Toianas, Batuputih, Fatukopa, Mollo Selatan, Amanuban Barat, Batuputih, Kokbaun, Noebeba, Mollo Tengah, Toianas, Mollo Utara, Kolbano, Oenino, Amanuban Timur, Nunbena, Kuanfatu.	Kobekamusa, Toineke, Batnun, Kiufatu, Oekiu, Oebelo, Koa, Meusin, Tuafanu, Tuataum, Bena, Skinu, Tupan, Fatukoko, Enoneten, Mio, Salbait, Oekefan, Besnam, Pollo, Nunumeu, Kiubaat, Tuapakas, Noinbila, Mnelalete, Boentuka, Benahe, Oehela, Linamnutu, Nunfutu, Hane, Kesetnana, Naip, Baus, Kualin, Biloto, Tuasene, Binaus, Haumenibaki, Nunusunu, Bes'ana, Toianas, Fatutnana, Tuakole, Oni, Kiki, Kokfeu, Noesiu, Enonabuasa, Noocolin, Noemuke, Oebobo, Nonohonis, Abi, Oebaki, Sini, Kota Baru, Tauanas, Neke, Karangsiro, So'E, Oeuban, Nifukani, Oeekam, Bikekneno, Fetomone, Oebo, Lobus.
Sedang	Mollo Selatan, Amanuban Barat, Kuanana, Mollo Tengah, Kota So'E, Bokong, Fatukopa, Kokbaun, Amanatun Utara, Kuanfatu, Santian, Nunbena, Amanuban Timur, Toianas, Ki'E, Nunkolo, Fautmolo, Mollo Utara, Kolbano, Amanuban Tengah, Oenino, Noebana, Batuputih, Noebeba, Polen, Kualin, Amanatun Selatan, Kot'olin, Fatumnasi	Bisene, Tubuhue, Enoneotes, Pika, Taubneno, Bokong, Fatukopa, Ello, Lotas, Bokong, Nifulinah, Noemeto, Kelle, Olais, Noebeba, Fatumanufui, Muna, Oelbubuk, Oehan, Nekemunifeto, Nifuki, Manufui, Noebesi, Cendana, Oelet, Tumu, Poli, Oinlasi, Mauleum, Lakat, Oeekam, Taebone, Mnelanen, Oebesa, Hoineno, Oof, Sillu, Fatuoni, Fotilo, Besleu, To'manat, Nulle, Leonneni, Nununamat, Tublopo, Pusu, Niti, Noebesa, Basmuti, Lilo, Nefokoko, Obaki, Supul, Noenoni, Tubmonas, Snok, Fatukusi, Niki-Niki Un, O'besi, Thi, Noebana, Kaeneno, Benlutu, Tofen, Teas, Sainoni, Lil'ana, Oemaman, Nano, Kuatae, Sapnala, Kakan, Netpala, Eonbesi, Pene Utara, Oe Ue, Putun, Se'l, Sambet, Nusa, Billa, Netutnana, Milli, Ofu, Kuanfatu, Kampung Baru, Lasi, Kusi Utara, Ocinunuh, Oeleu, Fat, Bone, Sono, Nobi-Nobi, Naifatu, Penc Selatan, Nunbena, Anin, Pili, Haumeni, Oeekam, Oenino, Kelle Tunan, Lelobatan, Nifuleo, Halme, Napi, Taebesa, Op, Kolbano, Hoi, Bileon, Nunuhknifi, Oeleon, Kusi, Naukae, Usapimnasi, Fatuat, Oepliki, Kuannoel, Fatumnasi, Baki, To'i, Bosen, Sahana, Loli, Kol'oto, Mnesatbubuk, Nunkolo, Balu, Pana, Sabun, Hoibeti, Oenai, Leloboko, Taiftob, Falas, Telukh, Bijeli, Ajaobaki, Kualeu, Eno Napi, Nasi, Kot'olin, Puna, Niki-Niki.
Tinggi	Tobu, Polen, Amanuban Timur, Ki'E, Kuanana, Nunbena, Amanuban Tengah, Mollo Utara, Kuanfatu, Noebana, Kolbano, Fautmolo, Nunkolo, Santian, Fatumnasi, Kot'olin, Amanatun Selatan,	Huctalan, Konbaki, Pisan, Tesiyofanu, Tetaf, Tunbes, Nakfunu, Fatukoto, Fatuulan, Taupi, Iusmollo, Mella, Haunobenak, Mnelapetu, Tune, Taneotob, Sopo, Tunis, Maunum Niki-Niki, Nenoat, Santian, Bonleu, Nekmese, Bestobe, Bijaeppunu, Babuin, Nenotes, Nuapin, Fatumnutu, Octuke, Tobu, Belle, Sebot, Panite, Spaha, Saenam, Boti, Naileu, Saubalan, Nenas, Laob, Suni, Kokoi, Pubasu, Lanu, Nualunat, Tunua, Fae, O'obibi, Fenun, Sunu, Mutis, Nunleu, Binenok, Tutem, Fatulunu.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

D. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Penyusunan indeks ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Jenis Tanah (ESDM Provinsi NTT)
2. Curah Hujan (BMKG)
3. Vegetasi (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)

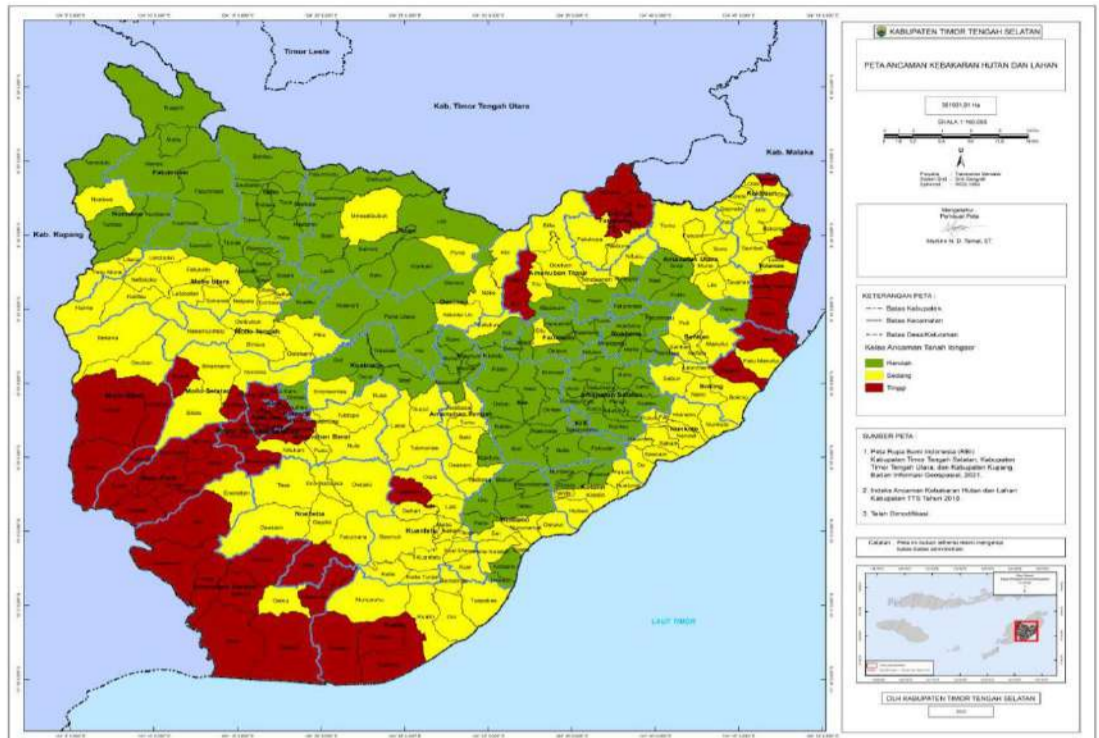
Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:

Tabel 10: Pembobotan Indeks Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	GEOLOGI	Jenis Tanah	10	Andosol, litosol, latosol, non organik / non gambut	Semi organik, redsina, mediteran, terarosa	Hidromorf kelabu, aluvium, organik / gambut
2	CUACA & IKLIM	Curah Hujan	10	2751-3750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	750-1750 mm/thn
3	PENGGUNAAN LAHAN	Vegetasi	10	>80%	41-80%	<40%
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Hasil *intersect* dari seluruh indikator menghasilkan peta ancaman kebakaran hutan dan lahan sebagai berikut:
 Gambar 12: Peta Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel 11: Indeks Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Renah	Fatumnasi, Ki'E, Mollo Utara, Polen, Fautmolo, Tobu, Toianas, Kolbano, Noebana, Amanuban Selatan, Amanuban Tengah, Oenino, Kuanfatu, Boking, Amanatun Utara, Kuantnana, Nunkolo, Nunbena.	Kuannoel, Belle, Iusmollo, Bijeli, Kaceno, Oeleon, Bonleu, Oelnunuh, Tauanas, Nuapin, Babuin, Noebana, Fatumnasi, Haunobenak, Tesiayofanu, Anin, Nununamat, Nenas, Nekemes, Ofu, Bone, Tunc, Suni, Sainoni, Fatuulan, Pene Utara, Bijaepunu, Mutis, Kokoi, Oenai, Besleu, Niki-Niki, Kelle, Fatumnutu, Mella, To'I, Pubasu, Nifuleo, Leonmeni, Huctalan, Nasi, Nobi Nobi, Usapinnasi, Supul, Falas, Hoineno, Netutmana, Tetaf, Sabun, Nefokoko, Naileu, Bestobe, Putun, Taneotob, Tobu, Tunis, Nunbena, Oinlasi, Lanu, Bosen.
Sedang	Kokbaun, Fautmolo, Ki'E, Amanatun Utara, Amanatun Selatan, Mollo Utara, Oeninno, Amanuban Timur, Amanuban Tengah, Polen, Mollo Tengah, Kualin, Tobu, Kolbano, Kota So'E, Kot'olin, Noebaba, Kuanfatu, Amanuban Barat, Santian, Kuantnana, Nunbena, Nunkolo, Amanuban Selatan, Fatukopa, Mollo Selatan, Boking, Batuputih.	Niti, Bileon, Poli, Napi, Fotilo, Sunu, Sebot, Noenoni, Tunua, Telukh, Maunum Niki-Niki, Loli, Noebesa, Pili, Taebesa, Pisan, Pika, Laob, Fatulunu, Kualin, Saubalan, Se'I, Nunuhkniti, Oekefan, Nakfumu, Mnelapetu, Noesiu, O'obibi, Hoibeti, Sopo, Kolbano, Pana, Oeleu, Tuapakas, Lelobatan, Balu, Enonabuasa, Kuanfatu, Eno Napi, Oemaman, Fenun, Puna, Fac, Fat, Kakan, Kusi Utara, Sahan, Snok, Naukae, Kot'olin, Lasi, Nusa, Fatuat, Tutem, Nenotes, Kobekamusa, Konbaki, Penc Selatan, Kusi, Oof, Ajaobaki, Hoi, Manufui, Mauleum, Kualau, Boti, Sillu, Oe Ue, Noebesa, Haumeni, Muna, Lakat, Tumu, Tunbes, Kokfeu, Tofen, Nunleu, Sapnala, Santian, Saenam, Taitfob, Nenoat, Op, Nunusunu, Sambet, Kelle Tunan, Tuataum, Leloboko, Mnelaenen, Obaki, Neke, Boking, Mnelaete, Kiki, Oeckam, Lilo, Eonbesi, Binokok, Panite, Binaus, Naifatu, Fatukusi, Fatukopa, Tublopo, Oebo, Oelbubuk, Abi, Milli, Sono, Oeuban, So'E, Oenino, Nunkolo, Basmuti, Enoneten, Taupi, Olais, Fatuoni, Oepliki, Haumenibaki, Biloto, O'besi, Cendana, Meusin, Mio, Toincke, To'manat, Fatukoto, Boking, Nekemunifeto, Netpala, Nifukiu, Fatumanufu, Tliu, Noinbila, Spaha, Oekiu, Nano, Nunumeu, Baki, Niki-Niki Un, Hane, Oeckam, Tupan, Fetomone, Noeolin, Naip, Eneneontes, Noemeto, Lotas.
Tinggi	Mollo Selatan, Kuantnana, Kualin, Mollo Tengah, Boking, Fatukopa, Kuanfatu, Polen, Nunbena, Mollo Utara, Noebaba, Batuputih, Kota So'E, Amanuban Selatan, Amanuban Timur, Kokbaun, Amanuban Barat, Mollo Barat, Kolbano, Kot'olin, Toianas, Amanatun Utara.	Bikekneno, Tubmonas, Oni, Oeckam, Kesetnana, Baus, Nifulinah, Noebaba, Mnesatbubuk, Lil'ana, Oehan, Halme, Fatutnana, Boentuka, Kuatae, Pollo, Sini, Kol'oto, Lobus, Batrun, Fatukoto, Noemuke, Nulle, Tuakole, Obaki, Karanghiri, Oelet, Tuasene, Linamnutu, Kiufatu, Oebesa, Koa, Oetuke, Pusu, Elio, Nualunat, Oebelo, Benahe, Oehela, Bisene, Besnam, Teas, Tubuhue, Taubneno, Nonohonis, Kiubaat, Toianas, Skinu, Oebobo, Tacbone, Kota Baru, Bena, Billa, Nifukani, Nunfutuu, Tuafanu, Salbait, Bes'ana, Kampung Baru, Benlutu.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman kebakaran hutan dan lahan serta indeks ancaman kebakaran hutan dan lahan yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang memiliki jenis tanah alluvium dan organic/gambut, curah hujan yang sedikit serta vegetasi yang berkurang menempati ancaman tinggi.

E. Bencana Tanah Longsor

Penyusunan indeks ancaman tanah longsor di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Sejarah Longsor (BPBD Kabupaten TTS)
2. Litologi (ESDM Provinsi NTT)
3. Penggunaan Lahan (Badan Informasi Geospasial)
4. Curah Hujan (BMKG)
5. Kemiringan Lereng (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)

Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman tanah longsor sebagai berikut:

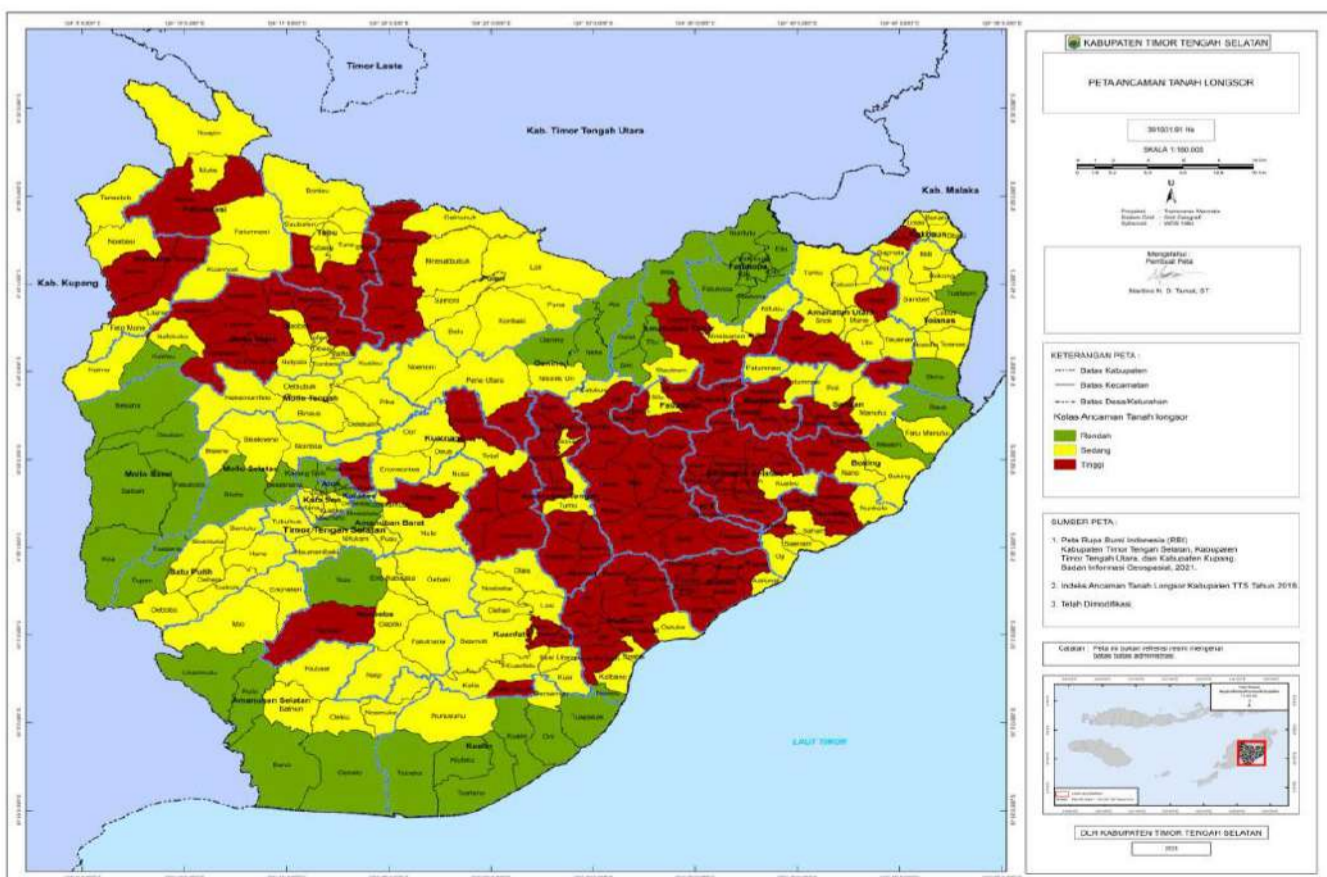
Tabel 12: Pembobotan Indeks Ancaman Tanah Longsor

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	GEOLOGI	Litologi	8	Endapan aluvial	Batugamping	Batuan ubahan, memiliki soil tebal, terdapat napa; lempung, berada dijalar struktur geologi, memiliki banyak rekahan
		Sejarah Longsor	7	≤1	2-3	>3
2	CUACA & IKLIM	Curah Hujan	5	750-1750 mm/thn	1751-2750 mm/thn	2751-3750 mm/thn
		Penggunaan Lahan	5	>80%	41-80%	<40%
3	MORFOLOGI	Kemiringan lereng	5	< 15 % (Datar - miring)	15 - 25 % (Miring - Sedang)	>25 % (Sedang - curam)
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Hasil *intersect* dari seluruh indikator menghasilkan peta ancaman tanah longsor sebagai berikut:

Gambar 13: Peta Ancaman Tanah Longsor Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel 13: Indeks Risiko Bencana Tanah Longsor menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO TANAH LONGSOR	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Renah	Kualin, Mollo Barat, Amanuban Selatan, Fatukopa, Kota So'E, Mollo Selatan, Amanuban Barat, Fatukopa, Oenino, Kualin, Amanuban Timur, Bokang, Kolbano, Kokbaun, Toianas, Polen, Batuputih, Amanatun Utara, Kuanfatu, Mollo Utara,	Toineke, Fatukoko, Bena, Koa, Kiki, Kobekamusa, Bes'ana, Oebelo, Nunfutu, Kesetnana, Abi, Kualin, Salbait, Karangiri, Oelet, Eilo, Meusin, Tuafanu, Pene Utara, Besnam, Kota Baru, Kiufatu, Cendana, Nonohonis, Noesiu, Benahe, Okefan, Billa, Neke, Baus, Kampung Baru, Toianas, Oebesa, Batnun, Tliu, Taebone, Tuasene, Nunusunu, Balu, Hane, Nunumeu, Skinu, Loli, Niki-Niki Un, Linamnutu, Mnelalete, Kelle, Bokang, Noemuke, Konbaki, Oebobo, Kokfeu, Kolbano, Nifulinah, Taubneo, Mio, Pika.
Sedang	Mollo Selatan, Santian, Kualin, Toianas, Amanuban Selatan, Amanuban Timur, Nunbena, Kokbaun, Noebaba, Mollo Barat, Mollo Tengah, Fatumnasi, Amanuban Barat, Batuputih, Fatukopa, Amanatun Selatan, Polen, Mollo Utara, Kuanfatu, Nunkolo, Ki'E, Amanatun Utara, Kuantana, Noebana, Kota So'E, Kot'olin, Tobu,	Biloto, Manufui, Oni, Tuataum, Pollo, Sini, Enoneten, Tancotob, Obaki, Enonabuasa, Ocuban, Oelekam, Fetomone, Kuannoel, Nekemunifeto, Nifukani, Benlutu, Lil'ana, Poli, Fatukopa, Fatuoni, Kiubaat, Oenino, Fatumanufui, Anin, Oelnunuh, Halme, Noebesi, Tuapakas, Noecolin, Basmuti, Oehela, Lasi, Mauleum, Fatumnutu, Fatutnana, Noinbila, Hoineno, Kusi, Bijaepunu, Kuanfatu, Tubuhue, Kualeu, Haumenibaki, Bisene, O'besi, Oekiu, Mnelanen, Kakan, Fatukusi, Nifukiu, Nuapin, Tauanas, Putun, Nunkolo, Bokong, Sahan, Haumeni, Pusu, Niti, Hoibeti, Oebaki, Supul, Oelbubuk, Oinlasi, Tupan, Eonbesi, Oeckam, Nenas, Bikelneno, Fat, Noebesa, Nusa, Usapimnasi, Muna, Oe Ue, Nulle, Nefokoko, Fatuat, Noebana, Oebo, Kuatae, So'E, Enoneontes, Borleu, Spaha, Sabun, Binaus, Nobi Nobi, Lotas, Puna, Hoi, Noenoni, Noemeto, Boentuka, Bijeli, Tune, Pubasu, Netpala, Taebesa, Mnesatbubuk, Lilo, Oof, Sillu, Bone, Nualunat, Bestobe, Ochan, Baki, Oemaman, Ajabaki, Saenam, Leonmeni, Noebaba, Nenotes, Fotilo, Tobu, Fatuulan, lelobatan, Milli, Oeleon, Huetaan, Babuin, Tuakole, Lobus, Leloboko, Kot'olin, Sainoni, Oeckam, Oetuke, Laob, Oeleu, Olais, Nununamat, Boti, Naip, To'manat, Fatumnasi, Tofen, Kusi Utara, Nakfunu, Niki-Niki, Tunua, Nunbena, Bileon, Netutnana, Fac, Koloto, Kaeneno, Taiftob, Sappala, Ofu, Nenoat, Tetaf, Lakat, Falas, Kelle Tunan, Lanu, Oepilki, Pene Selatan, Nekmese, Tumu, Naifatu.
Tinggi	Amanuban Barat, Noebaba, Fautmolo, Mollo Utara, Noebana, Amanatun Selatan, Toianas, Ki'E, Kolbano, Santian, Tobu, Nunkolo, Nunbena, Amanuban Tengah, Kuantana, Amanatun Utara, Amanuban Selatan, Kot'olin, Fatumnasi, Amanuban Timur, Kuanfatu,	Tunbes, Sopo, Tubmonas, Oenai, Fenun, Maunum Niki-Niki, Nano, Panite, Mnelapetu, Nasi, Nifuleo, To'I, Binenok, Eno Napi, Tesiayofanu, Pisan, Mutis, Snok, Napi, Telukh, Iusmollo, Naukae, Pana, Nunleu, Taupi, Nunuhkniti, Sunu, Tunis, Suni, O'obibi, Nalleu, Sono

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman tanah longsor serta indeks ancaman tanah longsor yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang memiliki jenis tanah batuan ubahan, memiliki soil tebal, berada di jalur struktur geologi, memiliki banyak rekahan, curah hujan yang banyak serta memiliki kemiringan lereng dari sedang sampai curam menempati ancaman tinggi.

F. Bencana Gempa Bumi

Penyusunan indeks ancaman gempa bumi di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Sesar (Badan Informasi Geospasial)
2. Patahan (Badan Informasi Geospasial)
3. Litologi (Badan Informasi Geospasial)

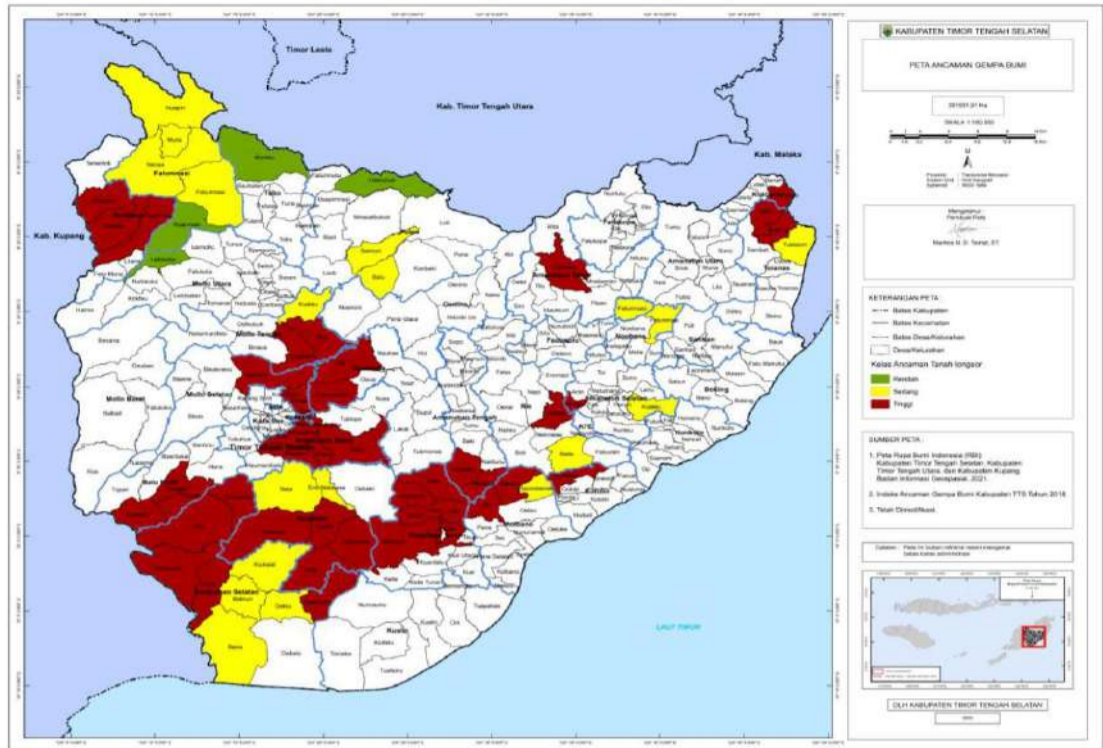
Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman gempa bumi sebagai berikut:

Tabel 14: Pembobotan Indeks Ancaman Gempa Bumi

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	Geologi	Sesar	10	>601	301-600m	1-300M
		Patahan	10	>601	301-600m	1-300M
	Litologi	10	Endapan aluvial	Batugamping	Batuan ubahan, memiliki soil tebal, terdapat napa; lempung, berada di jalur struktur geologi, memiliki banyak rekahan	
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 14: Peta Ancaman Gempa Bumi Kabupaten TTS



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel 15: Indeks Risiko Bencana Gempa Bumi menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO BENCANA GEMPA BUMI	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Rendah	Tobu, Polen, Fatumnasi, Mollo Utara, Amanuban Selatan	Bonleu, Oelnunuh, Kuannoel Nenas, Leloboko, Batnun
Sedang	KiE, Noebeba, Amanatun Selatan, Fatumnasi, Kota SoE, Toianas, Amanuban Tengah, Kuanfatu, Polen, Amanuban Selatan, Kolbano, Nunbena, Mollo Tengah, Batu Putih, Kuatnana, Amanuban Barat, Amanuban Tengah	Belle, Enonabuasa, Kualeu, Nuapin, Bena, Kobekamusa, Fatumnasi, Tuataum, Ofu, Kakan, Balu, Oekiu, Oebobo, Haunobenak, Pika, Sainoni, Nunbena, Babuin, Basmuti, Lasi, Oelekam, Oof, Mnelalete, Taebesa, Kiubaat, Olais, Mio, Enoneten Linamnutu, Oeekam
Tinggi	Amanatun Selatan, Fatumnasi, Amanatun Utara, Noebeba, Amanuban Selatan, Nunbena, Batu Putih, Kuatnana, Amanuban Barat, Noebeba, Kuanfatu, Kokbaun, Mollo Selatan	Oinlasi, Mutis, Bokong, Oepliki, Pollo, Noebesi, Oehela, Enoneontes, Nulle, Naip, Teas, Oehan, Fatutnana, Pusu, Noemuka, Noebeba, Tunbes, Nifukani, Obaki, Noinbila, Milli, Tuakole.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Dari hasil peta ancaman gempa bumi serta indeks ancaman gempa bumi yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang dilewati sesar dan patahan menempati ancaman tinggi.

G. Bencana Ancaman Tsunami

Penyusunan indeks ancaman tsunami di Kabupaten TTS menggunakan parameter:

1. Kemiringan Lereng Pantai (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial)
2. Skala MMI (BMKG)
3. Hutan Bakau (Badan Informasi Geospasial)

4. Sempadan Pantai (pengolahan dari data dasar Badan Informasi Geospasial).

Pembobotan dari setiap indikator yang digunakan dalam penyusunan indeks ancaman tsunami sebagai berikut:

Tabel 16: Pembobotan Indeks Ancaman Tsunami

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	BOBOT	SKOR		
				RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	MORFOMETRI	kemiringan lereng pantai	7	>15%	15-10%	<10%
2	SKALA MAGNITUDE	Skala MMI	5	VI-VII	VII-VIII	VIII-XII
3	VEGETASI	Hutan bakau	8	lebat	sedang	tidak ada
4	PANTAI	Sempadan Pantai	10	>500	300-500	0-300
			30			

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel 17: Indeks Risiko Bencana Tsunami menurut Wilayah di Kabupaten TTS

INDEKS RISIKO BENCANA TSUNAMI	LOKASI	
	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Rendah	Nunkolo, Kot'olin, Boking	Sahan, Hoibeti, Hoineno, Meusin, Saenam, Nunkolo
Sedang	Kualin, Kolbano, Boking, Nunkolo, Amanuban Selatan	Kualin, Nununamat, Toineke, Baus, Boking, Oetuke, Nenoat, Fatumanufui, Bena, Oni, Tuapakas
Tinggi	Amanuban Selatan, Boking, Kolbano, Kot'olin, Kualin, Nunkolo.	Bena, Oebelo, Boking, Meusin, Baus, Kolbano, Op, Noesiu, Oetuke, Nununamat, Hoibeti, Nualunat, Kualin, Oni, Sahan, Tuapakas, Saenam, Nenoat, Nunkolo, Hoineno.

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

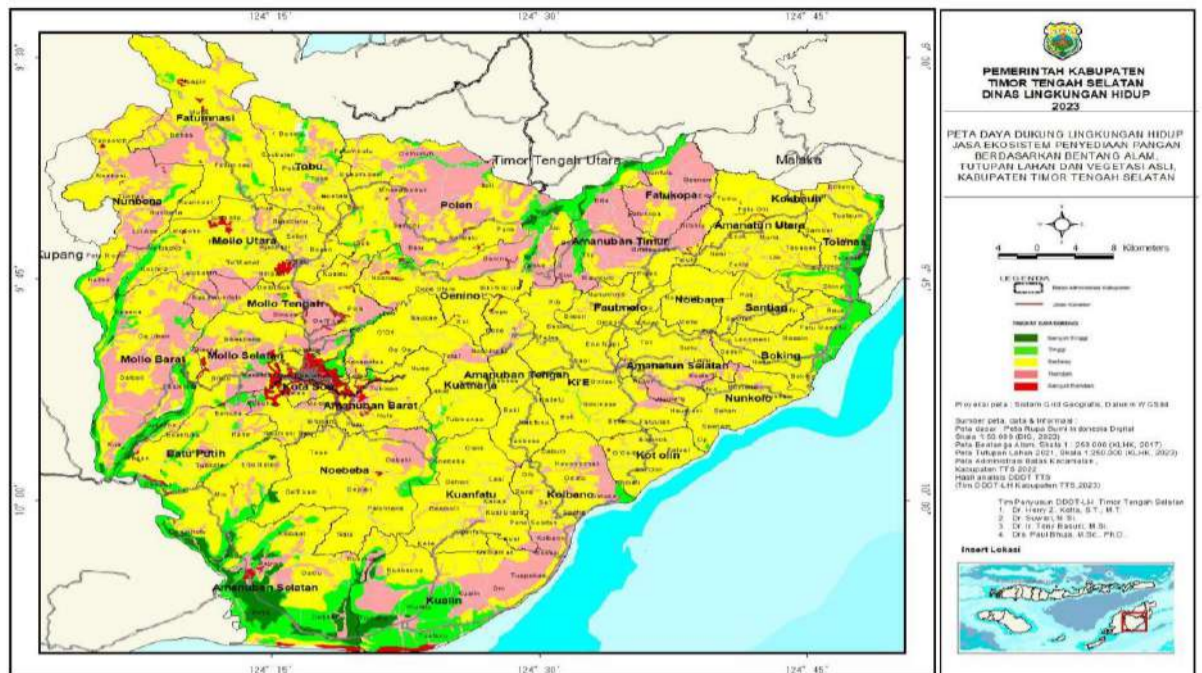
Dari hasil indeks ancaman tsunami yang tersusun, wilayah-wilayah (desa/kelurahan) yang berada di pesisir pantai, memiliki kemiringan lereng pantai dibawah 10% dan tidak memiliki hutan bakau menempati ancaman tinggi.

2.1.1.9. Jasa Ekosistem

A. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

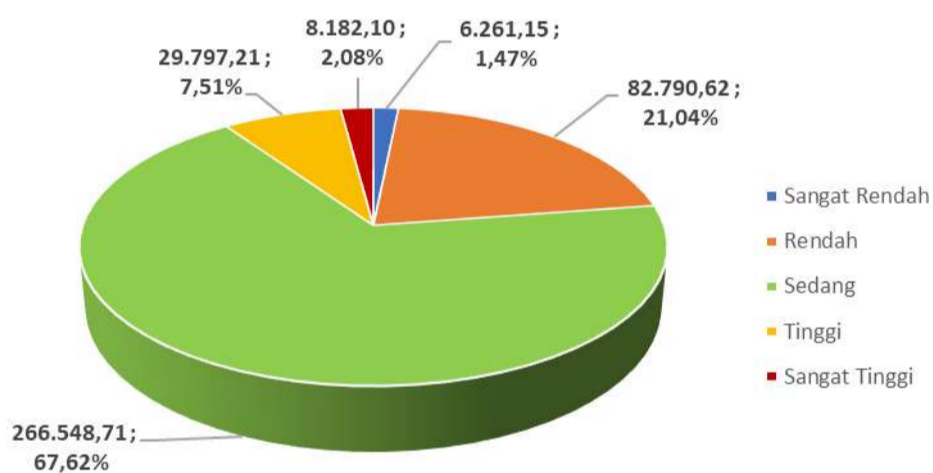
Jenis bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli memiliki peran penting dalam memberikan jasa ekosistem penyediaan pangan. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan pangan di Wilayah Kabupaten TTS berdasarkan 3 (tiga) proksi tersebut (bentang alam 15 jenis, tutupan lahan 15 jenis dan vegetasi asli 14 jenis) menghasilkan 3150 kombinasi jasa ekosistem yang diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi yaitu kategori sangat rendah seluas 6.261,15 Ha (1,47%), kategori rendah seluas 82.790,62 Ha (21,04%), kategori sedang seluas 266.548,71 Ha (67,72%), kategori tinggi seluas 29.797,21 Ha (7,51%) dan kategori sangat tinggi seluas 8.182,10 Ha (2,08%). Peta daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyedia pangan Kabupaten TTS berdasarkan bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli ditunjukkan pada Gambar 15, sedangkan distribusi luas dan peran jasa ekosistem penyedia pangan ditunjukkan pada 16.

Gambar 15: Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 16: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi



Distribusi luas dan peran jasa ekosistem penyediaan pangan berdasarkan tiga proksi di Kabupaten TTS menunjukkan bahwa terdapat 13 kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem penyediaan pangan berkategori sangat tinggi. Daerah yang memiliki luasan terbesar pada kategori ini adalah Kecamatan Amanuban Selatan dengan total luasan 5.012,02 Ha (1,27%) dan Kecamatan Kualin dengan total luasan 741,31 Ha (0,19%). Jasa ekosistem penyedia pangan berkategori tinggi terdistribusi pada 25 kecamatan di Kabupaten TTS. Daerah yang memiliki luasan terbesar untuk kategori ini adalah Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas 6.693,28 Ha (1,70%) dan Kecamatan Kualin dengan luas 5.774,57 Ha (1,47%).

B. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

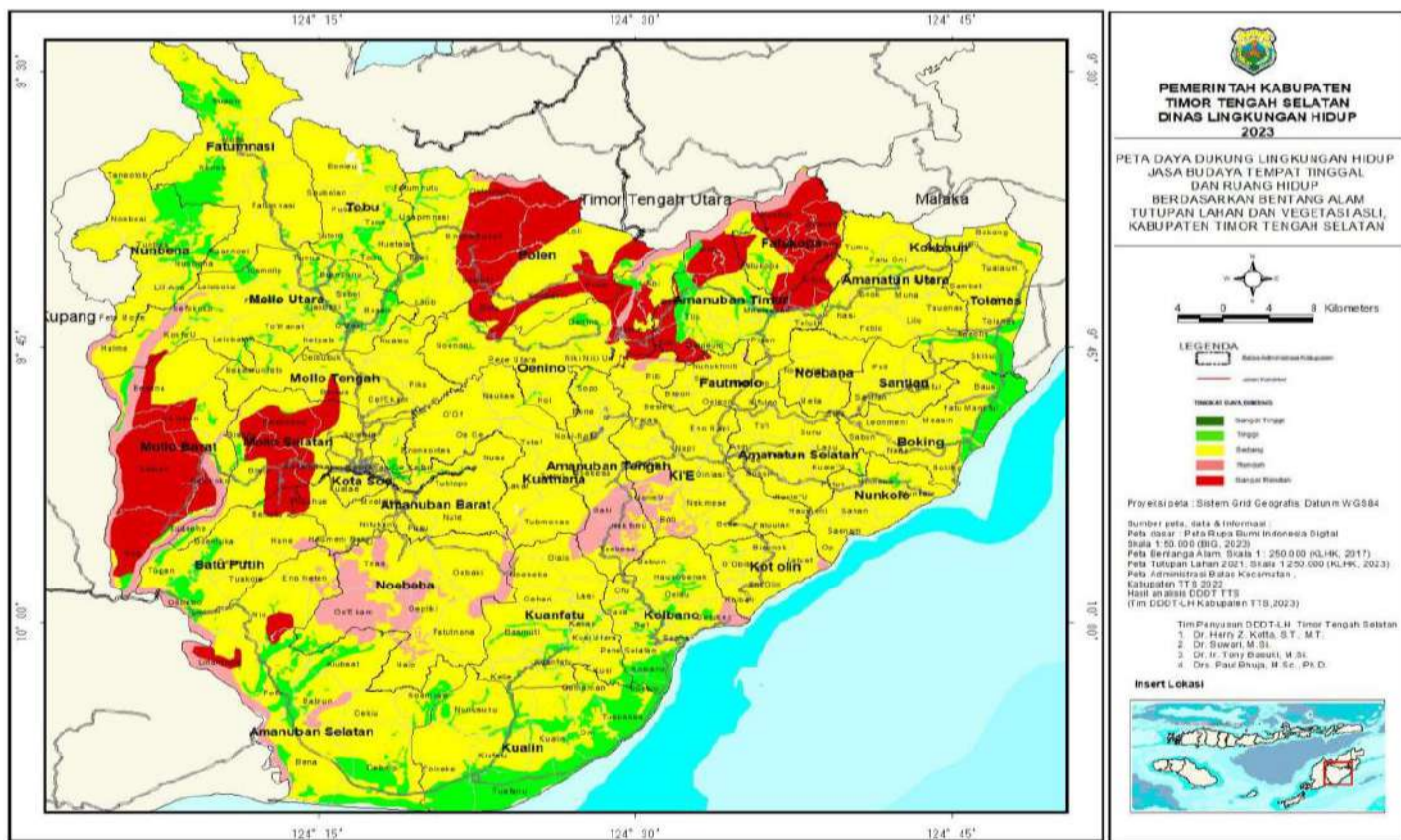
Daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan air bersih di wilayah Kabupaten TTS berdasarkan 3 (tiga) proksi

terdapat 20 kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem penyediaan air bersih berkategori sangat tinggi. Daerah yang memiliki luasan terbesar pada kategori ini adalah Kecamatan Mollo Barat dengan total luasan 1.532,58 Ha (0,39%) dan Kecamatan Amanuban Selatan dengan total luasan 906,94 Ha (0,23%). Jasa ekosistem penyedia air bersih berkategori tinggi terdistribusi pada 31 kecamatan di Kabupaten TTS. Daerah yang memiliki luasan terbesar untuk kategori ini adalah Kecamatan Fatumnasi dengan luas 7.660,47 Ha (1,95%) dan Kecamatan Tobu dengan luas 3.595,39 Ha (0,91%).

C. Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

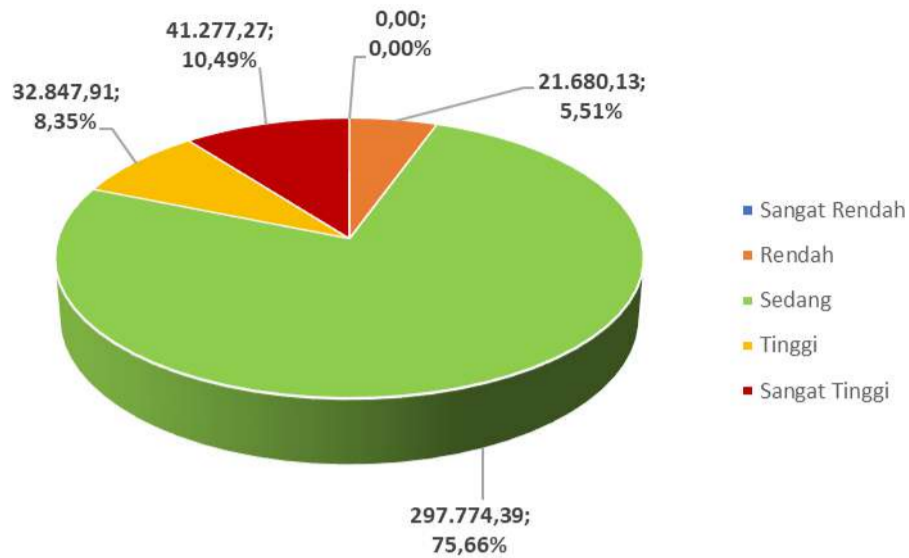
Daya dukung lingkungan jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten TTS berdasarkan 3 (tiga) proksi diklasifikasikan ke dalam 4 kategori potensi, yaitu rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Terdapat 340 kombinasi jenis bentang alam, tutupan lahan, dan vegetasi asli/alami dengan total luasan 41.277,27 Ha yang berpotensi mampu memberikan jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup berkategori sangat tinggi dengan KJE berkisar 4,30 – 5,00 dan terdapat 801 kombinasi bentang alam, tutupan lahan dan jenis vegetasi asli seluas 32.847,91 Ha yang memiliki daya tampung lingkungan jasa ekosistem pendukung tempat tinggal dan ruang hidup berkategori tinggi dengan KJE 3,50 – 4,20. Peta daya dukung jasa ekosistem budaya tempat tingkat dan ruang hidup Kabupaten TTS berdasarkan bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli ditunjukkan pada Gambar 19, sedangkan distribusi luas dan peran jasa ekosistem budaya tempat tingkat dan ruang hidup ditunjukkan pada Gambar 20.

Gambar 19: Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 20: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi



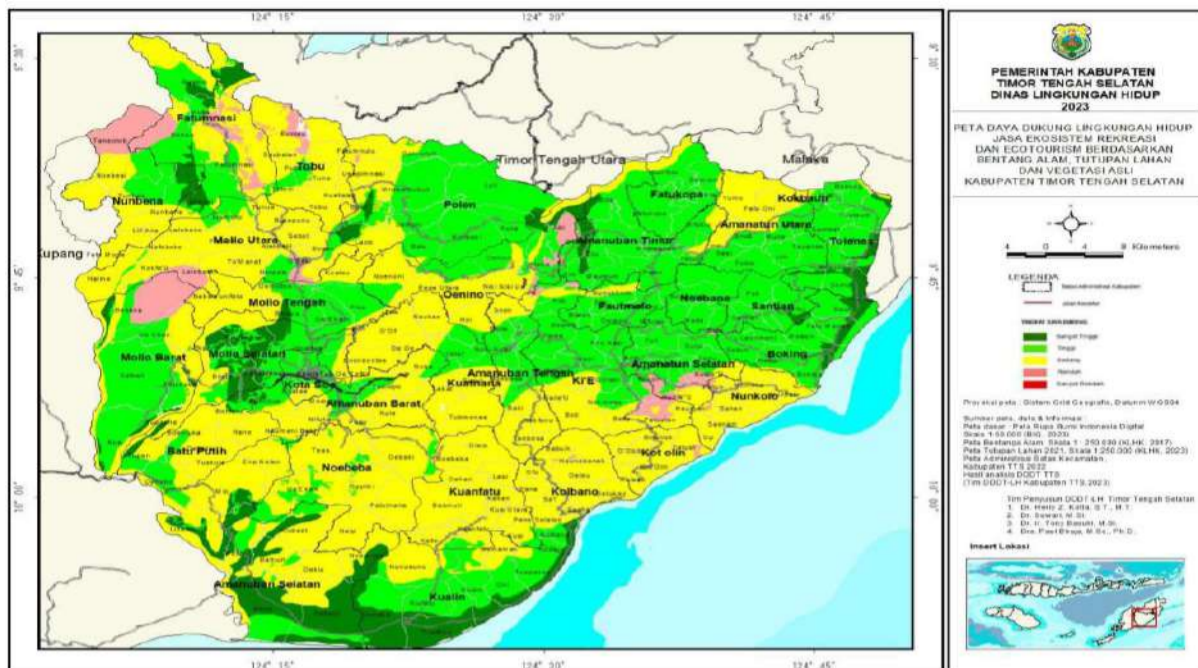
Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045 (Diolah)

Distribusi luas dan peran jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup berdasarkan tiga proksi di Kabupaten TTS menunjukkan bahwa terdapat 14 kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup berkategori sangat tinggi. Daerah yang memiliki luasan terbesar pada kategori ini adalah Kecamatan Polen dengan total luasan 10.759,60 Ha (2,73%) dan Kecamatan Mollo Barat dengan total luasan 10.154,15 Ha (2,58%). Jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup berkategori tinggi terdistribusi pada 30 kecamatan di Kabupaten TTS. Daerah yang memiliki luasan terbesar untuk kategori ini adalah Kecamatan Kualin dengan luas 8.114,43 Ha (2,06%) dan Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas 4.807,91 Ha (1,22%).

D. Jasa Ekosistem Rekreasi dan Ekowisata

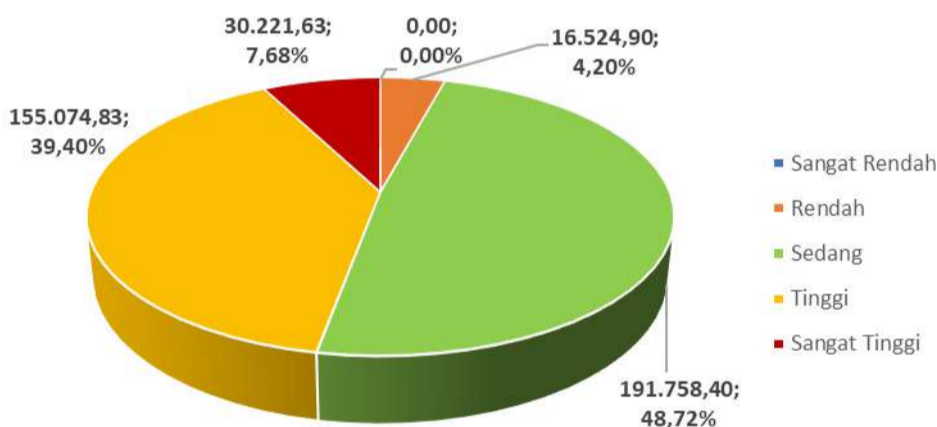
Daya dukung lingkungan jasa ekosistem budaya rekreasi dan ekowisata Kabupaten TTS berdasarkan 3 (tiga) proksi diklasifikasikan ke dalam 4 kategori potensi yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Terdapat 551 kombinasi bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli dengan total luas 30.221,63 Ha yang berpotensi memberikan jasa lingkungan hidup berkategori sangat tinggi dengan nilai KJE 4,30 – 5,00 dan sebanyak 24 kombinasi bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli yang menghasilkan nilai KJE tertinggi 5,00. Peta daya dukung jasa ekosistem rekreasi dan ekowisata Kabupaten TTS berdasarkan bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli ditunjukkan pada Gambar 21, sedangkan distribusi luas dan peran jasa ekosistem rekreasi dan ekowisata ditunjukkan pada Gambar 22.

Gambar 21: Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekowisata Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 22: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekowisata Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045 (Diolah)

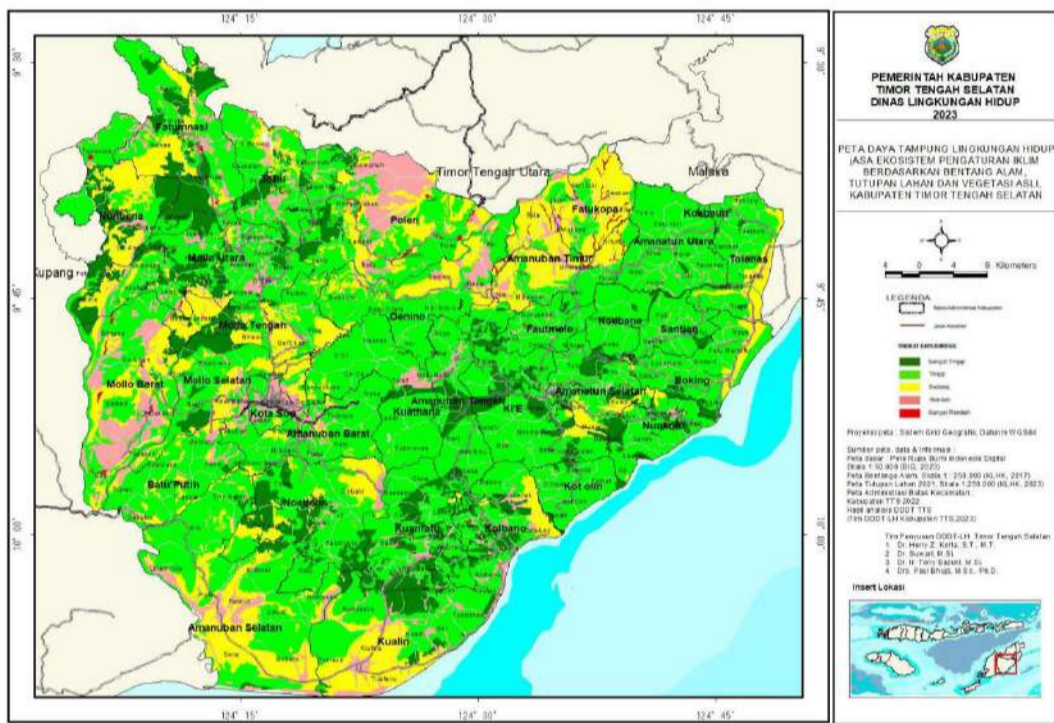
Distribusi luas dan peran jasa ekosistem budaya rekreasi dan ekowisata berdasarkan tiga proksi di Kabupaten TTS menunjukkan bahwa terdapat 21 kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem budaya rekreasi dan ekowisata berkategori sangat tinggi. Daerah yang memiliki luasan terbesar pada kategori ini adalah Kecamatan Amanuban Selatan dengan total luasan 9.838,99 Ha (2,50%) dan Kecamatan Kualin dengan total luasan 6.499,11 Ha (1,65%). Jasa ekosistem budaya rekreasi dan ekowisata berkategori tinggi terdistribusi pada 30 kecamatan di Kabupaten TTS. Daerah yang memiliki luasan terbesar untuk kategori ini adalah Kecamatan Polen dengan luas 17.583,17 Ha (4,47%) dan Kecamatan Amanuban Timur dengan luas 11.062,90 Ha (2,81%).

E. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Jasa pengaturan iklim ditentukan oleh 10 faktor yaitu: suhu, tekanan udara, angin, kelembapan udara dan awan, curah hujan, elevasi, arus laut, luas wilayah perairan, nahan pencemar udara dan

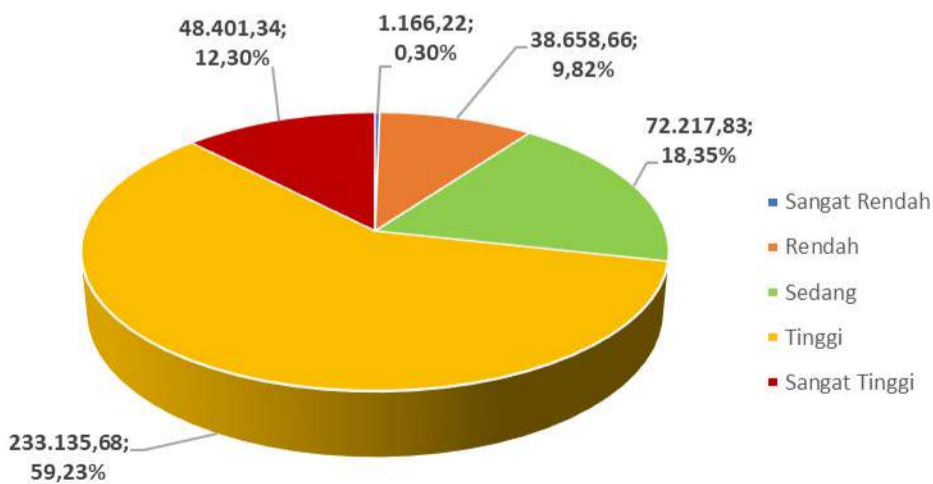
garis lintang. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan iklim di wilayah Kabupaten TTS berdasarkan jenis bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi (3 proksi) diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Terdapat masing-masing 320 dan 1510 kombinasi bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi alami yang berpotensi memberikan jasa ekosistem pengatur iklim yang berkategori sangat tinggi (KJE 4,28 – 4,88) seluas 48.401,34 ha dan kategori tinggi (KJE 3,44 – 4,20) seluas 233.135,68 ha. Peta daya dukung jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten TTS berdasarkan bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli ditunjukkan pada Gambar 23, sedangkan distribusi luas dan peran jasa ekosistem pengaturan iklim ditunjukkan pada Gambar 24.

Gambar 23: Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 24: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi



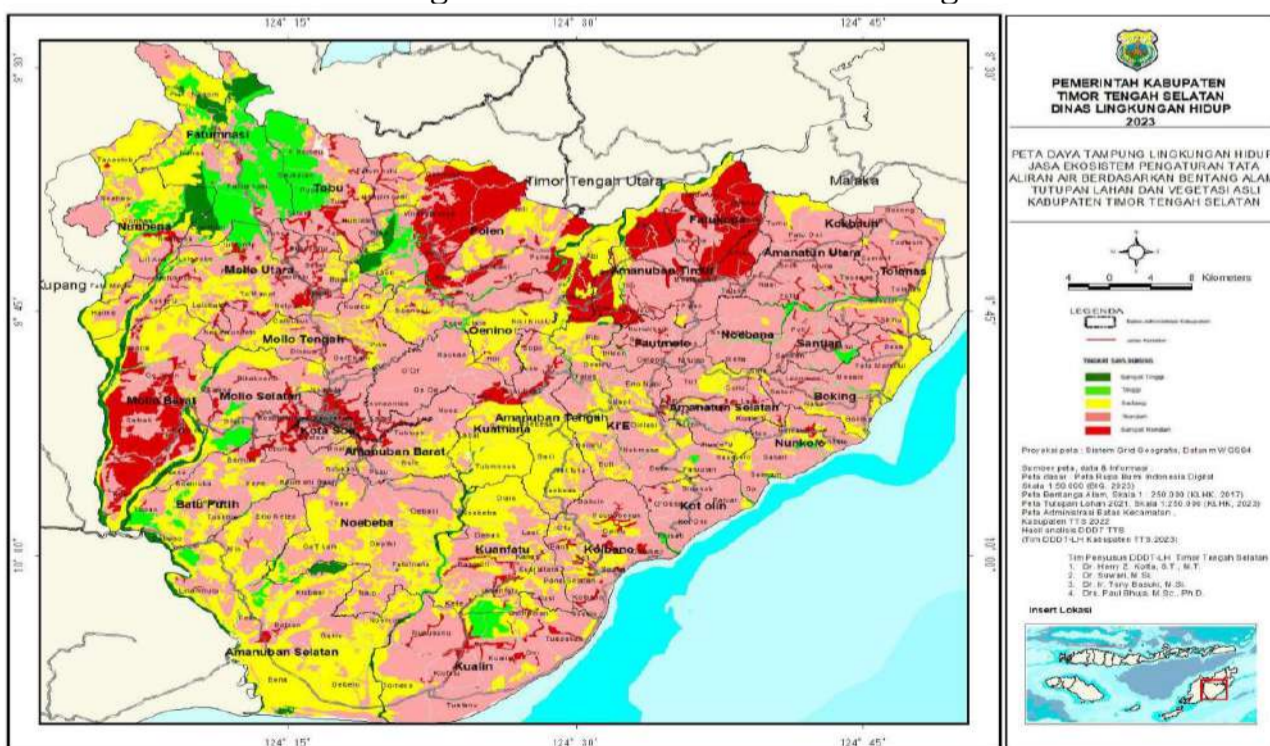
Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045 (Diolah)

Distribusi luas dan peran jasa ekosistem pengaturan iklim berdasarkan tiga proksi di Kabupaten TTS menunjukkan bahwa terdapat 29 kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem pengaturan iklim berkategori sangat tinggi. Daerah yang memiliki luasan terbesar pada kategori ini adalah Kecamatan Fatumnasi dengan total luasan 5.365,73 Ha (1,36%), Kecamatan Mollo Utara dengan total luasan 4.696,56 (1,19%) dan Kecamatan Kuanfatu dengan total luasan 4.501,65 Ha (1,14%). Jasa ekosistem pengaturan iklim berkategori tinggi terdistribusi pada 32 kecamatan di Kabupaten TTS. Daerah yang memiliki luasan terbesar untuk kategori ini adalah Kecamatan Amanuban Selatan dengan luas 17.723,35 Ha (4,50%), Kecamatan KiE dengan total luasan 12.595,22 (3,20%) dan Kecamatan Oenino dengan luas 12.318,25 Ha (3,13%).

F. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air

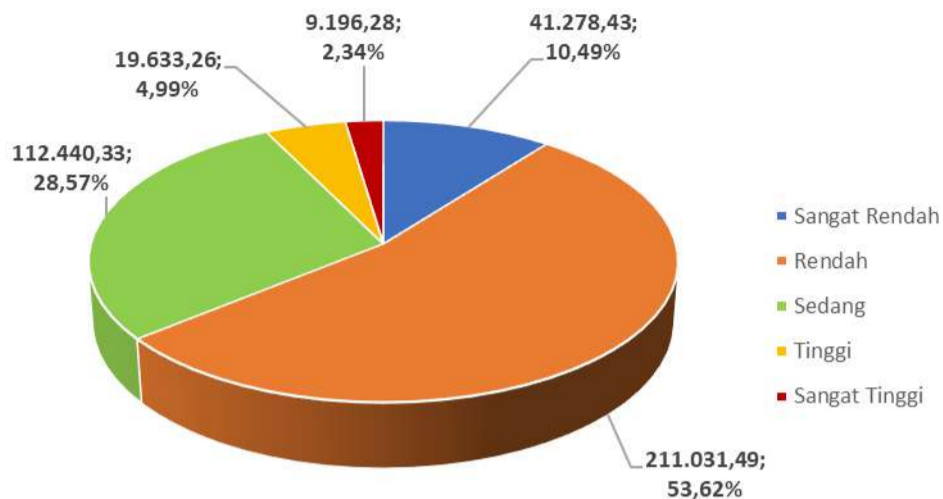
Jasa ekosistem pengaturan tata air di suatu daerah sangat bergantung pada kondisi lingkungan daerah tersebut. Daerah yang masih alami pengaturan tata air akan berbeda dengan daerah yang telah terganggu. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan tata air di Wilayah Kabupaten TTS berdasarkan jenis bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Terdapat masing-masing 252 dan 374 kombinasi bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi alami yang berpotensi memberikan jasa ekosistem pengatur tata air yang berkategori sangat tinggi (KJE 4,32 – 4,72) seluas 9.196,28 ha dan kategori tinggi (KJE 3,48 – 4,20) seluas 19.633,26 ha. Peta daya dukung jasa ekosistem pengaturan tata air di Kabupaten TTS berdasarkan bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli ditunjukkan pada Gambar 25, sedangkan distribusi luas dan peran jasa ekosistem pengaturan tata air ditunjukkan pada Gambar 26

Gambar 25: Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Gambar 26: Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Kabupaten TTS Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045 (Diolah)

Distribusi luas dan peran jasa ekosistem pengaturan tata air berdasarkan tiga proksi di Kabupaten TTS menunjukkan bahwa terdapat 22 kecamatan yang memiliki potensi terhadap jasa ekosistem pengaturan tata air berkategori sangat tinggi. Daerah yang memiliki luasan terbesar pada kategori ini adalah Kecamatan Fatumnasi dengan total luasan 2.111,54 Ha (0,54%) dan Kecamatan Mollo Barat dengan total luasan 1.540,64 Ha (0,39%). Jasa ekosistem pengaturan tata air berkategori tinggi terdistribusi pada 31 kecamatan di Kabupaten TTS. Daerah yang memiliki luasan terbesar untuk kategori ini adalah Kecamatan Fatumnasi dengan luas 6.469,67 Ha (1,64%) dan Kecamatan Tobu dengan luas 3.575,03 Ha (0,91%).

2.1.1.10. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pembangunan pertambangan terutama dilakukan melalui penganekaragaman hasil tambang dan pengelolaan usaha pertambangan secara efisien. Terdapatnya bahan galian di suatu tempat erat kaitannya dengan kondisi geologi daerah tersebut. Kondisi geologi yang dimaksud adalah posisi lempeng kulit bumi, baik lempeng samudera maupun lempeng benua yang saat ini dapat dilihat dari rekaman stratigrafi. Indonesia terletak pada lempeng benua yang di bagian selatan adalah penunjaman lempeng samudera. Posisi dari bagian lempeng tersebut mulai dari ujung penunjaman sampai menjauhinya akan mengontrol sebaran bahan galian. Pada wilayah ujung penunjaman atau di daerah kontak suatu batuan dengan batuan beku intrusi banyak ditemukan jenis bahan galian yang berasal dari batuan metamorf, seperti asbes, marmar, mika dan garnet.

Hasil pembekuan magma yang terbentuk di bagian dalam kulit bumi akan menghasilkan batuan beku, seperti granit, diabas, diorit dan juga dapat menghasilkan urat-urat kuarsa yang mengandung bijih emas. Batuan beku dalam yang bersifat asam mengandung logam tertentu seperti tembaga, besi dan lainnya. Batuan beku luar hasil kegiatan vulkanisme dapat menghasilkan lava, rempah-rempah vulkanik yang berukuran pasir sampai bongkah antara lain basalt, andesit, batu apung, tuf dan pasir vulkanik. Sedangkan

batuan beku yang dekat permukaan berupa basalt dan andesit. Melalui proses sedimentasi dari hasil rombakan batuan yang ada dapat diendapkan bahan galian seperti emas sekunder, pasir besi, batugamping klastik dan lainnya. Batu gamping non klastik terbentuk di daerah pantai sampai laut dangkal yang dibangun oleh organisme laut seperti koral, algae, foraminifera dan lainnya. Endapan lempung dapat terbentuk di darat sampai laut dalam. Endapan lempung yang terbentuk di laut dangkal biasanya mengandung karbonat (gampingan) dan dinamakan napal. Sementara pasir dapat terbentuk di sungai, pantai dan laut dangkal. Pasir kuarsa terbentuk di laut dangkal dan juga di pantai atau di darat yang merupakan hasil rombakan batuan beku asam seperti granit.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009, disebutkan bahwa:

Pertambangan mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium dan zenotin.

Pertambangan mineral bukan logam adalah Intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kreolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolith, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen.

Pertambangan batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fuller earth), slate granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan

Kabupaten TTS termasuk kabupaten dengan potensi tambang yang cukup banyak tetapi belum diolah dengan baik. Potensi hasil tambang dan energi di Kabupaten TTS pada dapat dilihat sebarannya di tabel berikut:

Tabel 18: Potensi Bahan Galian di Kecamatan dalam Kabupaten TTS

No	Potensi Bahan Galian Dan Lokasi		Kecamatan
	Logam	Non Logam	
1.		Marmer	Mollo Utara
2.		Batu gamping	Mollo Selatan, Amanuban Barat, Amanuban Selatan, Amanuban Tengah, Amanuban Timur
3.		Batu hias	Amanuban Tengah

4.		Pasir kuarsa	Amanatun Selatan
5.		Sirtu	Mollo Utara
6.		Dolomit	Amanatun Utara
7.		Lempung	Amanuban Barat, Amanatun Selatan, Amanuban Tengah
8.		Utrabasa	Mollo Utara
9.	Mangan (Mn)		Mollo Utara, Mollo Selatan, Amanuban Selatan, Amanuban Barat, Amanuban Tengah

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

Tabel berikut menyajikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten TTS:

Tabel 19: IUP yang Tersebar di Kabupaten TTS setelah Terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020

No	Tahapan Kegiatan	Nama Pemilik IUP	No SK WIUP dan Luas	Lokasi	Komoditas
1	Operasi Produksi	PT. HAMPARAN ALAM NUSANTARA	300/KEP/HK/2011 11/29/2011, 1:00 AM 11/28/2031, 1:00 AM Luas: 1.904,00 ha	Kec. Polen, Desa Oeinunu, Usapimasi dan Fatumnutu	Mangan
2	Operasi Produksi	PT. WELINDO INTI PRATAMA	274/KEP/HK/2014 9/18/2014, 1:00 AM 9/18/2034, 1:00 AM Luas: 4.874,00 ha	Kec. Mollo Utara, Desa Sebet, Bijaepuru, Tutem dan Mnesatubuk	Mangan
3	Operasi Produksi	CV. TALENA LAIN	540/46/KPTS/2016 12/28/2016, 1:00 AM 12/27/2021, 1:00 AM Luas: 1,59 ha	Amanuban Selatan	Sirtu
4	Operasi Produksi	PT. NANDA KARYA PUTRA PRATAMA	540/82/DPMPPTSP/2018 5/13/2018, 1:00 AM 5/14/2023, 1:00 AM Luas: 33,30 ha	Amanuban Selatan	Batu dan Pasir
5	Operasi Produksi	PT. HARAPAN ALAM NUSANTARA	301/KEH/HK/2011 11/29/2011, 1:00 AM 11/28/2031, 1:00 AM Luas: 4.731 ha	Oe'baki, Oe'Pliici dan Fatutnana	Mangan
6	Operasi Produksi	PT. SOE MAKMUR RESOURCES	39/KEP/HK/2010 2/1/2010, 1:00 AM 2/1/2030, 1:00 AM Luas: 4,550 ha	Kec. Kuantnana dan Amanuban Tengah	Mangan
7	Operasi Produksi	PT. TIMOR MAKMUR RESOURCES	322/KEP/HK/2012 11/10/2012, 1:00 AM 11/10/2032, 1:00 AM Luas : 5.000,00 ha	Kec. Ki'e Desa Silu, Kec. Fautmolo	Mangan
8	Operasi Produksi	PT. TTS MAKMUR RESOURCES	321/KEP/HK/2012 11/10/2012, 1:00 AM 11/10/2032, 1:00 AM Luas: 5.000,00 ha	Kec. Fautmolo, Desa Oe'leon dan Desa Kaeneno	Mangan
9	Operasi Produksi	PT. BERKAT ESA MINING	380/KEP/HK/2013 11/19/2013, 1:00 AM 11/19/2033, 1:00 AM Luas : 3.000,00 ha	Amanatun Utara, Toianas dan Santian	Mangan
10	Operasi Produksi	CV. INTI PEMBANGUNAN	540/21/DPMPPTSP/2019 2/7/2019, 1:00 AM 2/7/2024, 1:00 AM Luas: 1 ha	Kualin	Batu Warna
11	Operasi Produksi	CV. BERDIKARI	540/41/DPMPPTSP/2018 4/26/2018, 1:00 AM 4/26/2023, 1:00 AM Luas : 0,60 ha	Tuapukas	Batu warna
12	Operasi Produksi	KOPERASI FETO MONE	540/89/DPMPPTSP/2018 8/28/2018, 1:00 AM 8/27/2023, 1:00 AM Luas : 0,90 ha	Kolbano	Pasir dan Batu Warna
13	Operasi Produksi	CV. ANEKA NIAGA JAYA	540/94/DPMPPTSP/2018 9/3/2018, 1:00 AM 9/2/2023, 1:00 AM Luas : 7 ha	Kolbano	Batu Warna/ Ker ilkil
14	Operasi Produksi	CV. SUMEL RERIN	540/51/DPMPPTSP/2019 4/9/2019, 8:00 AM 4/8/2024, 8:00 AM Luas : 1 ha	Kec. Kotolin Desa Nualunat dan Holibeti	Batu Warna
15	Operasi Produksi	KOPERASI FETO MONE	540/89/DPMPPTSP/2018 8/28/2018, 1:00 AM 8/27/2023, 1:00 AM Luas : 0,90 ha	Kobano	Pasir dan Batu Warna
16	Operasi Produksi	CV. USAHA MAKMUR SEJAHTERA	540/11/DPMPPTSP/2019 1/30/2019, 1:00 AM 1/29/2024, 1:00 AM Luas : 0,65 ha	Kec. Kotolin Desa Nualunat	Batu Warna
17	Operasi Produksi	CV. EFRATA	540/22/DPMPPTSP/2019 2/7/2019, 1:00 AM 2/6/2024, 1:00 AM Luas : 2 ha	Nunkolo	Batu Warna
18	Operasi Produksi	PT. KARYA MASAKU JAYA	540/45/DPMPPTSP/2020 3/24/2020, 1:00 AM 3/23/2025, 1:00 AM Luas : 12,7 ha	Boking	Sirtu
19	Operasi Produksi	KOPERASI ONE TUAN	540/92/DPMPPTSP/2019 7/1/2019, 1:00 AM 6/30/2024, 1:00 AM Luas : 1,80 ha		

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

2.1.1.11. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah perubahan unsur-unsur iklim dalam jangka panjang (50-100 tahun) yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia (antropogenik) yang menghasilkan gas rumah kaca (GRK) seperti CO₂, CH₄, HFC, N₂O, CF₄, CFC₁₂ dll. Variabilitas iklim musiman (musim hujan dan kemarau yang berubah mendadak), tahunan (musim kemarau atau hujan yang berubah periodisitasnya) dan dekadal (kejadian ekstrim seperti El Nino dan La Nina), hanyalah dampak dari perubahan iklim dan tidak termasuk perubahan iklim.

Iklim berubah secara dinamik akibat interaksi antara komponen-komponen dalam sistem iklim (faktor internal) dan variasi eksternal yang disebabkan oleh variasi alamiah (seperti variasi sinar

matahari) dan aktivitas manusia (antropogenik). Perubahan iklim adalah perubahan signifikan pada iklim, suhu udara dan curah hujan akibat meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida (CO₂) dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca (GRK).

Variabilitas iklim yang ditandai oleh adanya perubahan suhu udara dan curah hujan, sangat berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya air dan permintaan air untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Variabilitas iklim juga perlu mendapatkan perhatian dikarenakan potensi dampaknya terhadap kejadian bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, longsor) pada berbagai daerah. Sebagai contoh banjir dan kekeringan berkaitan erat dengan kejadian dan intensitas hujan. Curah hujan lebih rendah dari kondisi normal berpotensi mengakibatkan kekeringan, sementara curah hujan lebih tinggi dari kondisi normal berpotensi mengakibatkan banjir khususnya pada daerah-daerah rawan banjir. Pola variabilitas curah hujan tersebut dipengaruhi oleh fenomena iklim *El Nino Southern Oscillation* (ENSO) atau dikenal dengan kejadian El Nino dan La Nina. Pada saat terjadi El Nino, berbagai daerah khususnya daerah bertipe iklim monsunal akan mengalami curah hujan yang lebih rendah dan memperpanjang musim kemarau, sementara kondisi sebaliknya terjadi pada saat La Nina.

Faktor pemicu (driver) terjadinya perubahan iklim adalah pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas pembangunan (peningkatan ekonomi), proses industri dan peningkatan permintaan energi. Pemicu perubahan iklim terkait dengan 3 komponen utama yaitu ekonomi, masyarakat dan alam. Driver dari aspek ekonomi terkait kebutuhan energi, transportasi, sumber daya air, pariwisata, pertanian, perikanan, dan infrastruktur. Kebutuhan energi semakin meningkat seiring meningkatnya pembangunan, terutama pembangunan di sektor industri dan teknologi, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Kondisi tersebut berdampak pada semakin banyaknya sumber energi fosil diproduksi, diperdagangkan dan ditransportasikan, sehingga akan meningkatkan emisi gas CO₂. Pertumbuhan penduduk disertai peningkatan standar hidup dan laju industrialisasi telah meningkatkan permintaan air secara signifikan dan menekankan aspek kuantitas dan kualitas sumber daya air daerah. Driver dari masyarakat terkait kependudukan, pendidikan, kesehatan dan sistem pemerintahan. Bertambahnya jumlah penduduk dapat meningkatkan kebutuhan energi yang selama ini didominasi oleh Bahan Bakar Fosil (BBF). Penggunaan BBF akan memicu emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim. Manusia hidup bersama dalam komunitas yang terorganisir dengan hukum, tradisi, dan nilai-nilai bersama. Driver sosial/masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan manusia akan hubungan sosial, keadilan, tata kelola, dan budaya identitas. Driver Sosial secara luas mencakup rangkaian sosial, komunitas dan karakteristik politik yang mempengaruhi struktur dan fungsi sektor ekonomi, serta bertindak sebagai penentu utama kesehatan manusia. Misalnya, kurangnya keadilan atau represif tata kelola dapat mempengaruhi

kemampuan sektor ekonomi untuk berfungsi atau membatasi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Alam adalah substansial sebagai sumber daya, yakni sumber daya alam untuk dieksploitasi secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan sumber daya genetik dan nilai konservasi. Berbagai dampak dan tekanan pada sistem alami terjadi akibat eksploitatif secara berlebihan dan degradasi akibat aktivitas antropogenik. Secara umum, pengelolaan dan perencanaan sumber daya alam yang masih lemah menyebabkan degradasi pada sistem tertentu, misalnya, degradasi wilayah pesisir dan laut akibat pengembangan pariwisata dan menurunnya stok ikan akibat pencemaran dan penangkapan ikan yang berlebihan.

Tekanan terkait dengan aktivitas manusia yang secara langsung mempengaruhi lingkungan seperti emisi karbon dioksida dan gas metan, penggunaan lahan, ekstraksi sumber daya, dan eksternal input (pupuk, bahan kimia, irigasi). Tekanan terhadap perubahan iklim secara global berdasarkan proyeksi meteorologi model regional hingga 2090 pada umumnya menunjukkan peningkatan suhu udara rata-rata +1 hingga +5°C, penurunan curah hujan 30-45%, peningkatan suhu permukaan laut +1,5 hingga 2,6°C dan kenaikan permukaan air laut rata-rata 0,37 m hingga 0,58 m. Selain itu, kemungkinan akan ada lebih banyak lagi wilayah yang mengalami kekeringan dan gelombang panas yang lebih parah dan lebih sering terjadi, peningkatan aliran sungai pada musim hujan, penurunan aliran sungai pada musim panas dan lebih banyak peristiwa curah hujan.

Dampak perubahan iklim menimbulkan risiko yang sangat serius bagi suatu wilayah, ekosistem vital, dan sektor-sektor lain termasuk pertanian, kehutanan, kesehatan, kegiatan ekonomi lokal dan keanekaragaman hayati. Perubahan iklim juga dapat memperburuk penyakit serius lainnya dan menimbulkan tantangan regional, seperti kemiskinan, layanan kesehatan yang buruk, tidak meratanya distribusi sumber daya, berkurangnya daya tahan ekologis, dan kerawanan energi. Penilaian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim akan membantu meminimalkan dampak buruk melalui strategi adaptasi dan mitigasi yang tepat.

Dampak perubahan iklim akan mempengaruhi sistem sosial dan ekologi dengan cara yang kompleks dan luas seperti teknologi, ekonomi, perubahan sosial dan ekologi terjadi lintas wilayah, kelompok dan sektor. Sektor Pertanian, Sumber Daya Air, Kesehatan, dan Sektor Kelautan dan Pesisir adalah empat sektor yang sensitif terhadap dampak perubahan iklim. Sektor Pertanian pada potensi penurunan produksi tanaman pangan padi; Sektor Air pada potensi peningkatan kejadian kekeringan dan penurunan ketersediaan air; Sektor Kesehatan pada peningkatan indikatif kejadian luar biasa penyakit DBD, malaria, dan pneumonia dan Sektor Kelautan dan Pesisir pada potensi bahaya oleh peningkatan tinggi gelombang yang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran dan peningkatan tinggi muka laut yang mengakibatkan penggenangan atau banjir di wilayah pesisir.

Bappenas (2021) mengkategorikan lokasi terdampak perubahan iklim yang memerlukan intervensi aksi ketahanan iklim ke dalam 3 tingkatan prioritas yaitu **super prioritas**, **top prioritas** dan

prioritas berdasarkan tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko bencana yang berpotensi terjadi. Kriteria lokasi prioritas ketahanan iklim pada empat sektor prioritas ditentukan berdasarkan tujuh komponen, yaitu (i) Proyeksi Iklim, (ii) Potensi Bahaya, (iii) SIDIK, (iv) IRBI, (v) Potensi Kerugian Ekonomi, (vi) usulan K/L, dan (vii) Validasi Lapangan. Pada sektor kesehatan yang masuk dalam prioritas adalah penyakit demam berdarah dengue (DBD), sementara sektor pertanian dan subsektor pesisir serta penyakit malaria dan penemonia tidak masuk dalam prioritas intervensi aksi ketahanan iklim.

2.1.1.12. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem perairan lainnya serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman spesies, genetik (varietas/ras) dan ekosistem. Setiap ekosistem mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang berbeda karena setiap ekosistem merupakan habitat dari suatu komonitas. Dengan kata lain, keragaman sepsies sangat dipengaruhi oleh tipe ekosistem.

Pengenalan akan keragaman hayati menjadikan modal untuk memahami sumber daya potensial bagi pembangunan berkelanjutan. Karakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu wilayah pun dapat tergambar dari keragaman hayati tersebut. Species hidup dan berevolusi dalam habitat alam yang kompleks di dalam suatu sistem dimana keanekaragaman ekosistem membentuk aneka species ikutan. Bila terjadi kerusakan pada species tertentu secara langsung berpengaruh pada eksistem pada umumnya termasuk manusia baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu inventarisasi keragaman hayati yang ada di daerah Kabupaten TTS merupakan sesuatu yang urgen dari waktu ke waktu. Beberapa sumber referensi dapat mengenalkan species tumbuhan-tumbuhan dan hewan di Kabupaten TTS. Keanearagaman hayati di Kabupaten TTS juga ada yang terkonsentrasi di Kawasan konservasi seperti di Taman Wisata Alam. Tabel berikut menggambarkan potensi flora dan fauna di TWA yang ada di wilayah Kabupaten TTS.

Tabel 20: Jenis Flora yang terdapat di Dalam Kawasan Konservasi di Kabupaten TTS

No	Nama Kawasan	Potensi Flora dan Fauna
1.	Taman Wisata Alam Mutis Timau Keputusan Menteri Kehutanan yang menunjuk/menetapkan kembali kawasan hutan di wilayah Provinsi NTT dengan Nomor: SK.3911/MENHUT VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi NTT seluas ± 1.784.751 ha termasuk didalamnya luas Cagar Alam Mutis Timau mengalami perubahan dari 12.869,115 hektar menjadi 12.315,61 hektar yang berada di wilayah Kabupaten TTS seluas 9.888,78 Ha (80,29 %)	Keanekaragaman Flora: Sesuai dengan kondisi ekosistem, jenis flora yang terdapat di Cagar Alam Gunung Mutis didominasi oleh jenis Ampupu/Hue (<i>Eucalyptus alba</i>), disamping itu flora lain yang terdapat di Cagar Alam Gunung Mutis seperti : Bijama (<i>Elacocarpus petiolata</i>), Haubesi (<i>Olea paniculata</i>), Kakau/Cemara Gunung (<i>Casuarina equisetifolia</i>), Manuk Moto (<i>Decaspermum fruticosuni</i>), Oben (<i>Eugenia littorale</i>), Salalu (<i>Podocarpus rumphii</i>), Natwon (<i>Decaspermum glaucescens</i>), Natbona (<i>Pittospermum timorensis</i>), Kunbone (<i>Asophylla glaucescens</i>), Tune (<i>Podocarpus</i>

No	Nama Kawasan	Potensi Flora dan Fauna
	<p>dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) seluas 2.426,83 Ha (19,71 %).</p>	<p><i>imbricata</i>), Natom (<i>Daphniphyllum glaucesceus</i>), Kunkai-kote (<i>Veecinium ef. varingifolium</i>), Tastasi (<i>Vitex negundo</i>), Manmana (<i>Croton caudatus</i>), Mismoto (<i>Maesa latifolia</i>), Kismoto (<i>Toddalia asiatica</i>), Pipsau (<i>Harissonia perforata</i>), Matoi (<i>Omalanthus popuhlneu</i>) dan aneka jenis paku pakuan serta rumput-rumputan.</p> <p>Keanekaragaman Fauna: Potensi fauna yang terdapat di Cagar Alam Gunung Mutis secara umum merupakan fauna daratan seperti Mamalia, Reptilia, dan Aves, beberapa jenis fauna tersebut antara lain: Rusa Timor (<i>Cervus timorensis</i>), Kuskus (<i>Phalanges orientalis</i>), babi hutan (<i>Sus vitatus</i>), Biawak Timor (<i>Varanus salvator</i>), Ular Sanca Timor (<i>Phyton timorensis</i>), Ayam Hutan (<i>Gallus galus</i>), Punai timor (<i>Treron psittacea</i>), Betet Timor (<i>Aprornictus Jonguilaccus</i>), Pergam Timor (<i>Ducula cineracea</i>), dan Perkici Dada Kuning (<i>Tricho-gioses haematodus</i>)</p>
2.	<p>Taman Wisata Bu'at Stasiun Penelitian Bu'at terletak pada wilayah administrasi pemerintahan Desa Noinbila Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS. Terletak pada garis lintang 124°14'59,203"-124°15'25,057" LS dan garis bujur 9°49'29,228"- 9°49'55,160" BT. Batas-batas wilayah adalah sebelah timur dengan kawasan hutan, sebelah selatan dengan Taman Wisata Bu'at, sebelah utara dengan Desa Oenutnanan dan sebelah barat dengan kawasan padang savanna dan kawasan hutan.</p>	<p>Keanekaragaman Flora: Stasiun Penelitian Bu'at terletak pada kelompok Hutan Lindung Mutis Timau (RTK 183). Vegetasi penutup yang dominan di lokasi stasiun adalah Kabesak (<i>Acacia leucophloea</i>), Cemara (<i>Casuarina junghuhniana</i>), Mahoni (<i>Sweitenia macrophylla</i>), Bungur (<i>Lagerstomeia speciosa</i>) dan <i>Capresus spp.</i></p> <p>Keanekaragaman Fauna: Di tempat ini kamu juga bisa menjumpai beragam satwa seperti burung, monyet dan berbagai macam satwa lainnya. Tempat ini dilengkapi dengan villa, kolam renang dan permainan anak. Letak taman ini sekitar 4 km dari Kota SoE. Taman Wisata Bu'at Ini, menurut rencananya akan dibuat penangkaran satwa mini oleh Pemerintah Daerah TTS, yang mana hewan yang akan di koleksi adalah jenis monyet atau kera, burung dan juga buaya</p>
3.	<p>Suaka Marga Satwa Ale Aisio Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6424/Menhut VII/KUH/2014 tanggal 22 (RTK.190) Seluas 5.432,08 Hektar di Kabupaten TTS, Provinsi NTT, dengan terbitnya keputusan penetapan tersebut, maka kemajuan pengukuhan kawasan hutan SM Ale Aisio telah selesai. Secara astronomis terletak pada 10°4'1.84"LS - 10°8'22,75"LS dan 124°15'37,28"BT dan 124°23'0,40" BT.</p>	<p>Potensi Flora: Beberapa jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan ini di antaranya adalah Asam (<i>Tamarindus indica</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Kayu merah/Angsana (<i>Pterocarpus indicus</i>), Kesambi (<i>Schleichera oleosa</i>), Lontar (<i>Borassus flabellifer</i>), Beringin (<i>Ficus sp</i>), Jambu hutan (<i>Eugenia sp</i>), Ampupu (<i>Eucalyptus urophylla</i>), Kabesak (<i>Vachellia nilotica</i>) dan Pilang (<i>Vachellia leucophloea</i>).</p> <p>Potensi Fauna: Jenis-jenis satwa yang ditemukan di kawasan ini adalah Rusa timor (<i>Rusa timorensis</i>), Babi hutan (<i>Sus vitatus</i>), Kuskus (<i>Phalanger sp</i>), Biawak timor (<i>Varanus timorensis</i>), Ular sanca timor</p>

No	Nama Kawasan	Potensi Flora dan Fauna
		<p>(<i>Phyton timoriensis</i>), Ayam hutan (<i>Gallus gallus</i>), Perkici dada kuning (<i>Trichoglossus haematodus</i>), dan Kakatua putih kecil jambul kuning (<i>Cacatua sulphurea</i>). Beberapa jenis satwa tersebut khususnya Rusa timor merupakan salah satu pertimbangan dalam penunjukan kawasan ini sebagai salah satu Suaka Margasatwa di Provinsi NTT.</p>
4.	<p>Kawasan Taman Buru Dataran Bena Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :05/Kpts/Um/1/1978, tanggal 20 Januari 1978, wilayah yang dialokasikan sebagai Taman Buru Dataran Bena adalah 11.000 ha. secara geografis terletak pada posisi 124°57'5,692"BT 125°0'38,904"BT dan 9°30'40,819"LS-9°35'47,391"LS</p>	<p>Potensi Flora: Taman Buru Dataran Bena merupakan perwakilan ekosistem hutan pantai hutan, pada hutan pantai disominasi oleh cemara laut (<i>Casuarina equisetifolia</i>) pada sisi selatan kawasan yang berbatasan dengan Laut Timor dan hutan bakau yang terdapat di sekitar muara Sungai Noelmina dan sekitar Danau Kubai, jenis vegetasi yang mendominasi pada ekosistem hutan bakau adalah jenis api- api (<i>Avicennia sp</i>). Sedang pada hutan musim dan savana didominasi oleh jenis kabesak hitam (<i>Acacia neulotica</i>) jenis ini dapat dikategorikan sebagai jenis invasif asing yang tumbuh hampir menguasai seluruh kawasan TB Dataran Bena, pada bagian timur kawasan juga dijumpai tumbuhan lontar (<i>Borassus flabelifer</i>). Berdasarkan hasil inventarisasi potensi ekologi, pada Taman Buru Bena jenis vegetasi yang umum dijumpai adalah Asam (<i>Tamarindus indica</i>), Kayu Putih Laut (nama lokal), Beringin Laut (<i>Ficus sp</i>), Gwang (<i>Coripha gebanga</i>), Kolang Susu (<i>Calotropis gigantean</i>) Kesambi (<i>Scheichera oleosa</i>), bidara (<i>Ziziphus timoerensis</i>), <i>Vitex pibescen</i>, <i>Alstonia scholaris</i>, Oni knamak (nama lokal), Kayu Ular (nama lokal), Hau Hue (nama lokal), Fau (nama lokal). Hasil inventarisasi ekologi tahun 2017, vegetasi yang memiliki kerapatan jenis dan kerapatan tertinggi adalah kabesak hitam (<i>Acacia neulotica</i>) mencapai 3,575 individu/ha dan jenis yang dijumpai dengan tingkatan permudaan yang lengkap (semai, pancang, tiang) adalah kabesak hitam dan beringin laut, jenis dengan indeks nilai penting tertinggi di Taman Buru Bena adalah Kabesak Hitam (<i>Acacia neulotica</i>) nilai INP sebesar 51,59% sedangkan jenis lainnya tergolong indeks nilai penting rendah.</p> <p>Potensi Fauna: Jenis fauna yang umum ditemukan di Taman Buru Dataran Bena adalah jenis aves, reptil dan mamalia. Beberapa jenis satwa liar yang dilindungi yang ditemukan pada kawasan Taman Buru Bena saat ini antara lain buayamuara (<i>Crocodylus porosus</i>), penyu lekang (<i>Lepidochelys olivacea</i>) pecuk ular asia (<i>Anhingia melanogaster</i>), kuntul besar (<i>Egretta</i></p>

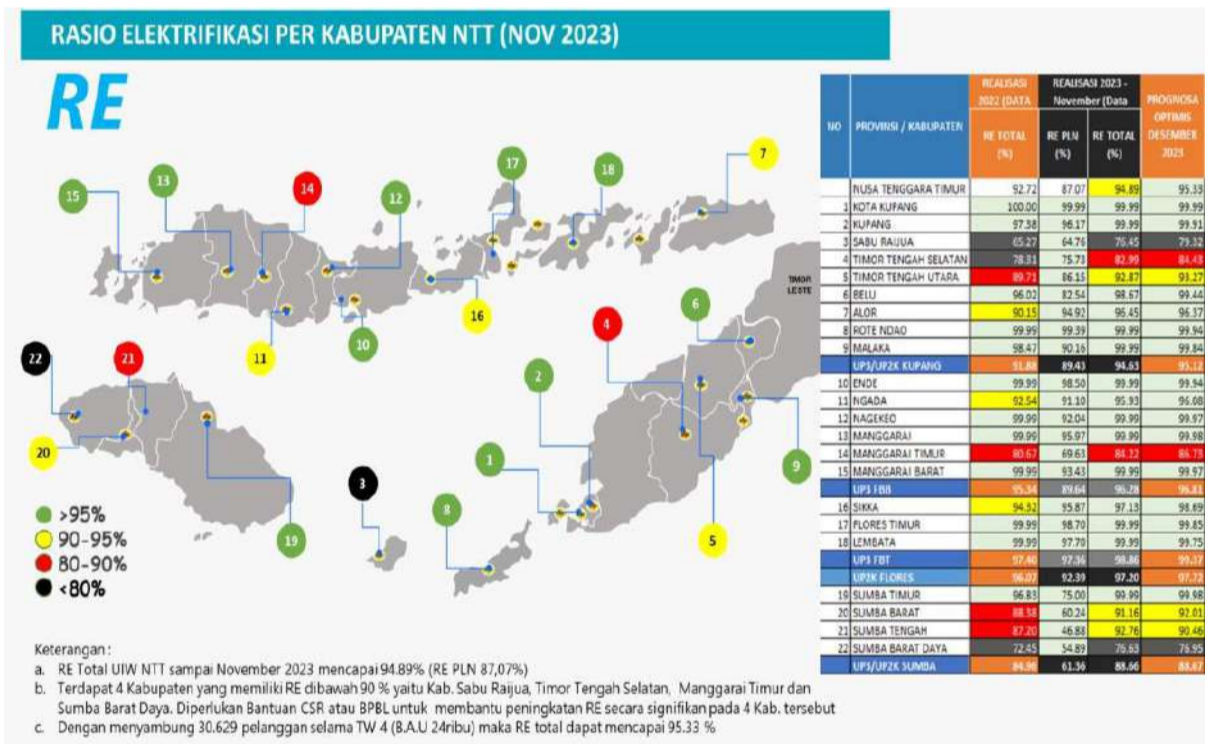
No	Nama Kawasan	Potensi Flora dan Fauna
		<i>alba</i>), pelikan (<i>Pelicanus sp</i>) serta beberapa jenis aves lainnya

Sumber: KLHS RPJPD Kab. TTS Tahun 2025-2045

2.1.1.13. Ketahanan Energi

Peranan energi sangat penting dalam pembangunan. Salah satu bentuk energi yang lebih dominan digunakan adalah energi listrik. Kebutuhan energi listrik di wilayah Kabupaten TTS sebagian besar disediakan oleh PT PLN (Persero). Rasio elektrifikasi Kabupaten TTS termasuk pada kategori rendah. Berdasarkan data sampai dengan tahun 2023, rasio elektrifikasi total Kabupaten TTS adalah 82,99% (rasio elektrifikasi PLN sebesar 75,73% dan rasio elektrifikasi non PLN sebesar 7,26%). Di wilayah Kabupaten TTS masih terdapat 6 wilayah desa yang belum terakses jaringan PLN yaitu: Dusun Punuf di Desa Fatumnasi, Dusun Maun'ana di Desa Taneotob, Dusun Ne'ut di Desa Kuannoel, Desa Nenas, Desa Mutis dan Desa Nuapin. Wilayah yang belum terakses jaringan PLN ini merupakan daerah enklave yang dibatasi oleh kawasan hutan konservasi sehingga untuk pemenuhan akses listrik melalui PLN belum dapat dipenuhi.

Gambar 27: Rasio Elektrifikasi Kabupaten TTS Sampai Dengan



Sumber: Dinas ESDM Provinsi NTT, 2023

Selain PLN, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir kebutuhan listrik di wilayah Kabupaten TTS juga terlayani melalui jaringan non PLN yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) baik disel maupun bayu dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik tersebar maupun terpusat. Data pembangkit listrik non PLN yang ada di wilayah Kabupaten TTS dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 21: Jumlah Pembangkit Listrik Non PLN di Kabupaten TTS

No	Jenis Pembangkit Listrik	Jumlah (Unit/SR)	Kapasitas per Unit	Lokasi
1	PLTS (SHS)	6.521 Unit	10 Wp - 80 Wp	86 Desa
2	PLTS (Sehen)	40 SR		Desa Mnelaanen

No	Jenis Pembangkit Listrik	Jumlah (Unit/SR)	Kapasitas per Unit	Lokasi
3	PLTS Terpusat	775 SR		Desa Nano, Lelobatan, Noemuke, Kualeu, Oelnunuh, Mnesatbubuk, Babuin, Hoineno, Lotas dan Noenoni
4	PLTH Diesel	100 SR		Desa Santian
5	PLTH Bayu	50 SR		Desa Putun
6	PLTMH	496 SR	5 KWP - 30 KWP	Desa Nenas, Op dan Nuapin

Sumber: BAPPEDA Kabupaten TTS

Sumber energi lainnya yang memiliki potensi pengembangan di wilayah Kabupaten TTS adalah:

- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
Potensi energi angin/bayu dengan kecepatan angin rata-rata antara 3.5 - 8 m/s, terdapat di: Bu'at di Desa Noinbila, Bolapalelo di Desa Oelbubuk, Fatukolen di Desa Tunua, Niki-Niki, Putun dan Babuin. Khusus untuk Bolapalelo pada tahun 2018 pernah direncanakan untuk pengembangan PLTB dengan kapasitas produksi total 36 MW.
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
Potensi air untuk pembangkit listrik ada di Bendungan Temef yang memiliki potensi menghasilkan 10 MW energi listrik.
- Pengembangan *wood chip* dari tanaman Lamtoro sebagai bahan bakar biomassa dengan tingkat efisiensi pembakaran yang tinggi, ketersediaan bahan baku yang cukup dan dampak lingkungan yang rendah. Pengembangan *wood chip* telah dilakukan di Desa Oetuke, Panite dan Hoibeti.

2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten TTS selama tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten TTS sebanyak 468.350 jiwa dan tahun 2023 sebanyak 474.521 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,23% dan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 117/Km selama 5 tahun terakhir. Data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten TTS tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 28: Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2019-2023



Sumber: TTS Dalam Angka 2020- 2024 (diolah)

Gambar 29: Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2019 – 2023



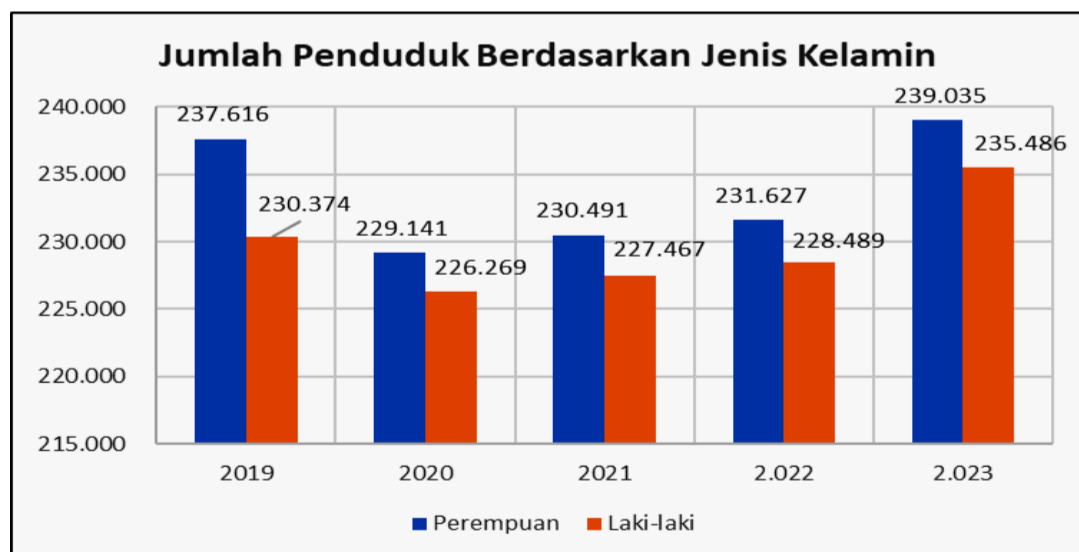
Sumber: TTS Dalam Angka 2020- 2024 (diolah)

Berdasarkan data, terjadi penurunan jumlah penduduk yang cukup drastis pada tahun 2019 ke tahun 2020 hal ini disebabkan terjadi perubahan sistem perhitungan penduduk di BPS. Jumlah penduduk tahun 2019 masih menggunakan proyeksi penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, sedangkan tahun 2020 dan seterusnya menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk tahun 2020.

2.1.2.2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk Kabupaten TTS digambarkan melalui perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin selama 5 tahun terakhir dan jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun terakhir, yang dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 30: Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten TTS Tahun 2019 - 2023

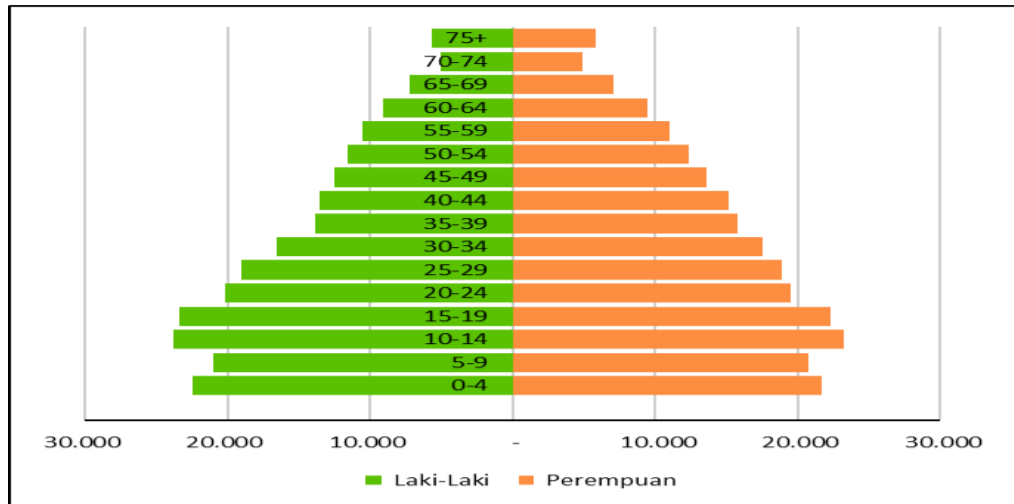


Sumber: TTS Dalam Angka 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan data tersebut di atas, penduduk Kabupaten TTS didominasi oleh penduduk perempuan dengan kondisi pada tahun 2023 terdiri dari 50,37% perempuan dan 49,63% laki-laki, dengan rasio jenis kelamin sebesar 98.

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten TTS pada tahun 2023 didominasi oleh penduduk kelompok umur 10-14 tahun dan diikuti kelompok umur 15-19 tahun dan yang paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun.

Gambar 31: Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten TTS Tahun 2023



Sumber: TTS Dalam Angka 2024 (diolah)

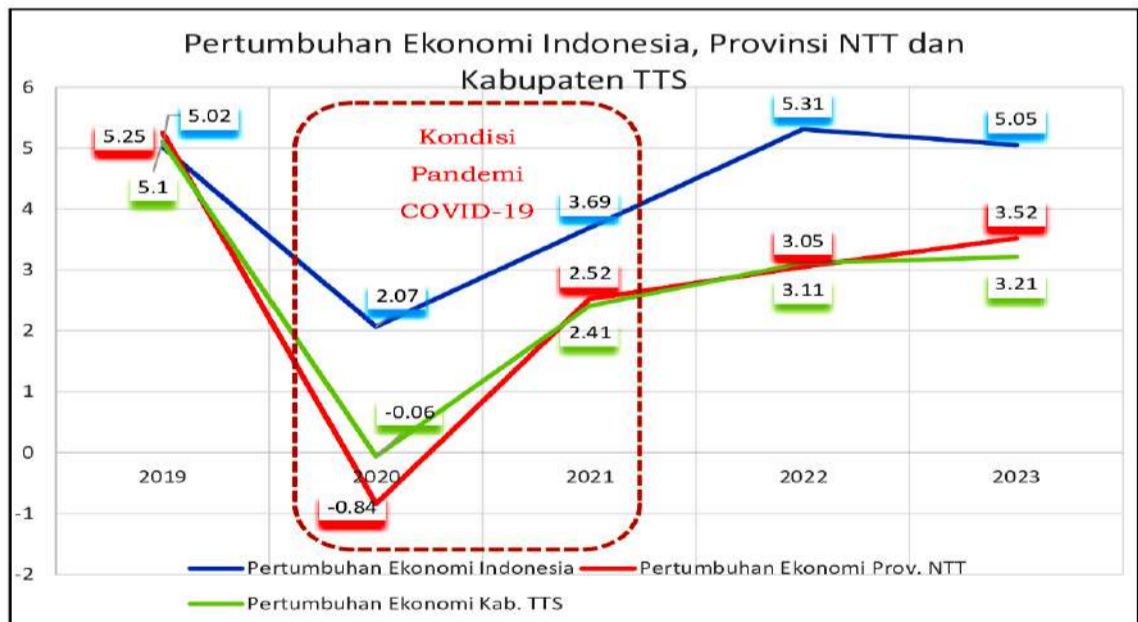
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTS tumbuh positif pada kisaran angka 5%, meskipun pada tahun 2020 mengalami kontraksi -0,06% akibat dampak pandemi Covid-19. Tahun 2021-2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTS kembali tumbuh positif dan terus mengalami peningkatan pada kisaran 3% walaupun belum mencapai angka pertumbuhan seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh sebesar 5%. Pertumbuhan ekonomi positif yang terjadi di Kabupaten TTS relevan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT. Rincian pertumbuhan ekonomi Kabupaten TTS dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Indonesia dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 32: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2023



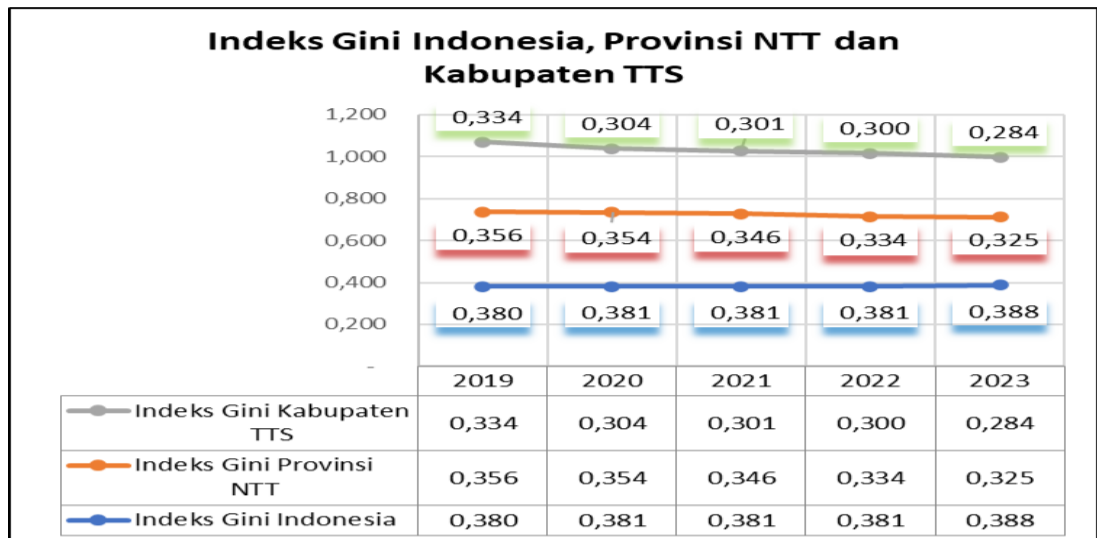
Sumber: BPS (diolah)

2.2.1.2. Indeks Gini

Indeks gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Selama rentang 5 tahun terakhir, nilai indeks gini Kabupaten TTS cenderung menurun. Pada tahun 2019-2022 kondisi ketimpangan pengeluaran Kabupaten TTS

berada dalam kategori ketimpangan taraf sedang/moderat (nilai indeks gini antara 0,3-0,5), sedangkan pada tahun 2023, nilai indeks gini adalah 0,284 berada dalam kategori ketimpangan taraf rendah (nilai indeks gini < 0,3).

Gambar 33: Indeks Gini Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2023

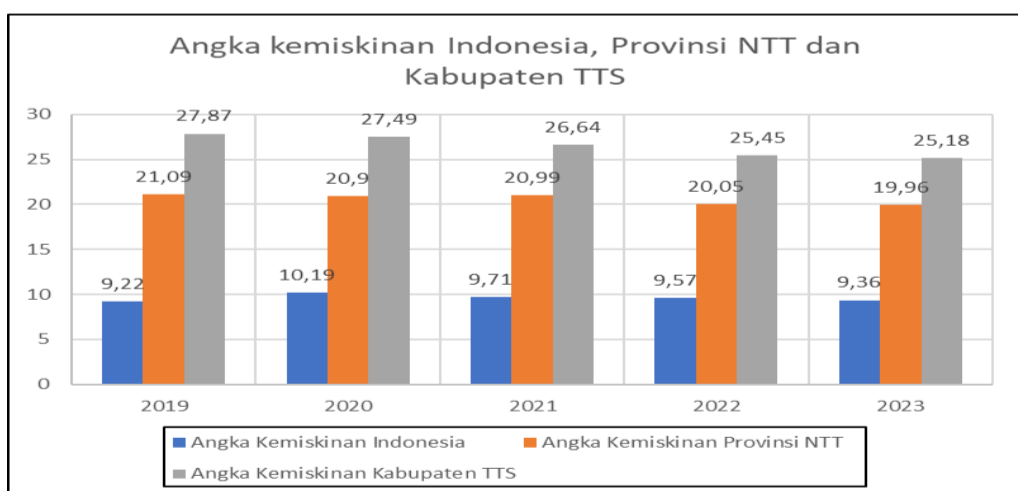


Sumber: BPS (diolah)

2.2.1.3. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten TTS tahun 2019-2023 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 1,99% dari tahun dasar 2019 sebesar 27,87% menjadi 25,18% di tahun 2023. Angka kemiskinan Kabupaten TTS menduduki posisi ke 8 tertinggi di Provinsi NTT, tetapi dari sisi jumlah penduduk miskinnya Kabupaten TTS memiliki jumlah miskin tertinggi di Provinsi NTT. **Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, kondisi angka kemiskinan Kabupaten TTS berada di atas provinsi dan nasional.** Rincian penurunan persentase kemiskinan Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia selengkapnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 34: Angka Kemiskinan Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 - 2023



Sumber: BPS (diolah)

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk dengan batasan pendapatan kurang dari US \$ 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). Pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten TTS sebesar 17,14% (80.430 jiwa), menurun menjadi 6,56% (30.960 jiwa) di tahun 2021, meningkat kembali di tahun 2022 sebesar 13,01% (61.570 jiwa)

dan menurun signifikan pada tahun 2023 menjadi 6,40% (30.380 jiwa). Data kemiskinan ekstrem di Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 35: Kemiskinan Ekstrem Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020 - 2022

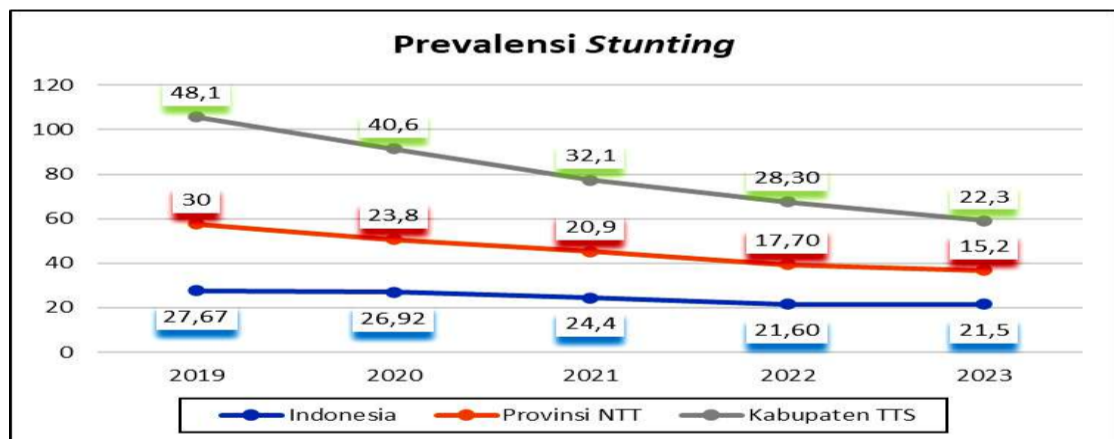


Sumber: BPS dan Satgas P3KE (diolah)

2.2.1.4. Prevalensi Stunting

Prevalensi *stunting* merupakan jumlah keseluruhan permasalahan *stunting* yang terjadi pada waktu tertentu di sebuah daerah. Persentase balita *stunting* di Kabupaten TTS tahun 2019-2023 mengalami penurunan, dengan rata-rata penurunan selama 5 tahun terakhir sebesar 6,5%. Pada tahun 2019 sebesar 48,10% menurun menjadi 22,30% pada tahun 2023. Prevalensi *stunting* di Kabupaten TTS masih lebih tinggi dibanding provinsi dan nasional.

Gambar 36: Prevalensi Stunting Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 - 2023



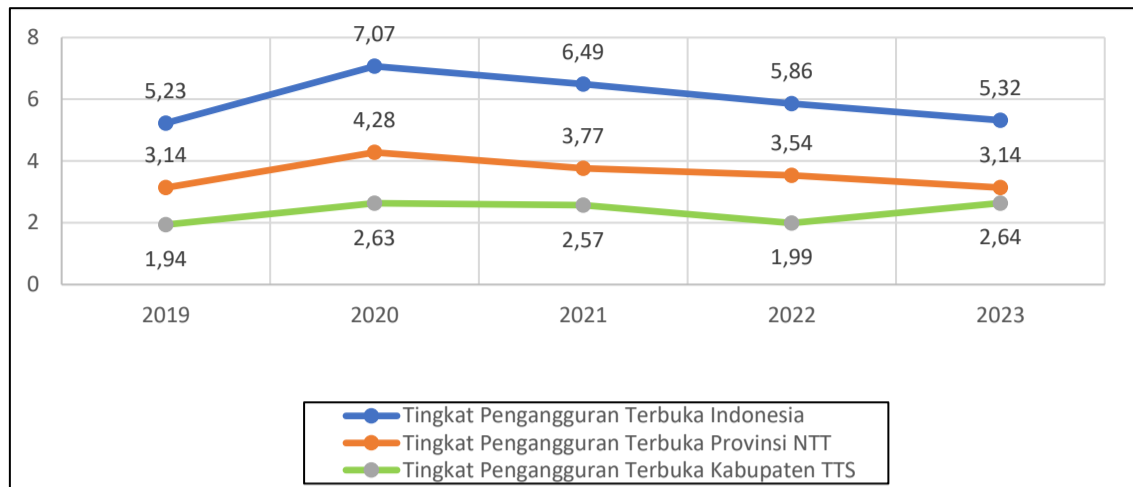
Sumber: BPS (diolah)

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten TTS dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan. Secara kumulatif, TPT Kabupaten TTS dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan rata-rata per tahun 0,18. Kecenderungan peningkatan TPT menunjukkan bahwa semakin meningkat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir peningkatan TPT dimulai sejak tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19. **Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, angka TPT Kabupaten TTS masih berada di bawah provinsi dan nasional.** Rincian angka TPT Kabupaten TTS,

Provinsi NTT dan Indonesia selengkapnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 37: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2023

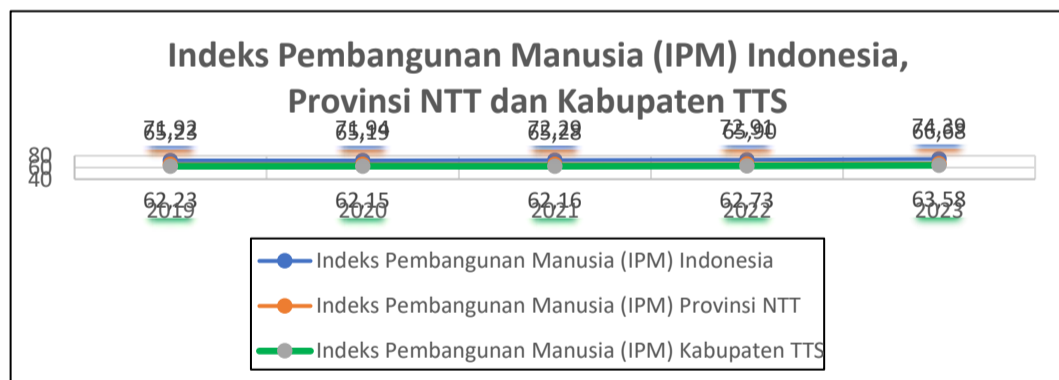


Sumber: BPS (diolah)

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten TTS mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Nilai IPM Kabupaten TTS meningkat sebesar 1,35 Poin atau 62,23,21 pada tahun 2019 menjadi 63,58 di tahun 2023. Peningkatan nilai IPM Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir tidak signifikan dan masih berada di bawah provinsi (1,45 poin) dan nasional (3 poin) untuk periode yang sama. Data pertumbuhan IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 38: Nilai IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 – 2023

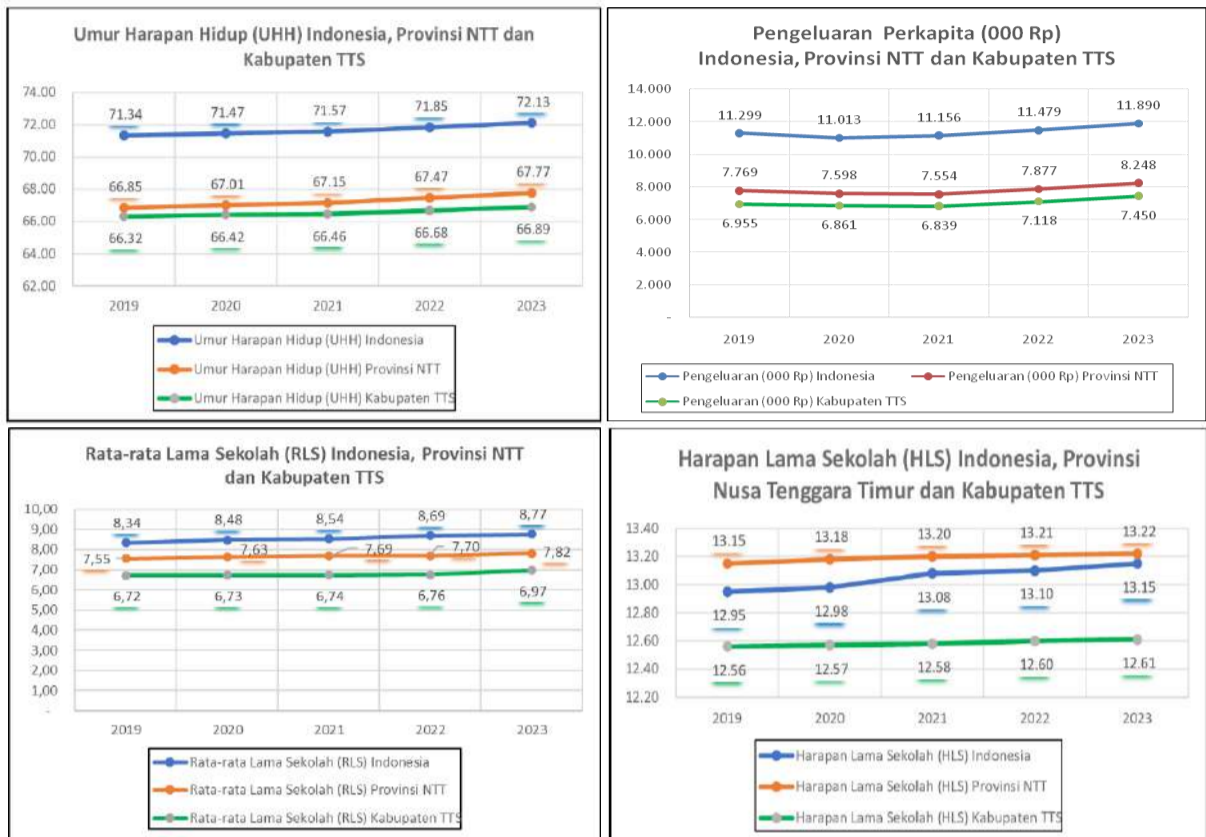


Sumber: BPS (diolah)

Komponen pembentuk IPM terdiri dari: Usia Harapan Hidup (UHH), pengeluaran perkapita, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Secara kumulatif selama 5 tahun terakhir, UHH Kabupaten TTS bertumbuh senilai 0,57 tahun sejak 2019 hingga 2023 masih berada di bawah capaian provinsi (0,92 tahun) dan nasional (0,79 tahun) untuk periode yang sama. Perkembangan pengeluaran perkapita Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar Rp.495.000,-/orang/tahun dari tahun 2019 hingga 2023, berada di atas capaian provinsi (Rp.479.000,-) tetapi masih di bawah capaian nasional (Rp.591.000,-) untuk periode yang sama. Perkembangan RLS juga mengalami pertumbuhan kumulatif senilai 0,25 tahun berada di bawah capaian provinsi (0,27 tahun) dan nasional (0,43 tahun) untuk periode yang sama. Demikian juga HLS mengalami pertumbuhan kumulatif senilai 0,05 berada di bawah capaian kumulatif

provinsi (0,07 tahun) dan nasional (0,2 tahun) untuk periode yang sama. Perkembangan indikator pembentuk IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia dapat di lihat pada gambar berikut ini.

Gambar 39: Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019 - 2023



Sumber: BPS (diolah)

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator yang digunakan untuk memperoleh nilai IKS disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 40: Perkembangan Indikator Pembentuk IKS Kabupaten TTS Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
 Angka Kesakitan	17,45	14,65	21,92	19,44
 Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan)	10,5	10,69	10,1	11,05
 Persentase Perempuan yang Melahirkan di Fasilitas Kesehatan	73,2	74,24	82,58	79,41
 Persentase Perempuan Menurut Status Penggunaan Alat/Cara KB				
* Pernah Menggunakan	19,16	15,02	24,6	24,8
* Sedang Menggunakan	37,9	41,96	39,8	39,6
* Tidak Pernah Menggunakan	42,94	43,02	35,6	35,6

Sumber: Statistik Kesejahteraan TTS 2020-2023 (diolah)

Berdasarkan data selama 4 tahun terakhir angka kesakitan di Kabupaten TTS berfluktuasi. Sedangkan untuk indikator rata-rata lama pemberian ASI, cenderung meningkat dengan durasi pemberian ASI di tahun 2023 sampai dengan 11 bulan. Untuk indikator persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan menunjukkan

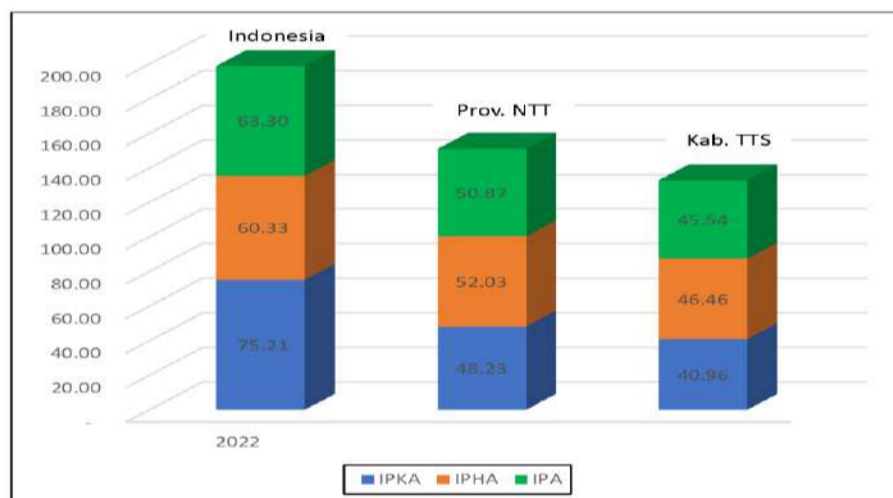
kecenderungan peningkatan. Sedangkan untuk penggunaan alat kontrasepsi, PUS yang tidak menggunakan alat/cara KB menunjukkan kecenderungan penurunan sedangkan untuk PUS yang sedang menggunakan alat/cara KB cenderung mengalami peningkatan.

2.2.2.2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Sejalan dengan visi Indonesia Emas pada tahun 2045, sebagai perwujudan SDM yang berkualitas emas tentunya tidak terlepas dari berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada anak. Upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak menjadi mutlak untuk dilakukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Nilai IPA menunjukkan tingkat capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Sesuai data, nilai IPA Kabupaten TTS sebesar 45,54 poin. Nilai IPHA menunjukkan tingkat realisasi pemenuhan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Nilai IPHA Kabupaten TTS sebesar 46,46 poin. Sedangkan nilai IPKA menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak dan anak terlantar. Nilai IPKA Kabupaten TTS sebesar 40,96. Nilai IPA, IPHA dan IPKA Kabupaten TTS tahun 2022 masih jauh berada di bawah nilai provinsi maupun Indonesia.

Gambar 41: Nilai IPA, IPHA dan IPKA Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022



Sumber: KemenPPA RI (diolah)

2.2.2.3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan gender merupakan hak yang sudah semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan. Salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender adalah melalui nilai IPG. Nilai IPG diperoleh melalui perbandingan antara IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Capaian IPG Kabupaten TTS mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Nilai IPG Kabupaten TTS tahun 2019 sebesar 94,87 poin dan mengalami kenaikan secara bertahap mencapai 95,56 poin pada tahun 2023. Capaian nilai IPG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir berada di atas capaian IPG Provinsi NTT dan Indonesia. Peningkatan nilai IPG Kabupaten TTS mengindikasikan kondisi pembangunan gender yang semakin baik dan mengindikasikan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

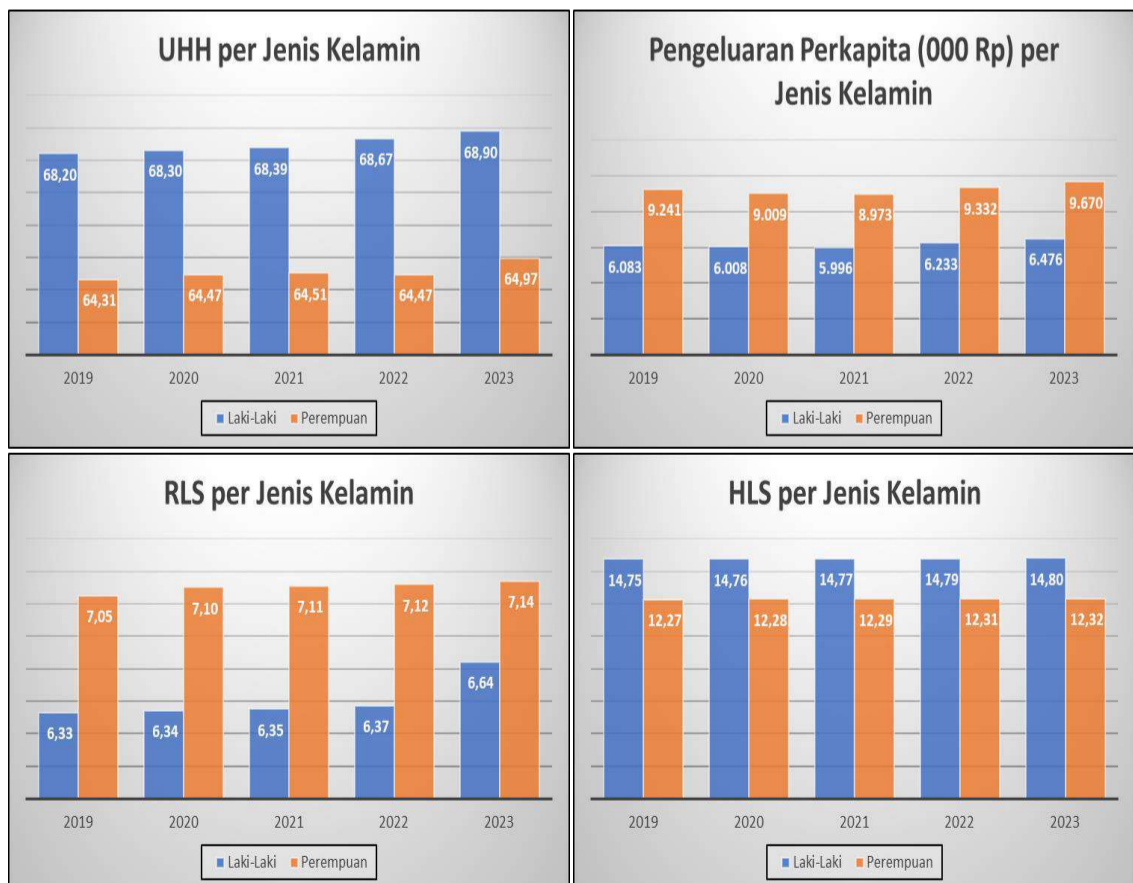
Gambar 42: Nilai IPG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BPS (diolah)

Selain angka indeksnya, komponen pembentuk IPG dalam kurun waktu 2019-2023, baik komponen kesehatan, pendidikan dan ekonomi terus mengalami peningkatan secara bertahap. Penurunan terjadi pada aspek ekonomi pada kurun 2020-2021 akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan lemahnya ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat.

Gambar 43: Perkembangan Indikator Pembentuk IPG Kabupaten TTS Tahun 2019 - 2023

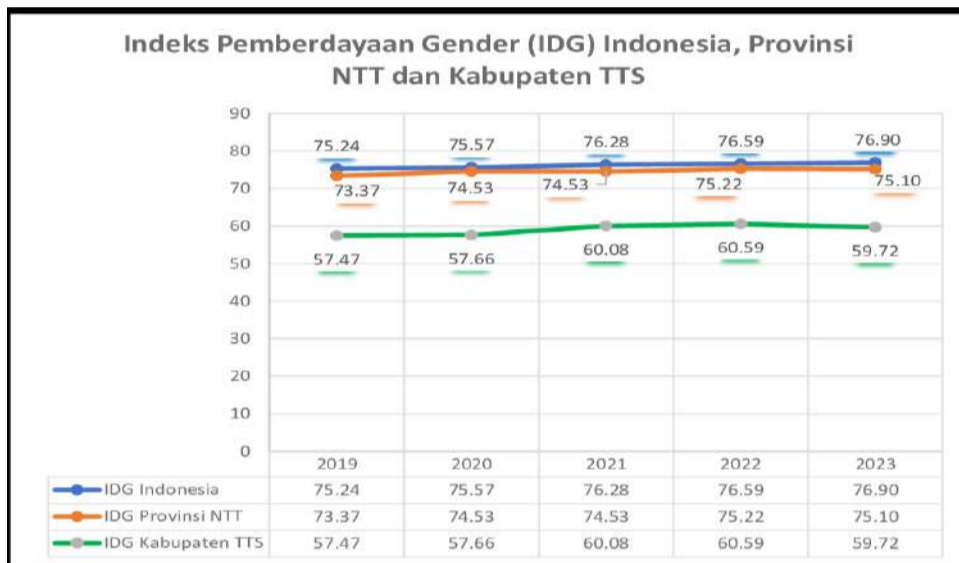


Sumber: BPS (diolah)

2.2.2.4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Selain IPG, indikator lain yang juga terkait dengan gender yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Nilai IDG Kabupaten TTS selama kurun waktu 2019-2023 cenderung meningkat dengan nilai peningkatan sebesar 2,25 poin. Nilai IDG Kabupaten TTS pada tahun 2019, 2020 dan 2023 termasuk dalam kategori sedang (skor 50-60), sedangkan di tahun 2021 dan 2022 termasuk dalam kategori tinggi (skor 60-80). Nilai IDG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir masih di bawah provinsi dan nasional.

Gambar 44: Nilai IDG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BPS (diolah)

Nilai IDG terbentuk dari 3 komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional dan komponen sumbangan pendapatan perempuan. Data komponen IDG Kabupaten TTS selama 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada 2 komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional sedangkan komponen sumbangan pendapatan perempuan cenderung menurun (diukur menggunakan perbandingan upah buruh laki-laki dan perempuan pada sektor non pertanian).

Gambar 45: Perkembangan Komponen IDG Kabupaten TTS Tahun 2019-2022

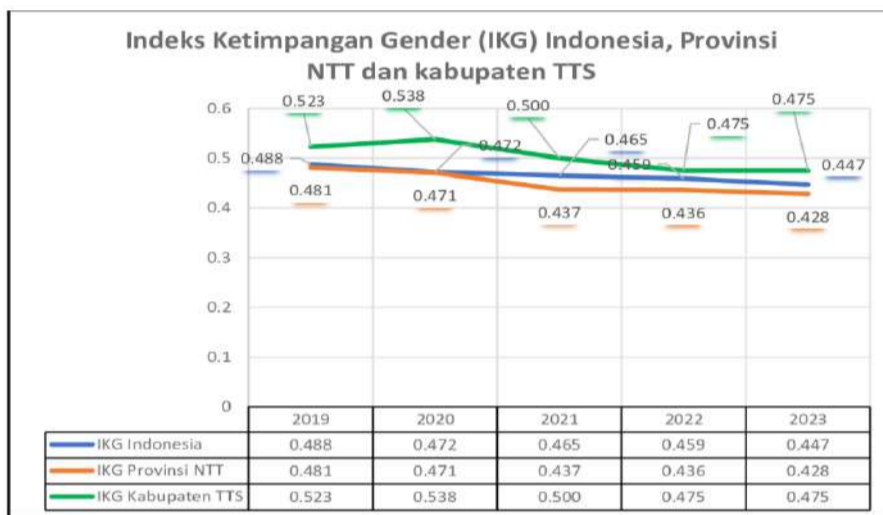


Sumber: BPS (diolah)

2.2.2.5. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nilai IKG mencerminkan kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam 3 dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan nilai rata-rata per tahun sebesar 0,012 poin sehingga total mencapai 0,048 poin, walaupun pada tahun 2022 dan 2023 tidak terjadi kenaikan atau mengalami stagnansi nilai IKG di poin 0,475. Sesuai kategori kelas nilai IKG oleh BPS maka IKG Kabupaten TTS tahun 2022-2023 berada pada kategori menengah atas (rentang 0,450-0,499), walaupun demikian kecenderungan penurunan nilai IKG Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau semakin baik.

Gambar 46: Nilai IKG Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BPS (diolah)

2.2.2.6. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di suatu wilayah. Terdapat 5 aspek penilaian IPP yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi. Perkembangan beberapa indikator pembentuk IPP di Kabupaten TTS dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 22: Perkembangan Indikator IPP Kabupaten TTS Tahun 2019-2022

Uraian	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Persentase organisasi pemuda yang aktif dan terbina	4	4	4	7
Persentase wirausaha muda	2	2	2	14
Persentase pemuda pengangguran	1,94	2,63	2,56	1,20

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTS Tahun 2022

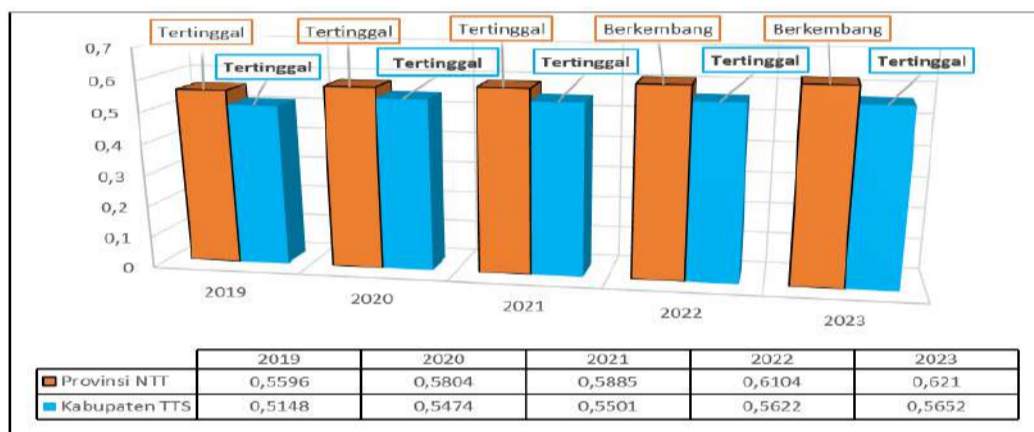
Berdasarkan data tahun 2019-2022 persentase organisasi pemuda yang aktif dan dibina serta persentase wirausaha muda mengalami stagnansi namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk pemuda pengangguran tahun 2019-2022 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan karena adanya pandemi Covid 19 yang mengharuskan

adanya pembatasan aktivitas masyarakat sehingga berpengaruh terhadap penutupan lapangan kerja, namun di tahun 2022 data menunjukkan persentase pemuda pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena aktivitas masyarakat sudah kembali normal setelah pandemi Covid 19.

2.2.2.7. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Selama 5 tahun terakhir, nilai IDM Kabupaten TTS terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 nilai IDM sebesar 0,5148 meningkat menjadi 0,5652 di tahun 2023, tetapi peningkatan nilai IDM ini belum mengubah status Kabupaten TTS sebagai Kabupaten Tertinggal. Nilai Indeks Desa Membangun di Kabupaten TTS dari tahun 2019-2023 dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 47: Nilai Indeks Desa Membangun Kabupaten TTS dan Provinsi NTT Tahun 2019-2023



Sumber: IDM.kemendes.go.id

Perkembangan status desa berdasarkan nilai IDM menunjukkan masih cukup banyak desa yang berstatus Tertinggal. Sampai dengan tahun 2023, desa dengan status Tertinggal sebanyak 160 desa (60,15%). Kecenderungan positif ditunjukkan pada desa berstatus Berkembang, selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2023, desa berstatus Desa Berkembang sebanyak 78 desa (29,32%). Perkembangan status IDM per desa di Kabupaten TTS tahun 2019-2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 23: Perkembangan Status IDM Kabupaten TTS Tahun 2019-2023s

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Desa Mandiri	0	0	0	0	0
Desa Maju	0	0	2	5	6
Desa Berkembang	2	2	37	63	78
Desa Tertinggal	199	237	198	176	160
Desa Sangat Tertinggal	65	27	29	22	22
Jumlah	266	266	266	266	266

Sumber: Dinas PMD Kabupaten TTS (diolah)

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data PDRB merupakan salah satu data statistik yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi secara makro di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Gambaran PDRB disajikan dalam 2 penilaian yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Harga Berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB Harga Konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten TTS baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kontribusi terbesar PDRB di Kabupaten TTS (di atas 40%) dan jika dilihat dari nilai kontribusinya dimana peningkatan rata-rata per tahun sebesar 0,50, sektor ini tidak terdampak pandemi Covid-19, walaupun pertumbuhan ekonomi di Kabupaten TTS pada saat pandemi Covid-19 (tahun 2020) mengalami kontraksi -0,06%. Pada saat pandemi Covid-19 terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan nilai karena pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19 yaitu sektor konstruksi, perdagangan, real estate dan jasa lainnya. Perkembangan PDRB Kabupaten TTS tahun 2019-2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 24: Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten TTS Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp. (Miliar)	%	Rp. (Miliar)	%	Rp. (Miliar)	%	Rp. (Miliar)	%	Rp. (Miliar)	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.479,17	43,93	3.504,69	44,08	3.681,32	44,63	4.019,79	45,63	4.360,36	45,92
B	Pertambangan dan penggalian	128,27	1,62	109,45	1,39	112,12	1,39	117,31	1,33	123,34	1,30
C	Industri Pengolahan	47,16	0,60	49,00	0,62	49,93	0,60	55,58	0,63	62,34	0,66
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,42	0,03	3,14	0,04	3,39	0,04	3,86	0,04	4,45	0,05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,36	0,02	1,41	0,02	1,60	0,02	1,68	0,02	1,76	0,02
F	Konstruksi	765,93	9,67	685,70	8,63	753,64	9,14	805,09	9,14	903,40	9,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	490,58	6,19	474,57	5,97	504,93	6,13	566,45	6,43	639,30	6,73
H	Transportasi dan Pergudangan	102,58	1,30	101,68	1,29	105,50	1,28	112,10	1,27	123,91	1,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,30	0,09	6,60	0,08	6,74	0,08	7,13	0,08	7,74	0,08
J	Informasi dan Komunikasi	528,45	6,67	573,65	7,22	597,96	7,25	626,68	7,12	638,07	6,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	215,57	2,72	237,76	2,99	257,84	3,13	282,58	3,21	290,94	3,06
L	Real Estat	195,61	2,47	192,30	2,44	192,27	2,33	213,08	2,42	238,19	2,51
M,N	Jasa Perusahaan	6,33	0,08	4,78	0,06	4,07	0,05	4,44	0,05	5,02	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1.255,92	15,86	1.287,21	16,21	1.251,71	15,18	1.256,76	14,26	1.305,51	13,75
P	Jasa Pendidikan	502,70	6,35	522,40	6,58	519,31	6,30	531,91	6,04	565,69	5,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	117,99	1,49	127,61	1,61	141,86	1,72	143,57	1,63	159,20	1,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya	72,28	0,91	60,81	0,77	59,06	0,72	62,36	0,71	66,97	0,71
	Produk Domestik Regional Bruto	7.919,63	100,00	7.942,76	100,00	8.243,25	100,00	8.810,39	100,00	9.496,21	100,00

Sumber: TTS Dalam Angka 2020-2024 (diolah)

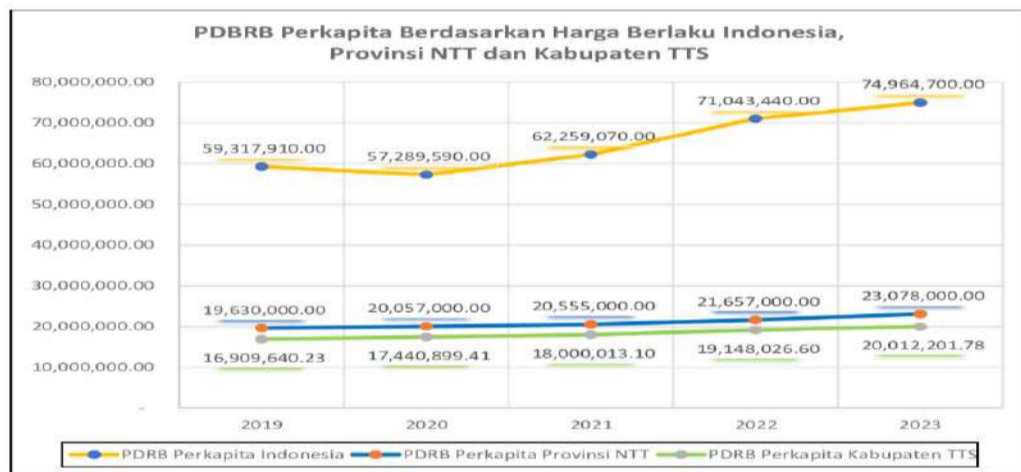
Berdasarkan data tersebut di atas, selama 5 tahun terakhir ini terdapat 8 sektor yang mengalami kecenderungan peningkatan yaitu: 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Industri Pengolahan, 3) Pengadaan Listrik dan Gas, 4) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 5) Informasi dan Komunikasi, 6) Jasa Keuangan dan Asuransi dan 7) Real Estat dan 8) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Di sisi lain, terdapat 8 sektor yang mengalami kecenderungan penurunan yaitu: 1) Pertambangan dan Penggalian, 2) Konstruksi, 3) Transportasi dan Pergudangan, 4) Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum, 5) Jasa Perusahaan, 6) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 7) Jasa Pendidikan dan 8) Jasa Lainnya. Sementara itu, terdapat 1 sektor yang mengalami stagnansi kontribusi terhadap PDRB yaitu: Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

2.3.1.2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan perbandingan antara jumlah PDRB dengan jumlah penduduk di suatu daerah. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai alat pengukur pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, karena lebih menggambarkan mengenai nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh masing-masing individu disuatu daerah. Selama 5 tahun terakhir (2019-2023), PDRB per kapita Kabupaten TTS mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, PDRB per kapita sebesar Rp. 16.909.640,23,- kemudian meningkat menjadi Rp. 20.012.201,78 pada tahun 2023, dengan rata-rata, peningkatan PDRB per kapita sebesar Rp. 775.640,39,-/tahun.

Gambar 48: PDRB Per Kapita Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023

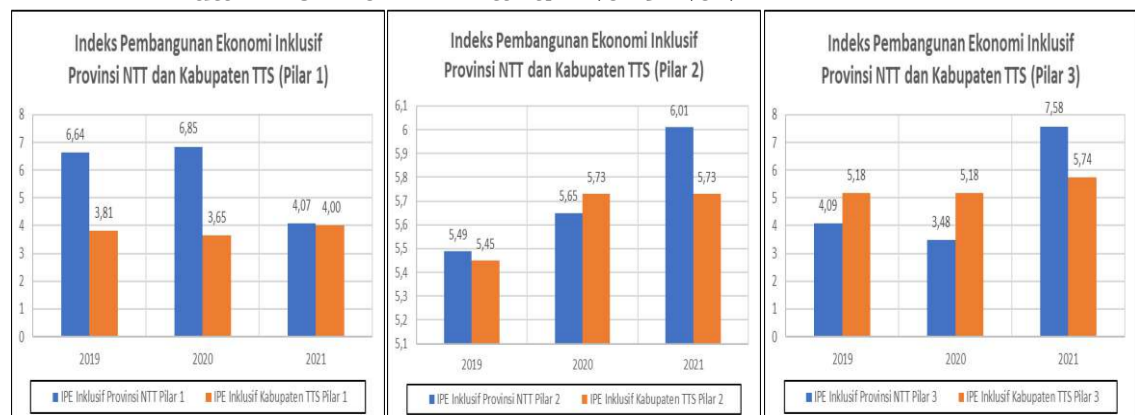


Sumber: BPS (diolah)

2.3.1.3. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)

Untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan di suatu wilayah dapat terlihat pada nilai IPEI. Nilai IPEI diukur melalui 3 pilar/aspek yaitu: aspek pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan. Berdasarkan data tahun 2019-2021, nilai pilar 1 sampai 3 Kabupaten TTS cenderung meningkat walaupun tidak signifikan dan masih berada di bawah nilai provinsi.

Gambar 49: Perkembangan Pilar Pembentuk Nilai IPEI Kabupaten TTS dan Provinsi NTT Tahun 2019-2021



Sumber: BAPPENAS (diolah)

2.3.1.4. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks ekonomi hijau atau *Green Economy Index (GEI)* adalah strategi untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Terdapat 15 indikator yang akan digunakan untuk mengukur pelaksanaan ekonomi hijau. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan menjadi menjadi tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tabel 25: Indikator Kinerja Utama yang mendukung Tiga Pilar Ekonomi Hijau Kabupaten TTS Tahun 2025-2026

Pilar	Indikator	Target Kabupaten TTS	
		2025	2026
SOSIAL	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,35-1,03	1,03-0,71
	Tingkat Kemiskinan	24,91-24,64	24,64-24,37
	Angka Harapan Hidup	66,92-67,04	67,04-67,16
	Rata-rata Lama Sekolah	6,79-6,80	6,80-6,81
EKONOMI	Pertumbuhan Ekonomi	4,10-4,50	4,50-5,00
	Skor Pola Pangan Harapan	90	90
LINGKUNGAN	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	73,00-74,00	73,00-74,00
	Indeks Risiko Bencana	155,45	155,35

Sumber: RPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2026

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

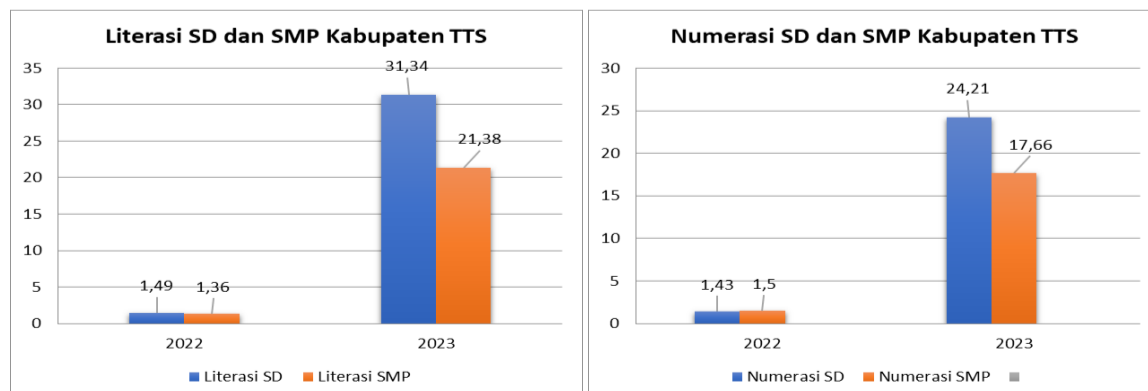
2.3.2.1. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen pengukur pendidikan yang mencerminkan hasil pembangunan di bidang pendidikan. Indeks pendidikan ini merupakan penggabungan dua indikator pendidikan yaitu angka HLS dan RLS yang juga merupakan indikator pembentuk IPM. Angka HLS dan RLS di Kabupaten TTS cenderung meningkat selama 5 tahun terakhir. Data HLS dan RLS Kabupaten TTS dapat di lihat pada gambar 38.

2.3.2.2. Angka Literasi dan Numerasi

Berdasarkan data pada tahun 2023, terdapat 31% peserta didik tingkat SD dan 21% peserta didik tingkat SMP di Kabupaten TTS yang telah mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca. Sedangkan untuk kompetensi numerasi, terdapat 24% peserta didik tingkat SD dan 17% peserta didik tingkat SMP di Kabupaten TTS yang telah mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi. Sesuai kategori tingkat aktivitas literasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud maka nilai angka literasi dan numerasi Kabupaten TTS masuk dalam kategori rendah (20,01 – 40,00).

Gambar 50: Angka Literasi dan Numerasi Kabupaten TTS Tahun 2022-2023

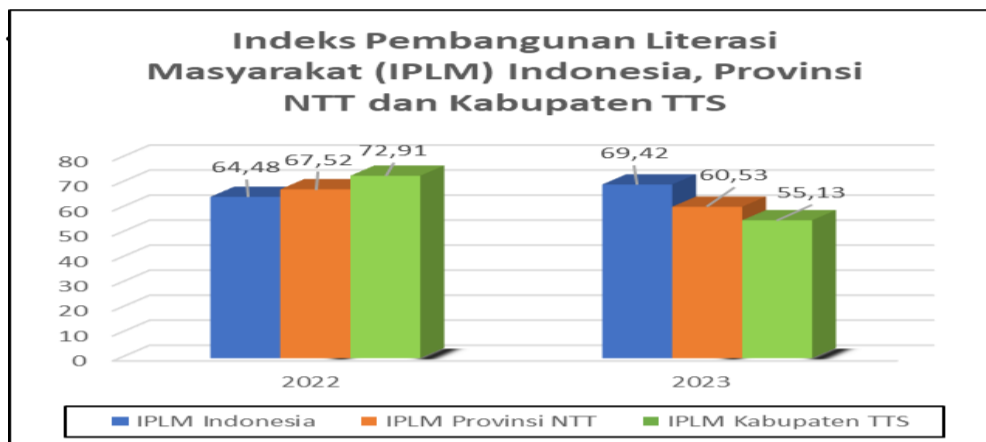


Sumber: Dinas P dan K Kabupaten TTS (diolah)

2.3.2.3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat yang diukur melalui aspek Pemerataan layanan perpustakaan, Ketercukupan koleksi, Ketercukupan tenaga perpustakaan, Tingkat kunjungan masyarakat per hari, Jumlah perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi dan Anggota perpustakaan.

Gambar 51: Nilai IPLM Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2023



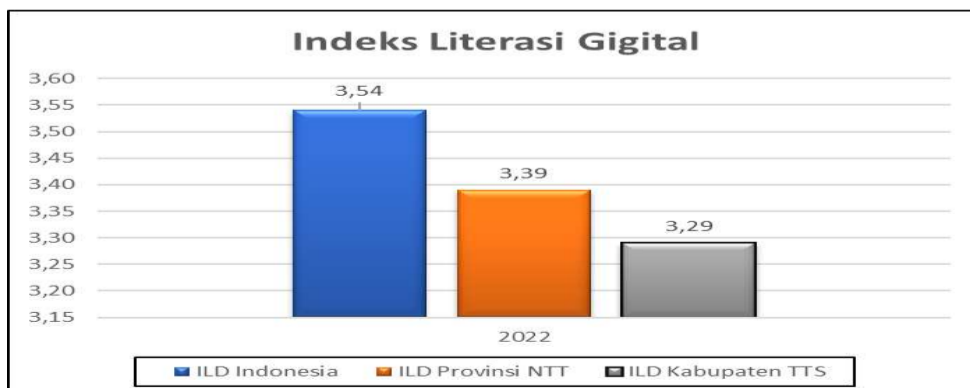
Sumber: Perpustakaan Nasional RI (diolah)

Berdasarkan data tahun 2022, IPLM Kabupaten TTS berada di atas Provinsi NTT dan nasional yakni 72,91, namun pada tahun 2023 nilai IPLM Kabupaten TTS mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 17,78 poin dan berada di bawah nilai provinsi dan nasional.

2.3.2.4. Indeks Literasi Digital (ILD)

Literasi digital berhubungan dengan kecakapan (life skill) karena tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan meliputi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan kompetensi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI baru merilis ILD untuk level kabupaten pada tahun 2022 secara khusus untuk kabupaten 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Data tahun 2022 menunjukkan ILD Kabupaten TTS adalah 3,29 dan masih berada di bawah provinsi dan nasional. Literasi digital sangat dipengaruhi oleh kecepatan internet, jumlah operator seluler yang beroperasi di wilayah, kestabilan sinyal dan wilayah keterjangkauan WIFI/ fiber optic.

Gambar 52: Nilai ILD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022

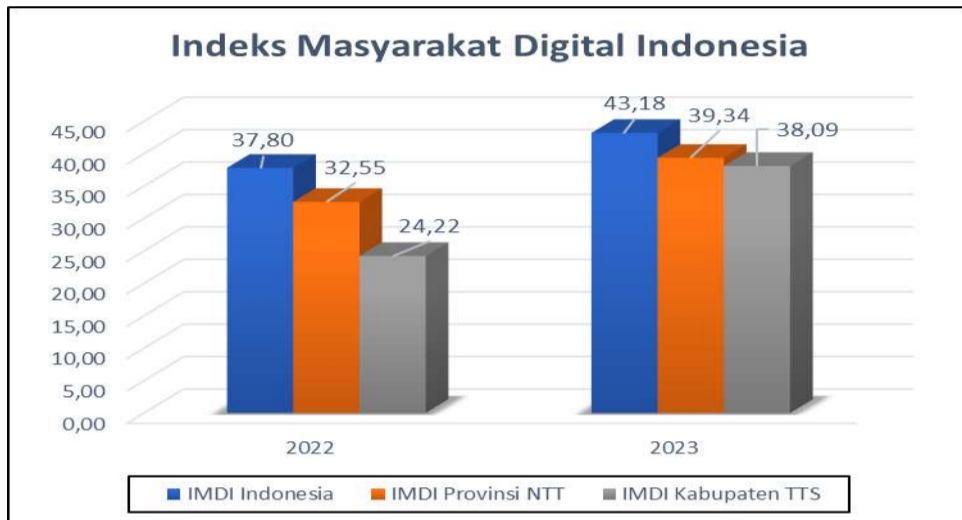


Sumber: Kominfo RI (diolah)

2.3.2.5. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Nilai IMDI menggambarkan tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Nilai IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan dan Pekerjaan. Berdasarkan data 2 tahun terakhir, nilai IMDI Kabupaten TTS pada tahun 2022 sebesar 24,22 meningkat 13,87 di tahun 2023 menjadi 38,09. Pilar penyumbang terbesar untuk nilai IMDI Kabupaten TTS adalah pilar Infrastruktur dan Ekosistem dan Keterampilan Digital.

Gambar 53: Nilai IMDI Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2023

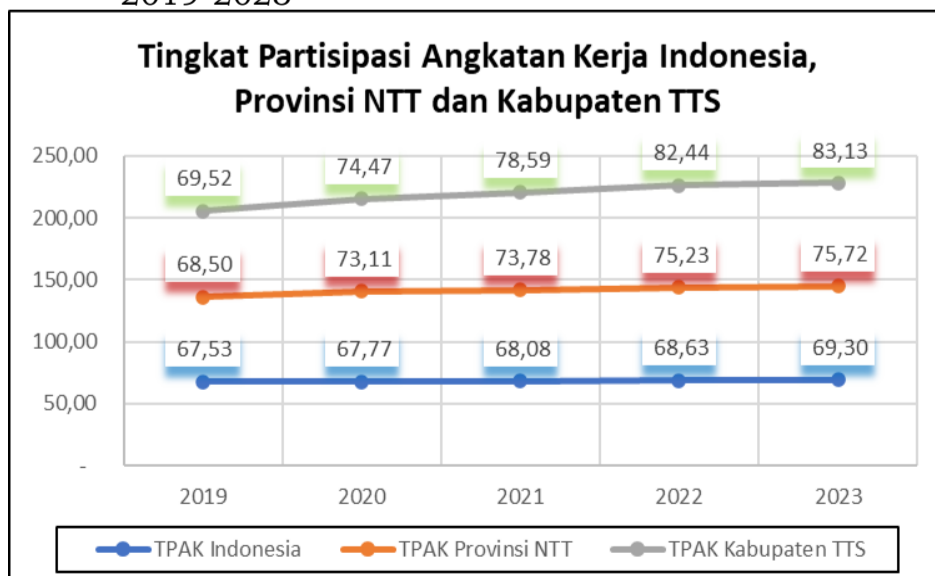


Sumber: Kominfo RI (diolah)

2.3.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menjadi salah satu indikator perkembangan ketenagakerjaan di suatu wilayah. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, perkembangan TPAK Kabupaten TTS mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,40%. Peningkatan TPAK Kabupaten TTS berada di atas persentase TPAK Provinsi NTT dan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang dapat terlibat secara aktif secara ekonomi di wilayah Kabupaten TTS.

Gambar 54: TPAK Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2019-2023



Sumber: BPS (diolah)

2.3.2.6. Angka Ketergantungan

Penduduk usia produktif dan tidak produktif di Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, angka ketergantungan cenderung menurun, pada tahun 2019 sebesar 74,63 menurun menjadi 55,09. Berdasarkan data tahun 2023 maka setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 55 orang penduduk usia non produktif.

Tabel 26: Angka Ketergantungan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
0 - 4	62.928	38.093	37.827	37.645	44.159
5-9	61.491	45.304	45.284	45.229	41.773
10-14	51.623	47.970	48.013	48.294	46.959
15-19	39.577	41.757	41.150	40.793	45.691
20-24	29.639	38.686	37.977	37.260	39.715
25-29	32.988	36.714	36.982	37.162	37.914
30-34	31.604	30.654	30.995	31.405	34.078
35-39	30.040	29.839	30.062	30.281	29.663
40-44	27.827	27.319	27.577	27.804	28.700
45-49	25.757	25.414	25.792	26.091	26.121
50-54	21.397	23.116	23.570	23.906	23.991
55-59	15.907	20.755	21.244	21.598	21.503
60-64	13.257	17.279	17.784	18.139	18.586
65-69	10.432	12.724	13.142	13.429	14.299
70-74	6.550	9.356	9.729	9.940	9.927
75+	6.973	10.430	10.830	11.140	11.442
Kabupaten TTS	467.990	455.410	457.958	460.116	474.521
Rasio Ketergantungan*	74,63	56,21	56,23	56,27	55,09

Sumber: TTS Dalam Angka (diolah)

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Pengukuran IKLI memberikan informasi baik dalam perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Beberapa infrastruktur yang menjadi sasaran laporan indeks adalah infrastruktur jalan dan jembatan, sarana prasarana transportasi darat, sarana prasarana air bersih, sarana prasarana perumahan (persampahan, jaringan listrik, telekomunikasi), ruang terbuka hijau/taman, sarana prasarana pusat perekonomian (pasar).

Berdasarkan data selama 5 tahun terakhir, panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten TTS terus mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2023 panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 657,60 Km (52,35%).

Tabel 27: Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2021-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km)	538	579,97	600,20	637,89	657,60
Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	42,83	46,17	48,30	50,35	52,35

Sumber: BAPPEDA

Data terkait sanitasi menunjukkan sampai dengan tahun 2023, akses sanitasi layak di Kabupaten TTS telah mencapai 61,83% atau 71.669 KK/RT. Sedangkan untuk data penduduk Kabupaten TTS yang mengakses air minum layak selama 5 tahun terakhir mengalami

peningkatan, sampai dengan tahun 2023 sebanyak 283.888 Jiwa (60,66%).

Tabel 28: Kondisi Akses Sumber Air Minum Layak Kabupaten TTS Tahun 2021-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk dengan sumber air minum layak	198.428	248.015	277.192	278.860	283.888

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2023

Data terkait rumah layak huni di Kabupaten TTS menunjukkan kecenderungan peningkatan selama 5 tahun terakhir, sampai dengan tahun 2023 telah tersedia 74.983 unit rumah layak huni di Kabupaten TTS yang dibangun dengan menggunakan anggaran Pemerintah maupun Lembaga Non Pemerintah.

Tabel 29: Kondisi Rumah Layak Huni di Kabupaten TTS Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Layak Huni	63,51	N/A	63,99	64,63	64,68
Jumlah Rumah Layak Huni	73.625	73.849	74.184	74.919	74.983

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2021-2023

Sistem prasarana pengelolaan sampah terdiri dari pengelolaan sampah dan penyediaan perangkat keras pengelolaan limbah. Pengelolaan sampah terbagi atas pengumpulan sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara (TPS) dan pengumpulan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten TTS menyediakan 5 unit truk angkut sampah dan 1 unit motor angkut sampah yang akan mengangkut sampah pada 28 unit TPS untuk dikelola di 1 Unit TPA dan 1 Unit TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Tabel 30: Jumlah Sarana Persampahan di Kota SoE Tahun 2023

Jumlah Sarana			Produksi (Ton/Tahun)	Produksi (Ton/Tahun) sd 2023	Pengolahan (Ton)
TPS (Unit)	TPA (Unit)	TPS 3 R (Unit)			
28	1	1	10.400	42.148	42

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten TTS Tahun 2023

Untuk sarana prasarana perekonomian khususnya pasar di Kabupaten TTS terdapat 56 unit pasar yang tersebar pada 32 kecamatan. Pasar yang ada di setiap kecamatan merupakan pasar mingguan dan hanya pasar yang ada di Kota SoE, Kapan dan Niki-Niki yang merupakan pasar harian.

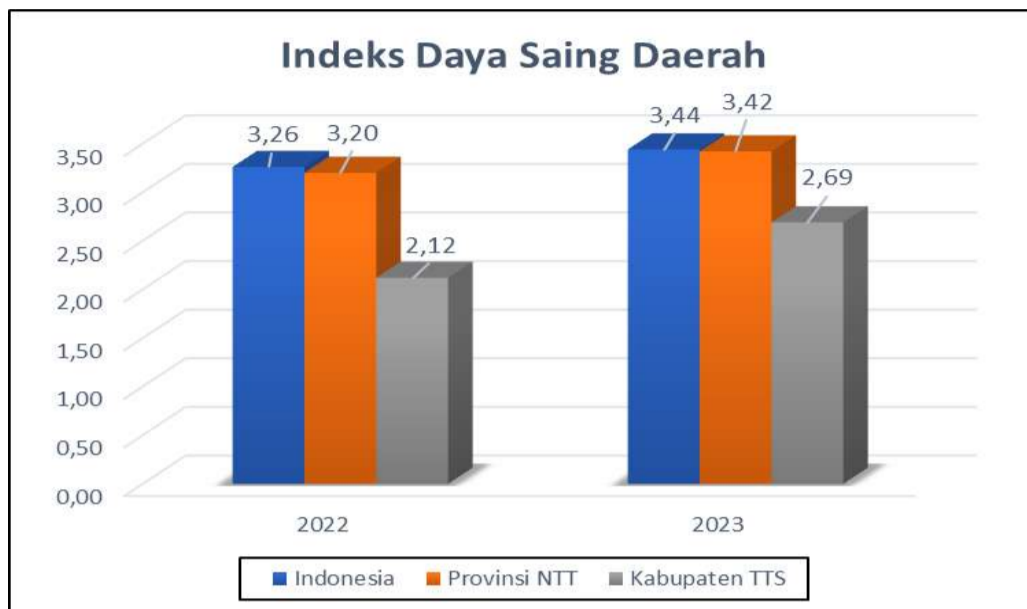
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk mengukur produktivitas suatu daerah yang pada akhirnya merefleksikan kemampuan daerah tersebut dalam bersaing. Berdasarkan data 2 tahun terakhir, nilai IDSD Kabupaten TTS

mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, nilai IDSD sebesar 2,12 berada pada kategori Sedang (rentang nilai 1,26 – 2,5), sedangkan pada tahun 2023 nilai IDSD sebesar 2,69 berada pada kategori Tinggi (rentang nilai 2,51 – 3,75). Nilai IDSD Kabupaten TTS masih berada di bawah nilai IDSD Provinsi NTT dan Indonesia.

Gambar 55: Nilai IDSD Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2022-2023



Sumber: BRIN (diolah)

2.3.4.2. Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan data, kegiatan penanaman modal di Kabupaten TTS didominasi oleh PMDN baik dalam nilai investasi maupun jumlah investornya. Pada rentang tahun 2019-2022, nilai investasi di Kabupaten TTS cenderung mengalami peningkatan. Penghitungan nilai investasi menggabungkan realisasi nilai investasi UMK dan Non UMK tetapi di tahun 2023 penghitungan nilai investasi hanya menggunakan realisasi nilai investasi Non UMK sehingga pada tahun 2023 nilai investasi di Kabupaten TTS mengalami penurunan yang cukup signifikan. Perkembangan nilai investasi dan jumlah investor baik PMDN maupun PMA Kabupaten TTS selama tahun 2019-2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 31: Nilai Investasi dan Jumlah Investor Kabupaten TTS Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Investasi	25,9 Miliar	18,1 Miliar	88,82 Miliar	105,87 Miliar	42 Miliar
Jumlah Investor PMDN/PMA	20	21	176	109	141

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten TTS

Pada Bulan April tahun 2024 Pemerintah Kabupaten TTS telah mengoperasikan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan tujuan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, keamanan pelayanan dan meningkatkan daya saing serta memberikan kemudahan berusaha

bagi masyarakat dan investor. Aktivitas MPP Kabupaten TTS melibatkan 20 instansi/lembaga baik pada level Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten TTS dengan jenis layanan yang dilakukan sebanyak 143 jenis layanan terintegrasi.

2.3.5. Daya Saing Sektor Unggulan Daerah

2.3.5.1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian khususnya tanaman pangan merupakan salah satu sektor unggulan daerah di Kabupaten TTS. Potensi lahan sawah di Kabupaten TTS adalah 10.339 Ha yang telah difungsikan untuk lahan sawah seluas 6.121 Ha, difungsikan untuk tanaman lain seluas 1.419 Ha dan yang belum ditanamani apapun seluas 2.799 Ha. Sedangkan untuk potensi lahan kering di Kabupaten TTS adalah 207.528 Ha, yang telah difungsikan seluas 146.390 Ha dan yang belum difungsikan seluas 61.138 Ha. Di wilayah Kabupaten TTS terdapat 70 Daerah Irigasi.

Kabupaten TTS merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT dengan kontribusi terbesar untuk produksi jagung. Rincian selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 32: Produksi Jagung Kabupaten TTS Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022	Peringkat Provinsi Tahun 2022
Produksi Jagung Kabupaten TTS (Ton)	235.323	213.654	210.816	308.595	
Produksi Jagung Provinsi NTT	951.251	834.067	777.051	835.881	
% Terhadap Produksi Provinsi	24,74	25,62	27,13	36,92	Peringkat 1

Sumber: BPS (diolah)

Selain komoditi jagung, dari sektor hortikultura terdapat 2 komoditi unggulan yaitu jeruk keprok/siam dan alpukat, kedua komoditi ini bahkan sudah memiliki “*brand*” dalam pemasaran di Indonesia yang lazim disebut sebagai jeruk keprok SoE dan alpukat mentega SoE. Jeruk keprok SoE sudah memiliki Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Produk Pertanian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor ID G 000 000 050. Sertifikat IG ini memberikan perlindungan hukum terhadap nama geografis asal produk dan jaminan keaslian asal suatu produk. Sedangkan untuk komoditi alpukat, pada tahun 2022 Kementerian Pertanian RI telah mengeluarkan Tanda Daftar Varietas Tanaman untuk 3 komoditi alpukat yaitu Alpukat Mentega SoE 1 dengan Nomor Varietas Lokal 1877/PVL/2022, Alpukat Mentega SoE 2 dengan Nomor Varietas Lokal 1876/PVL/2022 dan Alpukat SoE 3 dengan Nomor Varietas Lokal 1880/PVL/2022.

Berdasarkan data Kabupaten TTS merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT dengan kontribusi terbesar untuk produksi jeruk keprok dan alpukat. Rincian selengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 33: Produksi Jeruk Keprok dan Alpukat Kabupaten TTS Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Peringkat Provinsi Tahun 2023
Produksi Jeruk Keprok Kabupaten TTS (Kuintal)	146.743	107.644	8.004	228.451	91.351	

Produksi Jeruk Keprok Provinsi NTT	260.177	548.670	18.454	464.737	163.581	
% Terhadap Produksi Provinsi	56,40	19,62	43,37	49,16	55,84	Peringkat 1
Produksi Alpukat Kabupaten TTS (Kuintal)	19.676	18.615	17.024	39.900	37.653	
Produksi Alpukat Provinsi NTT	116.825	111.186	342.837	223.824	140.851	
% Terhadap Produksi Provinsi	16,84	16,74	4,97	17,83	26,73	Peringkat 2

Sumber: BPS (diolah)

2.3.5.2. Peternakan

Sektor peternakan termasuk sektor unggulan di Kabupaten TTS. Kabupaten TTS merupakan salah satu kabupaten dengan kontribusi peternakan besar yang cukup signifikan secara provinsi. Terdapat 2 ternak di Kabupaten TTS yang menjadi komoditas unggulan yaitu sapi potong dan babi. Pada tahun 2022 populasi ternak sapi potong dan babi Kabupaten TTS menduduki posisi kedua terbesar secara provinsi. Tabel 34: Populasi Ternak Unggulan Kabupaten TTS Tahun 2019-2022

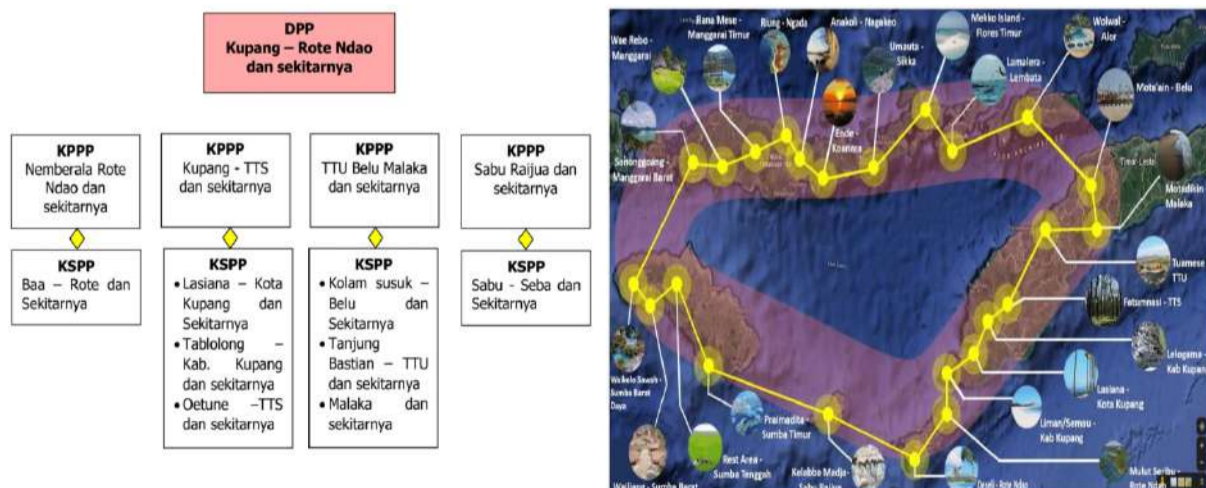
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	Peringkat Provinsi Tahun 2022
1	Populasi Ternak Sapi Kabupaten TTS	203.100	210.053	215.504	228.434	
	Populasi Ternak Sapi Provinsi NTT	1.087.761	1.176.317	1.173.473	1.243.884	
	% Terhadap Populasi Provinsi	18,67	17,86	18,36	18,36	Peringkat 2
2	Populasi Ternak Babi Kabupaten TTS	200.739	208.087	213.377	236.848	
	Populasi Ternak Babi Provinsi NTT	2.266.222	2.352.441	2.103.259	2.325.020	
	% Terhadap Populasi Provinsi	8,86	8,85	10,15	10,19	Peringkat 2

Sumber: BPS (diolah)

2.3.5.3. Pariwisata

Wilayah Kabupaten TTS termasuk dalam salah satu dari 5 Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP Kupang – Rote Ndao dan sekitarnya) dan termasuk dalam 18 Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (Kawasan Kupang – TTS dan sekitarnya) serta termasuk dalam 22 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Oetune – TTS dan sekitarnya). Dalam pengembangan pariwisata *estate* Provinsi NTT, salah satu fokus pengembangan di Kabupaten TTS adalah Fatumnasi.

Gambar 56: Pengembangan Pariwisata Kabupaten TTS



Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekraf Provinsi NTT (diolah)

Berdasarkan RIPPARDA Kabupaten TTS, terdapat 5 Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) di Kabupaten TTS yaitu:

1. KSPD A

Wisata unggulan pada KSPD A adalah: Situs Air Berubah Menjadi Anggur di Kecamatan Kota SoE, Taman Rekreasi Bu'at di Kecamatan Mollo Selatan, Air Terjun Oehala di Kecamatan Mollo Tengah, Panorama alam Oelbubuk di Kecamatan Mollo Tengah dan Perkambungan adat Oeleu di Kecamatan Mollo Tengah

2. KSPD B

Wisata unggulan pada KSPD B adalah: Fatunaususu, Fatukolen, Sonaf Ajaobaki di Kecamatan Mollo Utara, Gunung Mutis, Cagar Alam Mutis-Timau di Kecamatan Fatumnasi, Sonaf Sobai Fatumnutu Kecamatan Polen

3. KSPD C

Wisata unggulan pada KSPD C adalah: Benteng None, Nifu Supul, Benteng Tefa Betty, Benteng Faot di Kecamatan Kuatnana, Sonaf Amanuban di Kecamatan Amanuban Tengah, Situs Kerajaan Banam Tunbes, Perkambungan Adat Boti, Fatuulan di Kecamatan KiE

4. KSPD D

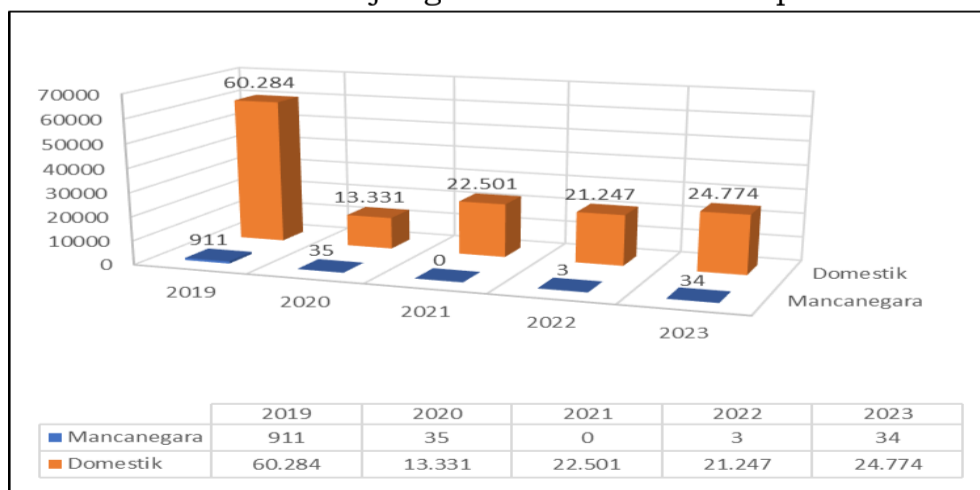
Wisata unggulan pada KSPD D adalah: Air terjun Oemaman, Pantai Oetune di Kecamatan Kualin, Monumen/tugu Perang Kolbano, Tangga Seribu Haunobenak, Pantai Kolbano di Kecamatan Kolbano

5. KSPD E

Wisata unggulan pada KSPD E adalah: Situs Benteng Seki Tafuli Kecamatan Amanatun Utara, Sonaf Nunkolo dan Sonaf Banunaek di Menu, Pantai Lopon dan Fatutun'am di Kecamatan Nunkolo.

Berdasarkan data 5 tahun terakhir, jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke Kabupaten TTS berfluktuasi. Pada tahun 2019 jumlah total wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten TTS sejumlah 61.195 jiwa kemudian turun secara signifikan menjadi 13.366 jiwa pada tahun 2020 akibat pandemi Covid 19 dan pasca pandemi Covid 19 jumlah wisatawan Kembali naik tetapi belum mencapai jumlah wisatawan sebelum pandemi Covid 19. Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten TTS adalah selama 2 hari

Gambar 57: Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten TTS Tahun



Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten TTS (diolah)

2.3.5.4. Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten TTS. Kabupaten TTS memiliki panjang garis Pantai 101,86 Km yang terbentang dari Desa Bena Kecamatan Amanuban

Selatan sampai Desa Baus Kecamatan Boking. Potensi kelautan Kabupaten TTS berada pada pesisir selatan Laut Timor yang mencakup 6 kecamatan pesisir (Kecamatan Amanuban Selatan, Kualin, Kolbano, Kot'olin, Nunkolo dan Boking). Sesuai peraturan perundang-undangan, Kabupaten TTS memiliki kewenangan wilayah laut seluas 4 mil atau sebesar 755 Km² (75.000 Ha) dengan jumlah nelayan sebanyak 1.028 orang. Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya terdapat di Kecamatan Mollo Selatan, Mollo Utara, Tobu, Fatumnasi, Polen, Amanatun Selatan, Kualin, Amanuban Selatan dan Batu Putih. Sampai dengan tahun 2023, sebaran perikanan budidaya di wilayah Kabupaten TTS telah dikembangkan pada 176 desa di 32 kecamatan.

Tabel 35: Produksi Perikanan Kabupaten TTS Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi perikanan tangkap dan PUD (ton)	392,80	395,40	392,70	420,10	648,20
Produksi perikanan budidaya (ton)	401,60	401,40	556	560	562

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten TTS (diolah)

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

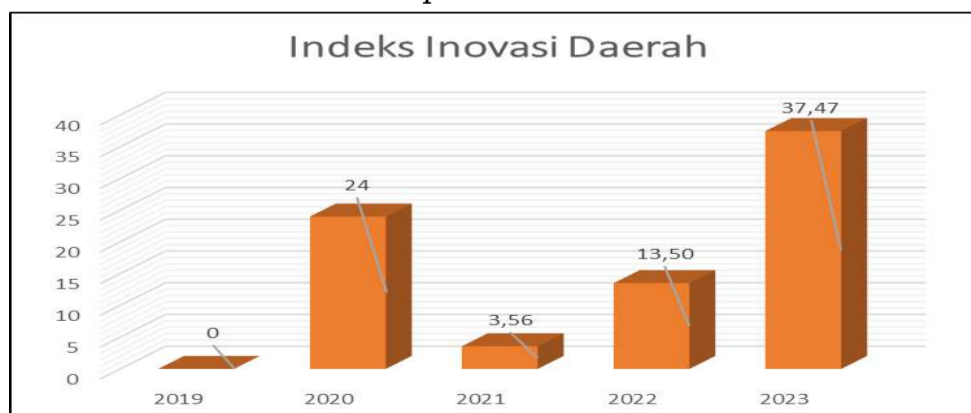
2.4.1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan. Pada tahun 2021 Kabupaten TTS mendapatkan nilai IPP dengan kategori C- (Cukup dengan catatan).

2.4.2. Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Data 5 tahun terakhir menunjukkan nilai IID Kabupaten TTS berfluktuatif tetapi cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, nilai IID Kabupaten TTS 0 karena tidak menginput pada aplikasi Kemendagri. Sedangkan tahun 2020-2022 dengan nilai yang berfluktuatif, nilai IID Kabupaten TTS masuk pada kategori Kurang Inovatif. Pada tahun 2023, nilai IID meningkat menjadi 37,47 dan masuk dalam kategori Inovatif.

Gambar 58: Nilai IID Kabupaten TTS Tahun 2019-2023

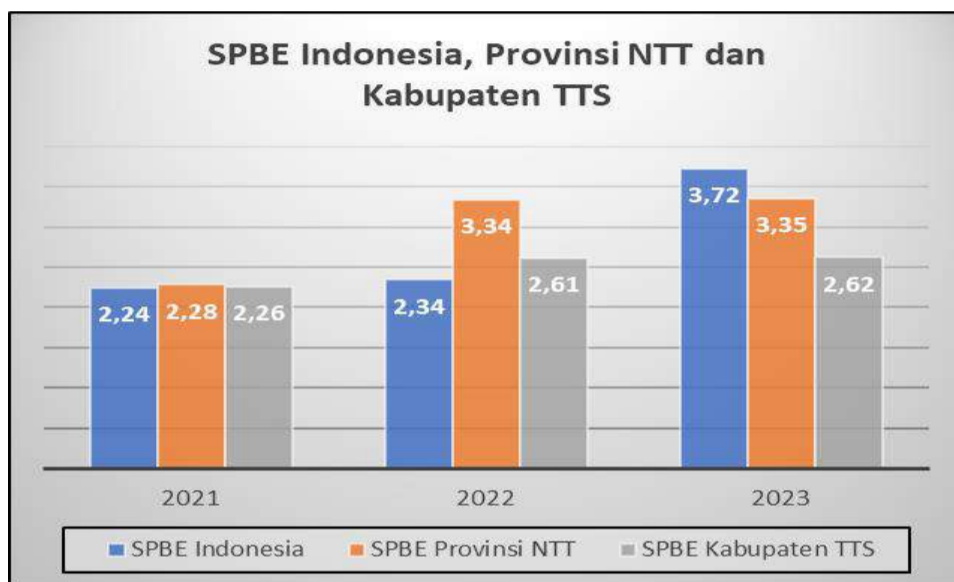


Sumber: Kemendagri (diolah)

2.4.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Berdasarkan data selama 3 tahun terakhir, nilai Indeks SPBE Kabupaten TTS mengalami peningkatan setiap tahun, namun masih berada di bawah nilai provinsi dan nasional. Pada tahun 2021 sebesar 2,26 berada pada kategori Cukup (rentang nilai 1,8 – 2,6), sedangkan tahun 2022 dan 2023 dengan nilai 2,61 dan 2,62 berada pada kategori Baik (rentang nilai 2,6 – 3,5).

Gambar 59: Nilai SPBE Kabupaten TTS, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2021-2023



Sumber: Kemenpan RB (diolah)

2.4.4. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Indeks SAKIP merupakan hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dasar penilaian mangacu pada 4 komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Kabupaten TTS selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan nilai SAKIP. Pada tahun 2021-2022 nilai SAKIP Kabupaten TTS berada pada kategori Cukup (rentang nilai >50-60) sedangkan pada tahun 2023 nilai SAKIP meningkat sehingga berada pada kategori Baik (rentang nilai >60-70).

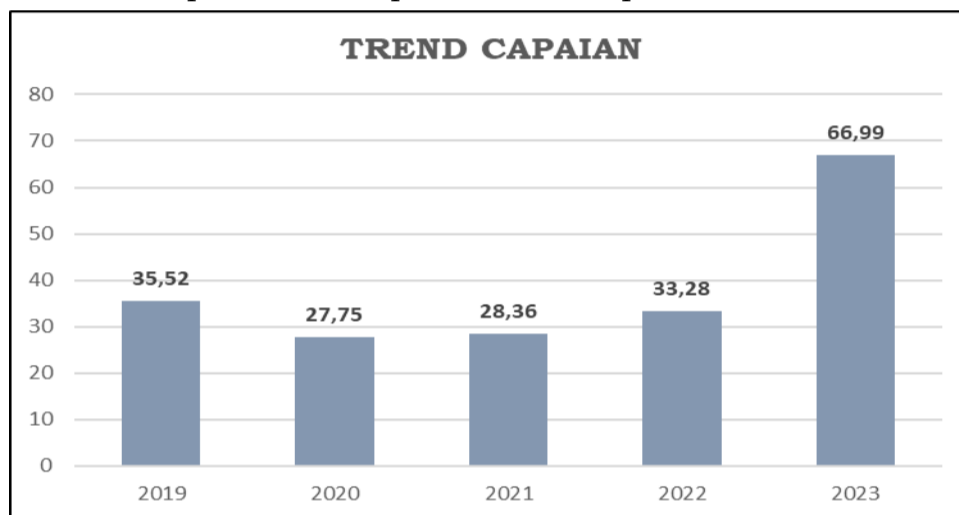
2.4.5. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Indeks RB digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah yang meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir serta budaya kerja. Nilai Indeks RB untuk Kabupaten TTS pada tahun 2023 masuk dalam kategori Cukup (rentang nilai >50-60). Nilai indeks RB Kabupaten TTS masih berada di bawah Provinsi NTT yang berada pada kategori Baik.

2.4.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu dasar pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang terdiri dari SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan SPM Sosial. Data capaian hasil SPM Kabupaten TTS secara keseluruhan selama tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan tetapi belum signifikan. Hasil capaian penerapan SPM yang ada merupakan gambaran gabungan persentase realisasi capaian, persentase realisasi anggaran dan persentase permasalahan penerapan SPM. Nilai capaian penerapan SPM Kabupaten TTS masih rendah, hal ini sangat dipengaruhi oleh ketaatan pelaporan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM pada aplikasi SPM Kementerian Dalam Negeri.

Gambar 60: Capaian Penerapan SPM Kabupaten TTS Tahun 2022-2023



Sumber: Kemendagri (diolah)

SPM Bidang Pendidikan untuk kabupaten meliputi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini. Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Tahun 2019 mencapai 85,79 persen dan pada tahun 2023 sebesar 73,91 persen.

SPM Bidang Kesehatan untuk kabupaten meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, serta pelayanan kesehatan dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia. Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 67,91 persen dan tahun 2023 sebesar 80,00 persen.

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten meliputi penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 27,45 persen dan tahun 2023 sebesar 62,14 persen.

SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten meliputi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni

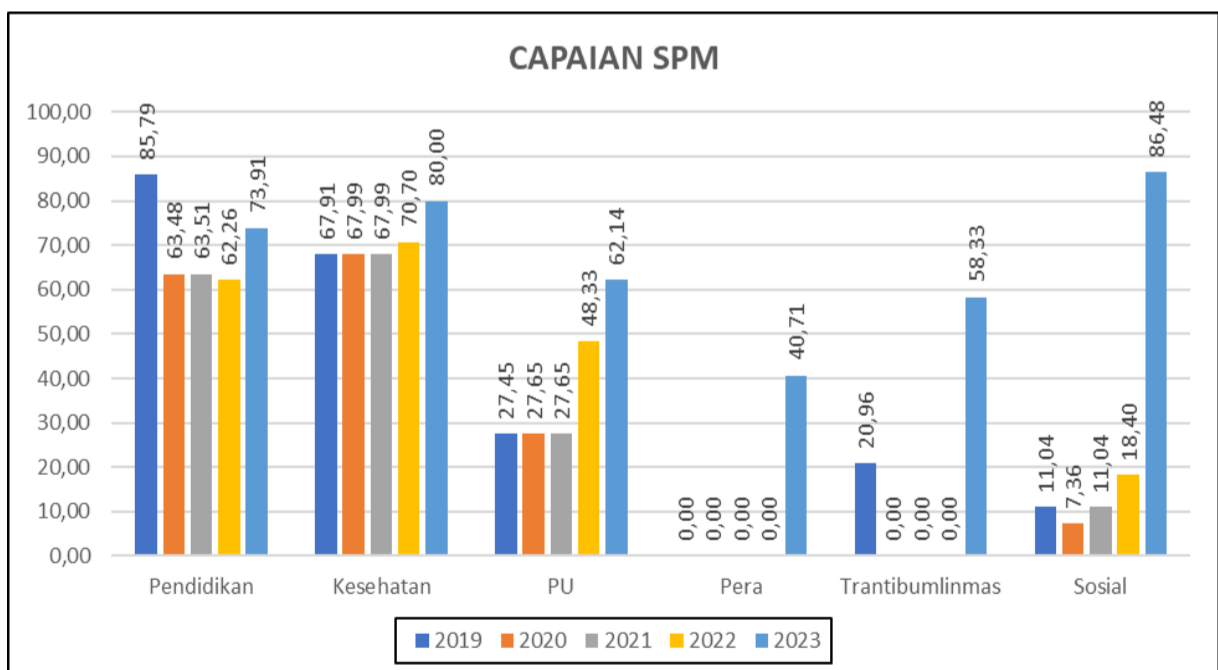
bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten. Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencapai 40,71 persen.

SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat kabupaten meliputi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat kabupaten, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 20,96 persen dan tahun 2023 sebesar 58,33 persen.

SPM Bidang Sosial kabupaten meliputi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten. Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 11,04 persen dan tahun 2023 sebesar 86,48 persen.

Capaian SPM masing-masing bidang di Kabupaten TTS selama tahun 2019-2023 dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 61: Capaian SPM per Bidang Urusan di Kabupaten TTS Tahun 2019-2023



Sumber: Kemendagri (diolah)

2.5. EVALUASI HASIL RPJPD KABUPATEN TTS TAHUN 2005-2025

2.5.1. Evaluasi Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025

Dokumen RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025 disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2005-2025. Namun tidak ditemukan penjelasan di dalam

dokumen mengapa RPJPD yang disusun dan efektif digunakan mulai tahun 2005 tetapi disahkan dengan peraturan daerah pada tahun 2009.

Evaluasi RPJPD dimulai dengan melakukan reviu terhadap dokumen RPJPD berdasarkan kriteria kesesuaian RPJPD dengan RTRW dalam hal pola ruang dan struktur ruang, visi dan misi pembangunan yang ditetapkan, yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 36: Evaluasi Dokumen RPJPD Berdasarkan Kesesuaian Materi dengan RTRW dan Visi Misi Pembangunan 2005 – 2025 Kabupaten TTS

Fokus	Uraian	Indikator	Hasil Evaluasi
Kesesuaian dengan RTRW (penelaahan RTRW)	Arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD selaras dengan arah kebijakan RTRW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur ruang 2. Pola ruang 3. Indikasi program pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum perencanaan pembangunan jangka panjang menggunakan perencanaan berbasis spasial dalam merencanakan pembangunan fisik dan lingkungan, namun belum memuatnya dalam indikator yang terukur. • Pembangunan kawasan dan pembangunan infrastruktur jalan yang tertuang dalam pembangunan jangka panjang belum didukung data dari RTRW. • Secara eksplisit dinyatakan bahwa RPJPD terkait dengan RTRW.
Visi	Kemajuan, berkeadilan dan sejahtera melalui “KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”	<ul style="list-style-type: none"> • Telah menjawab permasalahan pembangunan atau isu strategis • Mengakomodasi peluang dan kekuatan serta keunikan kompetitif daerah • Menggambarkan nilai kunci lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan pembangunan dan isu strategis belum didukung dengan data yang cukup bahwa secara spesifik pembangunan daerah Kabupaten TTS penting untuk diarahkan kepada kesejahteraan.
Misi	Upaya-upaya yang jelas untuk mewujudkan visi	<ul style="list-style-type: none"> • Memperhatikan faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah • Bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah diingat 	Misi yang dituangkan cukup baik, walaupun didominasi faktor lingkungan internal daerah dan belum menunjukkan keinginan untuk menangkap peluang dan mengatasi tantangan faktor lingkungan eksternal.

Sumber: BAPPEDA TTS

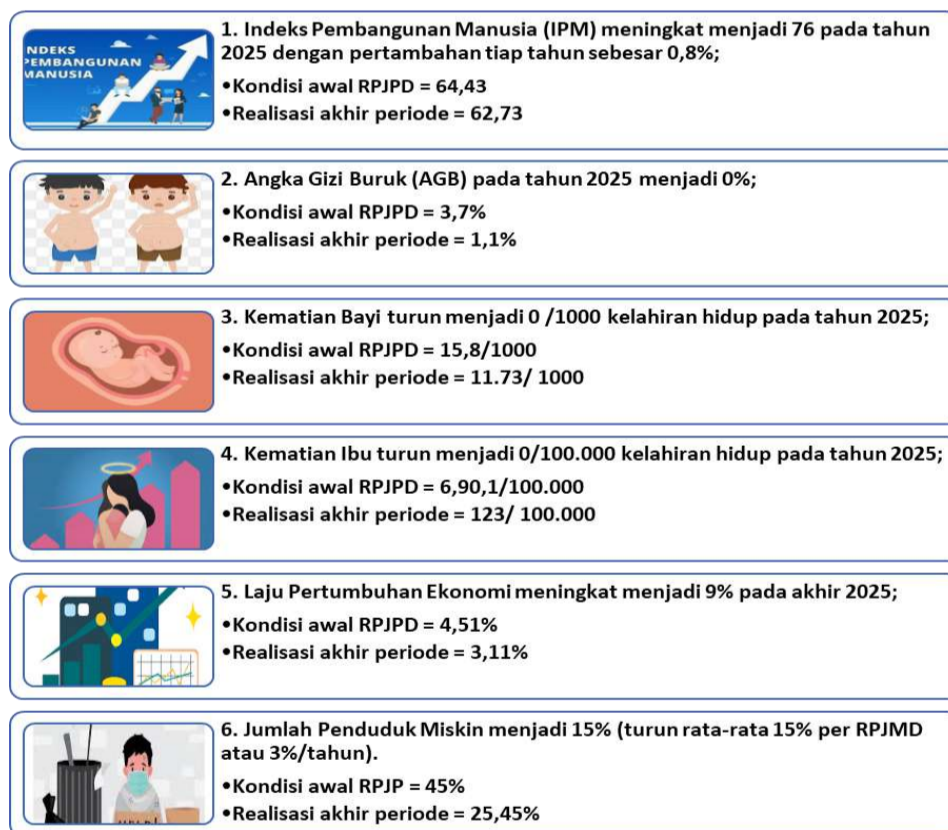
Dari susunan penyajian unsur dan materi RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025 terlihat bahwa:

1. Semua unsur dan materi kelengkapan dokumen RPJPD, telah tertuang dan telah dipenuhi dalam RPJPD ini. Namun demikian, belum semua unsur didukung data yang relevan dan isian materi untuk penetapan isu strategis dinilai masih dangkal karena belum didukung dengan penyajian data yang memadai pada Bab II.
2. Indikator untuk menguji capaian target pembangunan di akhir tahun 2025 juga belum didukung dengan metoda analisis yang jelas.
3. Tidak ada penjabaran misi ke dalam sasaran pokok yang seharusnya diperlukan untuk menguji dan menjamin bahwa misi akan dapat dicapai.
4. Misi langsung diturunkan kepada arah kebijakan untuk setiap tahapan RPJMD. Perlu penjelasan mengapa RPJMD periode pertama tidak termasuk kedalam tabel tahapan RPJPD.

2.5.2. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025

Sasaran dan arah kebijakan untuk mewujudkan Misi tidak diurai dengan tegas dan rinci di dalam setiap tahapan RPJMD, sehingga pencapaian sasaran tidak pula dapat diukur dengan jelas. Namun untuk tetap dapat mengukur capaian RPJPD maka digunakan analisis terhadap target dan realisasi sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJPD 2005-2025 dengan 6 (enam) indikator utama (sasaran pokok) sebagai berikut:

Gambar 62: Pencapaian Indikator Utama RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025



Sumber: BAPPEDA TTS

Perkembangan hasil capaian sasaran pokok kinerja RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025 dan gambaran faktor pendukung, faktor penghambat serta usulan tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 37: Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD kabupaten			Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten (%)			Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
					2009-2014	2014-2019	2019-2024	2009-2014	2014-2019	2019-2024	2009-2014	2014-2019	2019-2024	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten TTS yang berdaya saing Misi 2 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten TTS sebagai masyarakat hukum yang demokratis Misi 3 : Mewujudkan kualitas aparatur pemerintah yang berkualitas, bersih dan berwibawa Misi 4 : Mewujudkan masyarakat Kabupaten	Peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 64,43 menjadi 68,00	Peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 64,43 menjadi 68,00	64.43	76	68	72	76	59.41	62.23	62.73	87.37	86.43	82.54	Kurangnya sumber daya	Tersedianya anggaran	Meningkatkan sumberdaya yang ada
	Angka gizi buruk ditekan hingga dari 3,7% menjadi 2%	Angka gizi buruk ditekan hingga dari 3,7% menjadi 2%	3.7	0	2	1.2	0		3.1	1.1		38.71	70,27	Kurangnya sumber daya	Tersedianya anggaran	Meningkatkan sumberdaya yang ada
	angka kematian bayi ditekan dari 15,8/1000 menjadi	Angka kematian bayi ditekan dari 15,8/1000 menjadi	15,8/1000	0/1000	10/1000	5/1000	0/1000	12,5/1000	7,97/1000	11,73/1000	80.00	62.74	25,75	Kurangnya sumber daya	Tersedianya anggaran	Meningkatkan sumberdaya yang ada

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD kabupaten			Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten (%)			Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
TTS yang berketahanan sosial, ekonomi, dan Politik Misi 5 : Mewujudkan Kabupaten TTS sebagai wilayah pertumbuhan yang berkeselamatan lingkungan	10/1000 Kelahiran Hidup	10/1000 Kelahiran Hidup														
	kasus kematian ibu ditekan dari 690,1/100.000 kelahiran hidup menjadi 400/100.000 kelahiran hidup	Kasus kematian ibu ditekan dari 690,1/100.000 kelahiran hidup menjadi 400/100.000 kelahiran hidup	690,1/100.000	0/100.000	400/100.000	250/100.000	0/100.000	230/100.000	86,52/100,000	123/100.000	173,91	288,95	82,17	Kurangnya sumber daya	Tersedianya anggaran	Meningkatkan sumberdaya yang ada
	laju pertumbuhan ekonomi dari 4,51 menjadi 6,5	Laju pertumbuhan ekonomi dari 4,51 menjadi 6,5	4.51	9	6.5	7.8	9	4.38	5.1	3.11	67.38	65.38	34.56	Kurangnya sumber daya	Tersedianya anggaran	Meningkatkan sumberdaya yang ada
	Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten TTS pada tahun 2014	Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2014	45	15	45	30	15	26.79	27.87	25.45	167.97	117.88	58.94	Kurangnya sumber daya	Tersedianya anggaran	Meningkatkan sumberdaya yang ada

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (Tahun 2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD kabupaten			Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten			Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD kabupaten (%)			Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
	sebesar 45,00%	sebesar 45,00%														
Rata-rata capaian kinerja (%)													59.03			
Predikat Kinerja																

Sumber: BAPPEDA TTS, 2024

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, skala nilai peringkat kinerja terbagi menjadi lima kriteria yaitu:

1. Sangat tinggi ($91\% \leq 100\%$)
2. Tinggi ($76\% \leq 90\%$)
3. Sedang ($66\% \leq 75\%$)
4. Rendah ($51\% \leq 65\%$)
5. Sangat rendah ($\leq 50\%$)

Sesuai dengan kriteria di atas, maka berdasarkan tabel 37 terdapat 6 indikator yang dapat diukur dengan asumsi menggunakan analisis target dalam RPJPD selama periode RPJMD 2009-2014, 2014-2019 dan 2019-2024. Sementara indikator lainnya teridentifikasi namun karena tidak mencantumkan target sehingga tidak dapat diukur capaian realisasi kerjanya. Capaian indikator yang dapat diukur tersebut yaitu:

1. Capaian peningkatan IPM dari 64,43 menjadi 62,73 berada pada kriteria ke-2 berada capaian 82,54% yang termasuk kriteria **tinggi**.
2. Capaian AGB ditekan dari 3,7% menjadi 1,1% kriteria penilaian realisasi kinerja adalah **sedang** (70,27%).
3. Capaian AKB ditekan dari 15,8/1000 Kelahiran Hidup menjadi 11,73/1000 Kelahiran Hidup, kriteria capaian indikator adalah 25,75 atau **sangat rendah**.
4. Capaian AKI ditekan dari 690,1/100.000 kelahiran hidup menjadi 123/100.000 kelahiran hidup kriteria capaian indikator adalah 25,75 atau **sangat rendah**.
5. Laju pertumbuhan ekonomi dari 4,51 menjadi 3,1 Dalam RPJPD ditargetkan 9%, namun hingga tahun 2022 capaian menjadi 3,11%. Tingkat capaian kinerja pertumbuhan ekonomi 34,56 atau **sangat rendah**.
6. Capaian persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten TTS pada tahun 2014 sebesar 45% menjadi 25,45%, kriteria capaian indikator adalah 58,94 atau **rendah**.

Secara umum tingkat capaian indikator RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2005-2025 sebesar 59,03% atau RENDAH.

2.6. TREND DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk Kabupaten TTS yang disajikan dalam dokumen ini menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR),

asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR). Data penduduk dasar yang digunakan bersumber dari penduduk hasil SP2020.

Tabel 38: Asumsi Proyeksi Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Parameter (1)	2025 (2)	2030 (3)	2035 (4)	2040 (5)	2045 (6)
PENDUDUK					
Laki-laki (000)	242,01	258,14	273,86	293,37	314,90
Perempuan (000)	245,99	263,14	279,84	300,94	324,51
Total (000)	488,00	521,28	553,7	594,31	639,41
Sex Ratio (%)	98,38	98,10	97,86	97,48	97,04
Komposisi Umur (%)					
0-14	27,42	26,85	27,86	27,49	27,09
15-64	64,76	64,55	62,85	62,38	61,87
65+	7,82	8,60	9,29	10,13	11,03
Dependency Ratio (%)	54,41	54,93	59,11	60,30	61,62

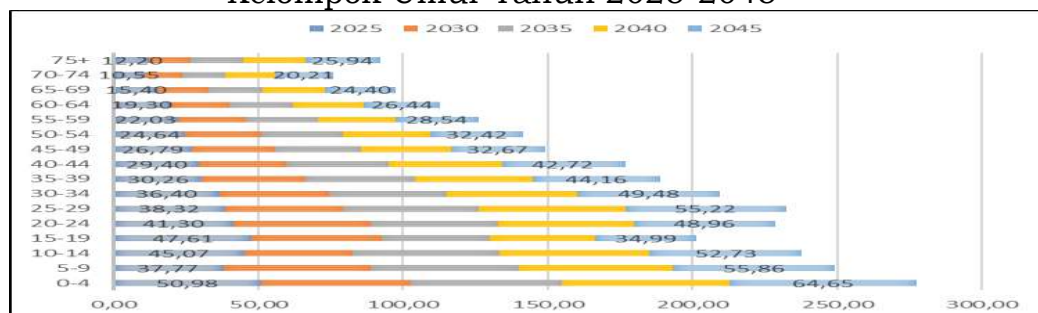
Sumber: BPS (diolah)

Jumlah penduduk Kabupaten TTS diproyeksikan sebesar 488 ribu jiwa pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 639,41 ribu jiwa pada tahun 2045 dengan kepadatan penduduk meningkat dari 123 jiwa/km² pada tahun 2025 menjadi 162 jiwa/km² pada tahun 2045.

Komposisi penduduk perempuan cenderung mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 242,01 ribu jiwa dan perempuan sebesar 245,99 ribu jiwa. Pada tahun 2045, jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 314,90 jiwa, namun lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebesar 324,51 jiwa. Kondisi perubahan komposisi ini juga tergambar dari *sex ratio* yang cenderung menurun antar periode. Angka *sex ratio* pada tahun 2025 sebesar 98,38 persen kemudian menurun menjadi 97,04 persen di tahun 2045 menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan cenderung lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Sesuai proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbesar ialah pada usia 0-4 tahun yaitu sebesar 50,98 ribu jiwa pada tahun 2025 menjadi 64,65 ribu jiwa pada tahun 2045. Namun, penambahan jumlah penduduk terbesar ialah pada kelompok umur 5-9 tahun. Pada tahun 2025 jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 37,77 ribu jiwa kemudian bertambah sebanyak 18,09 ribu jiwa menjadi 55,86 ribu jiwa pada tahun 2045.

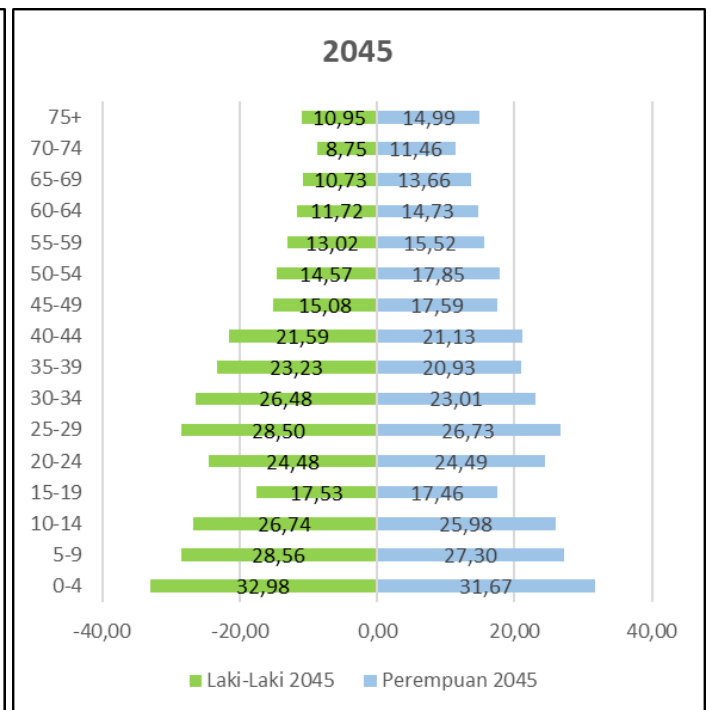
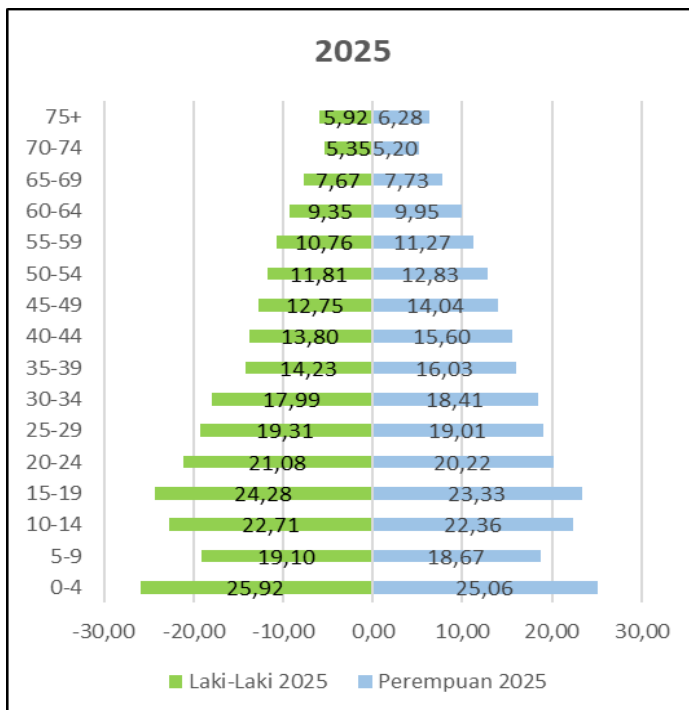
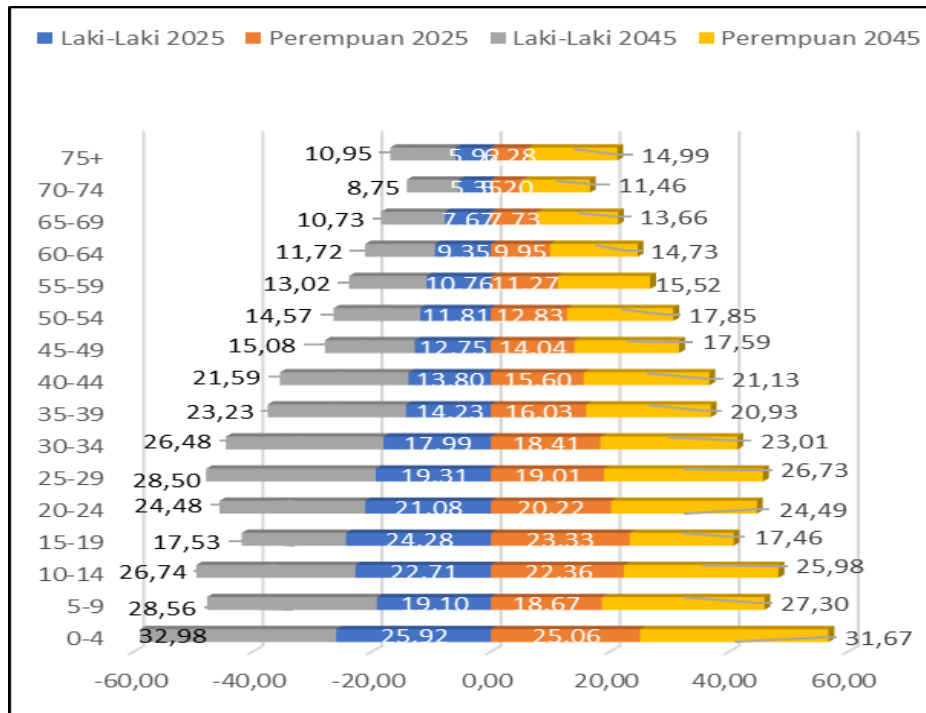
Gambar 63: Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten TTS Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045



Sumber: BPS (diolah)

Penambahan jumlah penduduk perempuan tertinggi selama periode 2025-2045 ialah pada kelompok umur 75 tahun ke atas yaitu meningkat sebanyak 8,71 ribu jiwa. Pada penduduk laki-laki, kelompok umur 5-9 tahun mengalami peningkatan tertinggi sebanyak 9,46 ribu jiwa. Berdasarkan hasil proyeksi, terdapat penurunan jumlah penduduk pada kelompok umur 15-19 tahun selama periode 2025-2045 baik penduduk perempuan maupun laki-laki. Pada tahun 2025 jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 23,33 ribu jiwa menurun menjadi 17,46 ribu jiwa, sedangkan untuk penduduk laki-laki dari 24,28 ribu jiwa menurun menjadi 17,53 ribu jiwa.

Gambar 64: Piramida Penduduk Kabupaten TTS Tahun 2025-2045



Sumber: BPS (diolah)

Jumlah penduduk kelompok umur 0-14 tahun (di bawah 15 tahun) diproyeksikan bertambah selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, jumlah penduduk kelompok ini sebanyak 133,82 ribu jiwa, bertambah menjadi 173,24 ribu jiwa pada tahun 2045. Jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) diproyeksikan meningkat selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, penduduk umur 15-64 tahun sebanyak 316,05 ribu jiwa kemudian bertambah menjadi 395,62 ribu jiwa pada tahun 2045. Sedangkan jumlah penduduk lanjut usia atau di atas 64 tahun dari hasil proyeksi menunjukkan peningkatan selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, jumlah penduduk lansia sebanyak 38,15 ribu jiwa bertambah menjadi 70,54 ribu jiwa pada tahun 2045.

Rasio ketergantungan di Kabupaten TTS diproyeksikan meningkat selama periode 2025-2045. Pada tahun 2025, rasio ketergantungan sebesar 54,41 persen, artinya ada sebanyak 54-55 penduduk usia non produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif. Kondisi ini meningkat di tahun 2045 yaitu sebesar 61,62 persen, atau terdapat 61-62 penduduk usia non produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

Gambar 65: Proyeksi Rasio Ketergantungan Kabupaten TTS Tahun 2025-2045



Sumber: BPS (diolah)

2.6.2. Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Hasil proyeksi jumlah kebutuhan rumah/tempat tinggal berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten TTS adalah sebanyak 97.600 unit di tahun 2025 dan meningkat menjadi 127.882 unit di tahun 2045. Dari hasil proyeksi kebutuhan tersebut, selanjutnya dapat diestimasi jumlah penambahan rumah/tempat tinggal berdasarkan tahun dasar 2023. Sesuai dengan data kondisi awal, jumlah penambahan unit rumah hingga tahun 2045 yaitu sebanyak 52.899 unit.

Tabel 39: Hasil Proyeksi Jumlah Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Awal 2023	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	474.521	488.000	521.280	553.700	594.310	639.410
Proyeksi Rumah/Tempat Tinggal (Unit)	74.983	97.600	104.256	110.740	118.862	127.882

Sumber: BAPPEDA TTS, 2024

Total kebutuhan air minum di Kabupaten TTS baik domestik maupun non domestik diproyeksikan sebesar 11,870 juta lebih m³/tahun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 23,740 juta lebih m³/tahun pada tahun 2045.

Tabel 40: Hasil Proyeksi Kebutuhan Air di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Awal 2023	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	474.521	488.000	521.280	553.700	594.310	639.410
Total Kebutuhan Air (m ³ /kapita/tahun)	11.574.620,85*	11.870.248,95	14.837.811,19	17.805.373,43	20.772.935,66	23.740.497,90

Sumber: BAPPEDA TTS, 2024

* Hasil estimasi bukan kondisi riil

Kebutuhan total listrik tahun 2025 sebanyak 219.600.000 unit rumah 450 VA per jiwa dan Gardu (KVA) sebanyak 1.098 KVA dan tahun 2045 dibutuhkan 287.734.500 VA dan Gardu (KVA) sebanyak 1.439 KVA.

Tabel 41: Hasil Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Awal 2023	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	474.521	488.000	521.280	553.700	594.310	639.410
Per Unit Rumah 450 VA per jiwa	88.900,45*	219.600.000	234.576.000	249.165.000	267.439.500	287.734.500
Gardu Listrik (Setiap 200 KVA)	N/A	1.098	1.173	1.246	1.337	1.439

Sumber: BAPPEDA TTS, 2024

* Daya pelanggan terpasang (PLN)

Volume timbunan sampah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 1.220 m³/hari, meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2045 sebesar 1.598,53 m³/hari. Dari volume timbunan sampah ini, maka dapat diproyeksikan kebutuhan fasilitas 20 tahun ke depan yaitu pada tahun 2025 kebutuhan kontainer penampung sampah mencapai 102 unit dan pada tahun 2045 dibutuhkan 133 unit. Lebih lanjut, kebutuhan armada pengangkut sampah untuk tahun 2025 dibutuhkan sebanyak 34 unit dan tahun 2045 sebanyak 44 unit.

Tabel 42: Hasil Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Awal 2023	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	474.521	488.000	521.280	553.700	594.310	639.410
Proyeksi timbulan sampah (m ³ /hari)	1.186,30*	1.220,00	1.303,20	1.384,25	1.485,78	1.598,53
TPS/kontainer sampah (unit/12 m ³)	44	102	109	115	124	133
Armada truk sampah (unit/12 m ³ /3 x ritase)	5**	34	36	38	41	44

Sumber: BAPPEDA TTS, 2024

* Hasil estimasi bukan kondisi riil

**5 unit/2 x ritase

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan sarana kesehatan selama periode 2025-2045 tidak diperlukan penambahan jumlah sarana kesehatan baik untuk POSYANDU, pustu, puskesmas dan rumah sakit, karena sesuai *baseline* 2023 ketersediaan sarana kesehatan sudah mencukupi dibandingkan jumlah sarana kesehatan yang harus tersedia pada setiap lima tahunnya. Khusus untuk fasilitas puskesmas pada tahun 2025-2045 diproyeksi sesuai dengan jumlah wilayah administrasi kecamatan berdasarkan Permenkes No. 43 Tahun 2019 yaitu setiap kecamatan memiliki minimal 1 (satu) puskesmas. Oleh sebab itu, berdasarkan jumlah kecamatan tahun 2023, maka jumlah puskesmas selama periode 2025-2045 sebanyak 32 unit dan jumlahnya harus disesuaikan dengan jumlah kecamatan apabila ada penambahan atau pengurangan kecamatan ke depannya.

Tabel 43: Hasil Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Awal 2023	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	474.521	488.000	521.280	553.700	594.310	639.410
POSYANDU (Unit)	781	390	417	443	475	512
Pustu (Unit)	240	16	17	18	20	21
Puskesmas (Unit)	37	32	32	32	32	32
Rumah Sakit (Unit)	4*	2	2	2	2	3

Sumber: BAPPEDA TTS, 2024

* Termasuk 2 unit RS Pratama

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan sarana pendidikan selama periode 2025-2045 tidak dibutuhkan penambahan sarana untuk PAUD/TK, SD/ sederajat dan SMP/ sederajat karena sesuai *baseline* 2023 ketersediaan sarana sudah mencukupi dibandingkan jumlah sarana yang

harus tersedia pada setiap lima tahunnya. Sarana pendidikan yang perlu ditambah adalah untuk tingkat pendidikan SMA/ sederajat. Pada tahun 2025 102 unit dan tahun 2045 dibutuhkan 133 unit.

Tabel 44: Hasil Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Awal 2023	Kebutuhan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	474.521	488.000	521.280	553.700	594.310	639.410
PAUD/TK (Unit)	855	390	417	443	475	512
SD/Sederajat (Unit)	544	305	326	346	371	400
SMP/Sederajat (Unit)	197	102	109	115	124	133
SMA/Sederajat (Unit)	93	102	109	115	124	133

Sumber: BAPPEDA TTS, 2024

2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Kondisi kewilayahan Kabupaten TTS dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahun 2023 Kabupaten TTS memiliki jumlah penduduk 474.521 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,41%. Pada tahun 2045 proyeksi jumlah penduduk Kabupaten TTS akan menjadi sebanyak 639.410 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat akan membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan kebutuhan dasar di seluruh wilayah Kabupaten TTS.

Dalam pembangunan wilayah, adanya penyediaan infrastruktur (konektivitas, energi dan sarana prasarana dasar) menjadi faktor pendorong yang penting dan memerlukan adanya fokus dan kekuatan fiskal daerah. Akan tetapi pembangunan dalam dan antar wilayah di Kabupaten TTS masih kurang merata terutama terkait dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur masih terpusat pada kawasan-kawasan strategis di Kabupaten TTS, pusat-pusat pemerintahan di kecamatan serta kantong-kantong kemiskinan ekstrem maupun *stunting*.

Pengembangan wilayah di Kabupaten TTS berdasarkan hirarki perkotaan terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) SoE, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) Niki-niki, Panite, Kapan dan OeEkam, Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) Oebobo, Siso, Pusu, Oinlasi, Kualin, Kolbano, Kuanfatu, Napi, Polen, Boking, Nunkolo dan Ayotupas serta Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL) Oepliki, Nunbena, Nunuhkniti, Noebana, Fatumnasi, Tobu, Salbait, Binaus, Tetaf, Kot'olin, Lotas, Toianas, Oenino, Nunfutu dan Santian, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna mempercepat pertumbuhan wilayah. Dalam pengembangan wilayah berdasarkan hirarki tersebut masih diperlukan adanya dukungan peningkatan infrastruktur dasar

perkotaan dan perdesaan, peningkatan konektivitas penghubung antar kawasan pada kawasan yang masih tertinggal, terisolir, daerah perbatasan serta peningkatan ekonomi melalui sektor unggulan.

Dalam hal penyediaan aksesibilitas (konektivitas desa kota dan aksesibilitas jalan) melalui upaya pembangunan ruas jalan guna meningkatkan aksesibilitas di beberapa kecamatan dan desa strategis. Upaya ini belum mampu meningkatkan distribusi dan pola pergerakan sehingga masih diperlukan dukungan pembangunan maupun peningkatan aksesjalur penghubung antar PKW, PKLp, PPK dan PPL khususnya untuk mendukung jalur distribusi hulu-hilir yang mendukung kegiatan perekonomian di Kabupaten TTS.

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten TTS disusun dengan mengacu pada RTRW. Tujuan penataan ruang dalam pengembangan wilayah Kabupaten TTS adalah mewujudkan kabupaten yang berdaya saing berbasis pada pengembangan pertanian, peternakan, perdagangan, jasa dan pariwisata yang berkelanjutan menuju masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Guna mewujudkan tujuan tersebut dirumuskan arah kebijakan dan strategi penataan ruang di Kabupaten TTS sebagai berikut:

- (1) Pemantapan dan perwujudan konstelasi pusat kegiatan kabupaten yang berhierarki, PKW SoE, PKLp Niki-niki, Panite, Kapan dan OeEkam, PPK Oebobo, Siso, Pusu, Oinlasi, Kualin, Kolbano, Kuanfatu, Napi, Polen, Boking, Nunkolo dan Ayotupas serta PPL yakni Oepliki, Nunbena, Nunuhkniti, Noebana, Fatumnasi, Tobu, Salbait, Binaus, Tetaf, Kot'olin, Lotas, Toianas, Oenino, Nunfutu dan Santian, melalui pengembangan sistem pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata di perkotaan dan perdesaan guna mempercepat pertumbuhan wilayah, yang meliputi:
 - a. Pengembangan perkotaan Soe sebagai PKW dengan fungsi pemerintahan sekaligus menjadi pusat pengembangan;
 - b. Pemantapan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki dengan membentuk PKW, PKLp, PPK dan PPL;
 - c. Mempersiapkan dan mengembangkan Perkotaan SoE, Batuputih, Niki-niki sebagai perkotaan yang menunjang perkembangan kawasan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata;
 - d. Mempersiapkan dan mengembangkan Kecamatan Kolbano sebagai kawasan pengembangan pelabuhan laut; dan
 - e. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis.
- (2) Pengoptimalan kinerja dan jangkauan pelayanan prasarana utama (pelayanan sistem jaringan prasarana transportasi darat, transportasi laut dan penyeberangan) yang diprioritaskan untuk mendukung pusat pertumbuhan perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata, meliputi:

- a. Mengembangkan aksesibilitas prasarana utama terutama pada wilayah pusat perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata guna memicu perkembangan wilayah;
 - b. Mengembangkan jalan, memantapkan fungsi terminal angkutan dalam dan luar wilayah serta menata dan mengatur trayek angkutan sebagai upaya memperlancar pergerakan dan distribusi barang dan jasa hasil produksi wilayah;
 - c. Meningkatkan jangkauan pelayanan sistem transportasi darat dan laut guna kelancaran simpul transportasi lintas Pulau Timor; dan
 - d. Meningkatkan pelayanan sistem transportasi laut meliputi pelabuhan pengumpul yang melayani pergerakan antar pulau.
- (3) Pengoptimalan jangkauan pelayanan system prasarana lainnya (telekomunikasi, energi, sumber daya air, persampahan, drainase dan sanitasi) untuk mendukung pengembangan wilayah, yang meliputi:
- a. Peningkatan jangkauan pelayanan prasarana telekomunikasi yang merata sampai ke wilayah pelosok desa guna keterjangkauan informasi dan untuk pengembangan wilayah;
 - b. Peningkatan jangkauan pelayanan sistem prasarana energi listrik yang merata sampai ke wilayah pelosok desa guna perluasan jaringan distribusi tenaga listrik;
 - c. Peningkatan dan pengoptimalan penyediaan sumber daya air yang berkualitas, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kegiatan pertanian;
 - d. Peningkatan pelayanan sistem prasarana persampahan terutama pada kawasan permukiman dengan menerapkan teknologi pengelolaan terpadu (*controlled landfill* dan *sanitary landfill*) dengan prinsip-prinsip “3R” (*reduce, reuse, recycle*);
 - e. Penataan sistem prasarana drainase, untuk kenyamanan kota dan antisipasi bencana banjir dan longsor; dan
 - f. Pengembangan sistem prasarana sanitasi di wilayah perkotaan dan pedesaan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
- (4) Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumber daya alam/buatan dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang penelitian, dan edukasi yang meliputi:
- a. Pemantapan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup;
 - b. Pemantapan fungsi kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

- c. Pemantapan fungsi dan nilai manfaa kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar alam; dan
 - d. Pemantapan kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung.
- (5) Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan sistem sentra pertanian, peternakan dan pariwisata dengan tetap mengembangkan sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung pertumbuhan perekonomian wilayah yang meliputi:
- a. Pengembangan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
 - b. Peningkatan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan, peluang ekstensifikasi pengembangan kawasan pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan pertanian, peternakan dari bahan mentah menjadi makanan dan sejenisnya;
 - c. Pengembangan peternakan di wilayah kabupaten hanya pada intensifikasi pada areal peternakan yang telah ada;
 - d. Pengembangan kawasan perikanan berupa peningkatan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan serta peningkatan nilai tambah beberapa komoditi yang potensial;
 - e. Pengembangan potensi pertambangan secara berkelanjutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan mengutamakan segi pelestarian lingkungan;
 - f. Pengembangan kawasan industri lebih difokuskan pada pengelolaan agroindustri sebagai sektor pendukung pengembangan perekonomian wilayah kabupaten; dan
 - g. Penentuan wisata unggulan daerah, pelestarian lingkungan, promosi, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan daya jual/saing.
- (6) Pengoptimalan pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagai kawasan prioritas tumbuh dan berkembang berbasis pada perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan dan pariwisata yang meliputi:
- a. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yakni kawasan agropolitan, minapolitan, ketahanan pangan, agro-ekowisata dan kawasan cepat tumbuh perkotaan Batuputih dan perkotaan Niki-niki;
 - b. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yakni kawasan konservasi Cagar Alam Mutis Timau di Kecamatan Fatumnasi dan Tobu dan Kawasan Cagar Alam Laut di Kecamatan Kualin dan Amanuban Selatan;

- c. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya yakni kawasan perkampungan adat Boti dan kawasan perbatasan Lotas, Besnam, Tumu, Niti, Sapnala, Kol'oto, Benahe, dan O'baki; dan
 - d. Pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya.
- (7) Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan pesisir untuk meningkatkan kualitas lingkungan pesisir pantai dan sebagai sektor pendukung wisata yang meliputi:
- a. Pengembangan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di Kabupaten;
 - b. Pelestarian dan Penyelamatan ekosistem kawasan pesisir yang ada ataupun yang sudah mengalami alih fungsi dengan pembatasan pengembangan kawasan demi kelestarian ekosistem alam serta pemberian zona penyangga minimal 500 meter dari garis pantai ke arah laut;
 - c. Peningkatan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan hutan bakau dan kawasan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan; dan
 - d. Menghindari pembukaan areal tambak baru pada hutan mangrove.
- (8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara yang meliputi:
- a. Mendukung penetapan kawasan strategi nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategi nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategi nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategi nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun;
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara dan daerah.

Arahan penataan ruang di Kabupaten TTS berdasarkan RTRW Kabupaten TTS terbagi menjadi arahan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Salah satu wujud penataan ruang adalah struktur ruang. Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang wilayah memuat

sistem pusat permukiman yang menetapkan fungsi Kawasan perkotaan untuk melayani kegiatan dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kecamatan. Sistem pusat permukiman yang ada pada rencana tata ruang terbagi menjadi meliputi:

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:

a. sistem kegiatan kabupaten;

Rencana sistem kegiatan Kabupaten meliputi:

- 1) Sistem permukiman terdapat 278 desa/kelurahan dan 20 desa persiapan.
- 2) Sistem pusat-pusat kegiatan.

Rencana pusat kegiatan di Kabupaten TTS sesuai arahan RTRW sebagai berikut:

- PKW perkotaan SoE sebagai pusat pemerintahan skala Kabupaten, pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pendidikan dan kesehatan.
- PKLp perkotaan Niki-niki, perkotaan Panite, perkotaan Kapan dan perkotaan OeEkam Kecamatan Amanuban Timur sebagai pusat perdagangan dan jasa, pariwisata dan industri.
- PPK perkotaan Oebobo Kecamatan Batuputih, perkotaan Siso Kecamatan Mollo Selatan, perkotaan Pusu Kecamatan Amanuban Barat, perkotaan Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan, perkotaan Kualin Kecamatan Kualin, perkotaan Kolbano Kecamatan Kolbano, perkotaan Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu, perkotaan Napi Kecamatan KiE, perkotaan Polen Kecamatan Polen, perkotaan Boking Kecamatan Boking, perkotaan Nunkolo Kecamatan Nunkolo, perkotaan Ayotupas Kecamatan Amanatun Utara sebagai pusat perikanan, pertanian dan perkebunan, peternakan dan pariwisata.
- PPL perkotaan Oepliki Kecamatan Noebeba, perkotaan Nunbena Kecamatan Nunbena, perkotaan Nunuhkniti Kecamatan Fautmolo, perkotaan Noebana Kecamatan Noebana, perkotaan Fatumnasi Kecamatan Fatumnasi, perkotaan Tobu Kecamatan Tobu, perkotaan Salbait Kecamatan Mollo Barat, perkotaan Binaus Kecamatan Mollo Tengah, perkotaan Tetaf Kecamatan Kuantnana, perkotaan Kot'olin Kecamatan Kot'olin, perkotaan Lotas Kecamatan Kok'baun, perkotaan Toianas Kecamatan Toianas, perkotaan Oenino Kecamatan Oenino, perkotaan Nunfutu Kecamatan Fatukopa dan perkotaan Santian Kecamatan Santian, sebagai pusat pertanian dan perkebunan, peternakan dan pariwisata; dan

b. sistem jaringan prasarana utama

Sistem jaringan prasarana utama merupakan sistem jaringan transportasi yang meliputi: sistem jaringan transportasi darat dan sistem jaringan transportasi laut.

Rencana sistem jaringan prasarana utama khususnya jaringan transportasi darat sesuai arahan RTRW sebagai berikut :

- jaringan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan jaringan layanan lalu lintas dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi kawasan lindung;
- jaringan jalan strategis nasional, ruas jalan Batuputih–Panite; ruas jalan Panite–Kolbano; ruas jalan Kolbano–Boking; dan ruas jalan Boking–Wanibesak.
- jaringan jalan arteri primer yang ada di Kabupaten, meliputi:ruas jalan Batuputih–Batas Kota SoE; Jalan Gajahmada-Soe; Jalan Sudirman-Soe; Jalan Diponegoro-Soe; Jalan Ahmad Yani-Soe; ruas jalan Batas Kota SoE–Niki-niki; dan ruas jalan Niki-niki–Noelmuti.
- jaringan jalan kolektor primer (K2), yang ada di Kabupaten, meliputi: ruas jalan Soe–Kapan; ruas jalan Kapan–Eban; ruas jalan Kapan–Nenas; ruas jalan Nenas–Sutual; ruas jalan Sutual–Noelelo; ruas jalan Sp. Niki-niki-Oinlasi; dan ruas jalan Oinlasi–Boking.
- jaringan jalan prioritas penanganan menghubungkan PKW SoE dengan PKLp Panite, OeEkam, Niki-niki, Kapan serta antar kawasan strategis Kabupaten;
- jaringan jalan lokal primer yang ada di Kabupaten, melayani perkembangan internal antar wilayah kecamatan dalam wilayah Kabupaten; dan
- jaringan jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan lebih lanjut akan dirinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan barang;
- jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal tipe B di perkotaan Soe sebagai PKW dan terminal tipe C di Kapan-Kecamatan Mollo Utara, Panite-Kecamatan Amanuban Selatan, OeEkam-Kecamatan Amanuban Timur, Niki-niki-Kecamatan Amanuban Tengah, Oinlasi-Kecamatan Amanatun Selatan dan Kolbano Kecamatan Kolbano.
- jaringan layanan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu trayek angkutan penumpang meliputi angkutan kota dalam provinsi meliputi trayek Kota SoE–Kupang, Kota SoE–Kefamenanu, Kota SoE–Atambua dan angkutan kota dan angkutan perdesaan.
- jaringan transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) meliputi Pelabuhan Boking di Kecamatan Boking dan Pelabuhan Kolbano di Kecamatan Kolbano.

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut meliputi tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran. Tatanan kepelabuhanan meliputi pelabuhan pengumpan Lokal Boking di Kecamatan Boking

dan pelabuhan pengumpul Kolbano di Kecamatan Kolbano. Sedangkan alur pelayaran meliputi Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Atapupu, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Wini, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Maritaing Alor, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Waiwadan Larantuka, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Lewoleba, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Maumere, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Makasar, dan Pelabuhan Kolbano–Pelabuhan Tanjung Perak.

c. sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

1) Sistem Jaringan energi

- Sistem jaringan energi meliputi pembangkit listrik: Gardu Induk Nonohonis, terdapat di Kecamatan Kota SoE dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV, jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 150 KV menghubungkan Kota SoE- Kefamenanu-Atambua, jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan tegangan 70 KV yang menghubungkan Maulafa-Kota SoE-Kefamenanu-Atambua.
- Pengembangan jaringan listrik energi baru terbarukan yang direncanakan pada Kabupaten meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) terdapat di Kota SoE dan di Kecamatan Nunkolo; Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melayani daerah telisolir; dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Nenas Kecamatan Fatumnasi, Desa Oel'Ekam dan Desa Oehala Kecamatan Mollo Tengah dan Desa Op Kecamatan Nunkolo.

2) Sistem Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi meliputi sistem jaringan kabel, sistem jaringan nirkabel dan sistem jaringan satelit yang tersebar di kabupaten TTS.

3) Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air meliputi Wilayah Sungai (WS), CAT, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air bersih, sistem pengendali banjir, erosi dan longsor dan sistem pengamanan pantai yang tersebar di Kabupaten TTS dan khusus untuk wilayah sungai dan CAT terdiri dari wilayah sungai benenain dan noelmina, CAT SoE, CAT Mina, CAT Oemeu dan CAT Besikama.

4) Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas sistem jaringan air minum, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan air limbah dan sanitasi, sistem jaringan drainase dan jalur evakuasi bencana yang tersebar di wilayah Kabupaten TTS.

2. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.

- a) Kawasan hutan lindung kabupaten tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Fatumnasi, Kecamatan Nunbena, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Amanuban Barat, Kecamatan Noebeba, Kecamatan Amanuban Tengah, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kualin, Kecamatan Mollo Selatan, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Boking, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Amanuban Timur, Kecamatan Santian, Kecamatan Toianas, Kecamatan Fatukopa, Kecamatan Mollo Barat dan Kecamatan Mollo Tengah.
- b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air Mutis terdapat di Kecamatan Toianas, Kecamatan Amanatun Utara, Kecamatan Noebeba, Kecamatan Boking, Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan KiE, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Batuputih, Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Tobu, Kecamatan Mollo Tengah, Kecamatan Fatumnasi dan Kecamatan Mollo Utara.
- c) Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten TTS khususnya pada daerah dengan kemiringan 15% sampai dengan 45%.
- d) Kawasan Perlindungan Setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai kawasan sekitar danau/waduk kawasan sekitar mata air dan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.
- e) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya meliputi kawasan suaka margasatwa, kawasan cagar alam, kawasan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman wisata alam dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
 - Kawasan suaka margasatwa yaitu Kawasan Suaka Margasatwa Ale Aisio di Kecamatan Amanuban Selatan Kecamatan Kualin dan Kecamatan Noebeba dan Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Kecamatan Amanuban Selatan (Desa Bena dan Oebelo)

- serta Kecamatan Kualin (Desa Toineke dan Tuafanu).
- Kawasan cagar alam yaitu kawasan Cagar Alam Mutis Timau di Kecamatan Fatumnasi dan Kecamatan Tobu.
 - Kawasan cagar alam laut yakni kawasan Cagar Alam Laut di Kecamatan Amanuban Selatan dan Kecamatan Kualin.
 - Kawasan pantai berhutan bakau terdapat di Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kualin, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Kot'olin dan Kecamatan Boking.
 - Kawasan taman wisata alam meliputi kawasan pariwisata Hutan Gunung Mutis Kecamatan Fatumnasi, kawasan pariwisata Kecamatan Fatumnasi, kawasan Air terjun Oehala di Kecamatan Mollo Selatan, kawasan pantai Kolbano Kecamatan Kolbano, kawasan Pantai Oetune Kecamatan Kualin dan kawasan rekreasi Bu'at Kecamatan Mollo Selatan.
 - Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi kawasan kampung tradisional Boti di Kecamatan KiE dan pusat kerajaan Amanuban, Mollo dan Amanatun.
 - Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan banjir dan kawasan rawan gelombang pasang. Yang tersebar di Kabupaten TTS dan khusus untuk gelombang pasang meliputi kecamatan di sepanjang pantai selatan yaitu Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Nunkolo, Kecamatan Boking dan Kecamatan Toianas.
- f) Kawasan Lindung Geologi meliputi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi :
- Kawasan cagar alam geologi yaitu kawasan bentang alam Fatukopa di Kecamatan Fatukopa
 - Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar di Kabupaten TTS;
 - kawasan rawan tsunami terdapat di Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Nunkolo dan Kecamatan Boking,
 - kawasan rawan abrasi terdapat di Kecamatan Kualin, Kecamatan Kolbano, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Kot'olin, Kecamatan Nunkolo dan Kecamatan Boking.
- g) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terdiri dari kawasan imbuan air tanah dan kawasan sempadan mata air yang meliputi :
- kawasan imbuan air tanah pada daerah sebaran batu gamping dan endapan alluvial, terdapat di Kecamatan Amanuban Timur, Amanuban Barat, Amanuban Selatan, Fatukopa, Polen, Kualin,

Boking, Toianas, Fatumnasi, Mollo Tengah, Mollo Selatan dan Kecamatan Tobu,

- kawasan sempadan mata air yang tersebar di seluruh Kabupaten TTS.
- h) Kawasan lindung lainnya yaitu kawasan perlindungan plasma nutfah yang terdapat di Kecamatan Amanuban Selatan dan Kecamatan Kualin.

Kawasan Budidaya meliputi kawasan kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan lainnya, dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas yang tersebar di wilayah :
- Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Polen, Kecamatan Oenino, Kecamatan Kuantnana, Kecamatan KiE, Kecamatan Amanuban Timur, Kecamatan Fautmolo dan Kecamatan Fatukopa.
 - Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Kota SoE, Kecamatan Mollo Selatan dan Kecamatan Mollo Tengah.
- b. Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya peternakan yang tersebar di seluruh Wilayah kabupaten TTS.
- c. Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap yang tersebar di sepanjang pantai selatan Kabupaten TTS yang meliputi Kecamatan Amanuban Selatan, Kualin, Kolbano, Kot'olin, Nunkolo dan Boking serta kawasan peruntukan perikanan budidaya dan kawasan pengolahan ikan yang tersebar di Kabupaten TTS.
- d. Kawasan peruntukan pertambangan meliputi kawasan peruntukan pertambangan mineral dan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di seluruh Kabupaten TTS.
- e. Kawasan Peruntukan Industri meliputi kawasan peruntukan industri dan kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga (Industri pengolahan tanaman pangan dan industri tenun ikat) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTS.
- f. Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi kawasan peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata budaya termasuk wisata religi dan kawasan peruntukan pariwisata buatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTS.
- g. Kawasan peruntukan permukiman, meliputi kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman

perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTS.

- h. Kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yang terdiri dari kompleks markas Komando Distrik Militer (KODIM) 1621 di Kecamatan Kota SoE, kompleks markas Kepolisian Resor (POLRES) Timor Tengah Selatan di Kecamatan Kota SoE, kompleks markas Komando Rayon Militer (Koramil) yang berada di setiap kecamatan, dan kompleks markas Kepolisian Sektor (POLSEK) yang berada di setiap kecamatan.
- i. Kawasan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan dan pengembangan potensi perikanan di wilayah pesisir pada ekosistem terumbu karang, padang lamun (*seagrass*) dan mangrove yang perlu dilestarikan.

Kawasan strategis meliputi kawasan strategis provinsi yang meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu kawasan Mutis di Kecamatan Fatumnasi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan taman nasional perairan laut sawu di Kecamatan Amanuban Selatan dan Kualin serta Kawasan Noelmina. Kawasan strategis lainnya, yaitu kawasan strategis sosial budaya suku terasing Boti di Kecamatan Ki'e.

Kawasan Strategis Kabupaten meliputi strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari kawasan strategis cepat tumbuh, kawasan strategis agropolitan, kawasan strategis minapolitan perikanan tangkap dan budidaya, kawasan strategis ketahanan pangan dan kawasan strategis agro-ekowisata yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTS. Selain kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis kabupaten lainnya, yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten TTS.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. PERMASALAHAN

Permasalahan merupakan kesenjangan yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Kesenjangan yang terjadi dipengaruhi beberapa faktor baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan, yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan daerah makro yang sifatnya lintas sektor dan yang akan diintervensi melalui kolaborasi pembangunan lintas sektor. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mencakup aspek geografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, pelayanan umum dan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJPD Tahun 2005-2025. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang masih relevan dalam dua puluh tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a) Geografi

Permasalahan pembangunan daerah pada aspek geografi meliputi:

1. Perubahan Iklim

Permasalahan dari dampak perubahan iklim adalah terjadinya perubahan suhu dan anomali pola cuaca yang tidak menentu sehingga cuaca sulit diprediksi. Akibat dari perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya potensi bencana, kebakaran hutan, banjir, longsor, kekeringan, kelangkaan air bersih, hal ini juga berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur dasar, tingkat kesehatan masyarakat, menimbulkan permasalahan sosial dan menurunnya produksi dan produktifitas pertanian.

2. Sumber daya air

Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air disebabkan oleh topografi yang berbukit bukit, persebaran sumber air yang tidak merata dan kurangnya sarana tampungan air baku. Selain itu di Kabupaten Timor Tengah Selatan juga terjadi peningkatan pemanfaatan air tanah yang berpotensi mempercepat terjadinya penurunan tanah dan muka air tanah. Penurunan tanah merupakan salah satu ancaman bencana yang terjadi dalam waktu yang relatif lama (*silent killer*) namun terdampak cukup luas yang umumnya terjadi dipemukiman masyarakat. Untuk itu pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah harus tetap dilaksanakan untuk menurunkan laju penurunan tanah dan muka air tanah terutama pada wilayah cekungan air tanah (CAT) Zona Rusak.

3. Tutupan lahan

Penurunan kualitas lahan diakibatkan adanya peningkatan eksploitasi lahan secara berlebihan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan. Di sisi lain, beberapa tekanan lingkungan di Kabupaten Timor Tengah Selatan antara lain seperti perubahan tata guna lahan yang menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati. Tekanan lingkungan hidup di Kabupaten Timor Tengah Selatan ditunjukkan melalui indikator indeks kualitas lingkungan hidup. Salah satu permasalahan tutupan lahan adalah alih fungsi kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan dan pemanfaatan hutan yang belum optimal.

4. Kebencanaan

Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Timor Tengah Selatan selama tahun 2019-2023 termasuk kategori risiko tinggi untuk kebencanaan. Dengan beberapa faktor penyebab yaitu kondisi topografi, geologi dan perubahan iklim. Kabupaten Timor Tengah Selatan didominasi oleh bencana alam karena cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir dan kekeringan. Penanggulangan bencana (mitigasi dan penanganan pasca bencana) perlu menjadi perhatian karena terjadi berulang setiap tahun dan merupakan isu yang erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.

5. Ketahanan pangan

Memperhatikan nilai Indeks Ketahanan Pangan maka Kabupaten TTS berada pada kategori agak tahan (>59,58-67,75). Kondisi ketahanan pangan secara umum sangat berkaitan dengan perubahan iklim sehingga mempengaruhi pola dan waktu tanam yang pada akhirnya akan berpengaruh pada produksi tanaman.

6. Ketahanan Energi

Memperhatikan rasio elektrifikasi total Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai tahun 2023 adalah 82,99% (rasio elektrifikasi PLN sebesar 75,73% dan rasio elektrifikasi non PLN sebesar 7,26%) maka masih terdapat wilayah di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang belum terakses jaringan listrik sehingga berpengaruh pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kependudukan. Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki potensi energi baru terbarukan namun dalam pengembangannya terkendala pada tingginya nilai investasi dan permasalahan sosial.

b) Demografi

Penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut jumlah dan struktur serta komposisi menunjukkan bahwa belum cukup baik merujuk pada belum optimalnya komposisi dan piramida penduduk. Komposisi penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan didominasi oleh penduduk perempuan, sedangkan berdasarkan kelompok umur penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan didominasi oleh penduduk usia 10-14 tahun, dengan demikian 5-10 tahun kedepan diharapkan Kabupaten Timor Tengah Selatan masuk dalam fase bonus demografi. Berdasarkan angka ketergantungan

tahun 2023 sebesar 55,09 yang artinya 100 penduduk usia produktif menanggung 55 penduduk usia non produktif.

3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan meliputi:

1. Kesejahteraan ekonomi

Kesejahteraan ekonomi yang dapat ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, indeks gini, angka kemiskinan, prevalensi *stunting*, TPT dan IPM. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB terus meningkat setelah berakhirnya pandemi Covid-19 yakni pada tahun 2023 sebesar 3,21% walaupun angka ini masih relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional serta dibandingkan dengan angka pertumbuhan sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh sebesar 5%. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang cukup tinggi menjadi masalah yang dihadapi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dimana pada tahun 2019 sebesar 1,94% dan meningkat menjadi 2,64% pada tahun 2023 akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, lapangan kerja yang terbatas dan terbatasnya sumber daya alam.

Angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan ini menjadi permasalahan utama dalam pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan . Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2023 sebesar 25,18% dengan rata-rata penurunan sebesar 1,99% dan persentase penduduk miskin ekstrem tahun 2022 sebesar 13,01% serta prevalensi *stunting* tahun 2023 sebesar 22,03%. Persentase penurunan angka kemiskinan berkaitan erat dengan indeks gini yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya indeks pada tahun 2023 sebesar 0,284.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2023 sebesar 63,58 dan nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM provinsi NTT sebesar 66,68 dan nasional sebesar 74,39. Kesenjangan yang cukup besar menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat bersaing pada era Indonesia Emas tahun 2045.

2. Kesejahteraan sosial budaya

Kesejahteraan sosial budaya yang masih menjadi permasalahan adalah indeks keluarga sehat khususnya pada indikator pemakaian alat/cara KB, pada tahun 2023 terdapat 60,4% perempuan yang tidak menggunakan alat KB, sehingga mengakibatkan kehamilan yang tidak direncanakan, tingginya angka kelahiran, tingginya resiko kesehatan ibu dan tingginya beban keluarga.

Permasalahan lainnya dari aspek kesejahteraan sosial budaya adalah pada Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Pemberdayaan Gender. Tahun 2022 nilai IPA Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 45,54. Nilai IPA Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukkan tingkat capaian pembangunan perlindungan anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,

kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus masih rendah. Data komponen IDG Kabupaten Timor Tengah Selatan selama tahun 2019-2023 menunjukkan adanya peningkatan pada 2 komponen yaitu keterlibatan perempuan di parlemen dan keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional sedangkan komponen sumbangan pendapatan perempuan cenderung menurun dengan persentase pada tahun 2022 sebesar 28,77%.

3.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan global. Namun Kabupaten Timor Tengah Selatan masih menghadapi sejumlah permasalahan dari aspek daya saing daerah yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi antara lain:

3.1.3.1. Daya Saing Ekonomi

a) Struktur Perekonomian

Kabupaten Timor Tengah Selatan masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kontribusinya masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan berbagai sektor lain, dimana kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2023 sebesar 45,92% terhadap total PDRB Kabupaten Timor Tengah Selatan. Meskipun sangat bergantung pada sektor ini, namun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki nilai tambah yang rendah. Sementara sektor tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dalam menciptakan *multyplier effect* bagi perekonomian daerah.

b) Rendahnya kontribusi sektor Industri pengolahan

Kabupaten Timor Tengah Selatan masih didominasi oleh masyarakat agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduk. Dengan potensi sumber daya yang ada, masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan dari sektor agraris menjadi sektor industri. Namun Sektor pengolahan industri di Kabupaten TTS belum dikembangkan secara optimal, dimana kontribusi sektor pengolahan industri hanya sebesar 0,66% pada tahun 2023 terhadap PDRB Kabupaten Timor Tengah Selatan. Angka ini menunjukkan bahwa masih sangat bergantung pada hasil olahan dari daerah lain.

c) Rendahnya sektor penyediaan akomodasi dan makan minum

Kabupaten Timor Tengah Selatan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Timor memiliki banyak potensi wisata dan menjadi daerah transit antar kabupaten yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah, salah satunya melalui penyediaan akomodasi dan makan minum. Namun kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih sangat rendah yakni sebesar 0,08% terhadap PDRB Kabupaten Timor Tengah Selatan . Keadaan ini masih belum sejalan dengan misi daerah untuk menciptakan

pariwisata 5A sebagai penggerak ekonomi daerah (khususnya *accomodation*).

d) Rendahnya PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Timor Tengah Selatan masih rendah dibanding propinsi dan nasional. PDRB perkapita Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2023 sebesar 20,01 juta, sedangkan PDRB perkapita Provinsi NTT sebesar 23,07 juta. Hal ini menunjukkan bahwa daya saing ekonomi Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Provinsi NTT masih rendah walaupun mengalami peningkatan, namun masih berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

e) Belum optimalnya pembangunan ekonomi inklusif

Faktor penghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah belum optimalnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari komponen pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif, dimana pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tahun 2019-2021 sebesar 3,81-4,00, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan sebesar 5,45-5,73 dan pengurangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan sebesar 5,18-5,17.

f) Pembangunan ekonomi hijau

Belum optimalnya pembangunan ekonomi hijau diakibatkan karena koordinasi lintas sektor masih rendah, kurang tersedianya perangkat aturan terkait, sumberdaya alam yang terbatas, rendah kualitas sumberdaya manusia serta daya lingkungan yang rendah.

3.1.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

a) Rendahnya literasi dan numerasi siswa di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Daya saing suatu daerah tergambar dari kualitas sumber daya manusia yang diukur dari keterampilan atau kemampuan setiap orang untuk mengaplikasikan kemampuan dalam membaca dan menulis serta kemampuan untuk memahami, menggunakan dan berinteraksi dengan angka serta konsep menghitung dalam kehidupan sehari-hari dimana pada tahun 2023, terdapat 31% peserta didik tingkat SD dan 21% peserta didik tingkat SMP di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah mencapai standar kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Sedangkan untuk kompetensi numerasi, terdapat 24% peserta didik tingkat SD dan 17% peserta didik tingkat SMP di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah mencapai standar kompetensi minimum untuk numerasi. Sesuai kategori tingkat aktivitas literasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud maka nilai angka literasi dan numerasi Kabupaten TTS masuk dalam kategori rendah (20,01–40,00).

b) Rendahnya indeks literasi digital di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Kemampuan literasi digital diukur melalui indeks literasi digital, dimana pada tahun 2022 Indeks literasi digital Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 3,29, hal ini menunjukkan bahwa Indeks Literasi Digital masih rendah dimana pengetahuan serta

kecakapan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya masih rendah.

- c) Belum optimalnya kontribusi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Perkembangan TPAK Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2019-2023 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,40%. Peningkatan TPAK Kabupaten Timor Tengah Selatan berada di atas persentase TPAK Provinsi NTT dan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang dapat terlibat secara aktif secara ekonomi di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan namun hal ini berbanding terbalik terhadap peningkatan ekonomi karena rendahnya kualitas tenaga kerja.

- d) Tingginya angka ketergantungan

Angka ketergantungan di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2019 sebesar 74,63% dan menjadi 55,09% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan penduduk usia produktif dan tidak produktif di Kabupaten TTS selama 5 tahun terakhir didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Dimana setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 55 orang penduduk usia non produktif.

3.1.3.3. Rendahnya Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih rendah, dimana pada tahun 2023 panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 52,35%, Penduduk dengan sumber air minum layak sebesar 60,66%, sanitasi layak sebesar 61,83%, Persentase Rumah Layak Huni sebesar 64,68%, prasarana pengelolaan sampah sebanyak 5 unit truk angkut sampah, 1 unit motor angkut sampah yang akan mengangkut sampah pada 28 unit TPS untuk dikelola di 1 Unit TPA, 1 Unit TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan 56 unit pasar yang tersebar pada 32 kecamatan.

3.1.3.4. Rendahnya Daya Saing Iklim Investasi

Daya Saing iklim investasi kabupaten Timor Tengah Selatan masih rendah dimana pada tahun 2023 nilai IDSD sebesar 2,12 dan berada pada kategori sedang dengan interval 2,51-3,75. Nilai investasi di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2023 sebesar Rp.42 miliar dari investor dalam negeri dan asing dengan jumlah investor sebanyak 141 investor. Permasalahan yang menghambat iklim investasi daerah antara lain: belum teridentifikasi dan terekplorasi potensi sumberdaya alam dan permasalahan sosial lainnya.

3.1.4. Aspek Pelayanan umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik alam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan umum di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih belum optimal yang terlihat melalui beberapa hal antara lain belum optimalnya pelayanan publik, belum optimalnya Indeks Inovasi daerah, Belum optimalnya

penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), belum optimalnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

a) Belum optimalnya pelayanan publik

Pelayanan Publik belum optimal, dimana pada tahun 2021 nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kategori C (cukup), dengan mempertimbangkan 6 aspek penilaian yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan.

b) Belum optimalnya Pengembangan Inovasi daerah

Belum optimalnya inovasi daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana pada tahun 2023, nilai IID sebesar 37,47 dan masuk dalam kategori Inovatif. Permasalahan dihadapi walaupun masuk dalam kategori inovatif namun inovasi-inovasi yang sudah dibuat belum dimanfaatkan secara optimal.

c) Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

d) Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami peningkatan sesuai data 3 tahun terakhir namun masih berada di bawah nilai provinsi dan nasional, dimana pada tahun 2021 sebesar 2,26 berada pada kategori Cukup (rentang nilai 1,8 – 2,6), sedangkan tahun 2022 dan 2023 dengan nilai 2,61 dan 2,62 berada pada kategori Baik (rentang nilai 2,6 – 3,5). Hal ini diakibatkan karena terbatasnya dukungan anggaran, SDM, sarana prasarana.

e) Belum optimalnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik namun perlu di optimalkan sehingga integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga mengalami peningkatan dari tahun 2023 (kategori Baik (rentang nilai >60-70)) dengan meningkatkan mutu dokumen perencanaan dan penggaran, mutu laporan kinerja dan mutu pelaksanaan system akuntabilitas keuangan.

f) Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Belum optimalnya Nilai Indeks RB Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2023 dengan kategori Cukup (rentang nilai >50-60), dimana masih berada di bawah Provinsi NTT yang berada pada kategori Baik, diakibatkan oleh belum optimalnya pengelolaan organisasi yang meliputi unsur tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir serta budaya kerja.

g) Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih rendah dimana pada tahun 2023 persentase penerapan SPM sebesar 52,15% antara lain SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketentraman,

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan SPM Sosial. Rendahnya SPM di Kabupaten Timor Tengah Selatan di akibatkan oleh penganggaran tidak berperspektif SPM, kebijakan berperspektif, keterbatasan anggaran, kurangnya ketaatan dalam menginput laporan pada aplikasi SPM Bina Bangda Kemendagri.

3.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, provinsi dan kabupaten) dan potensi yang dimiliki Kabupaten Timor Tengah Selatan yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Berikut merupakan uraian dari isu-isu yang terjadi pada tingkat global, nasional provinsi maupun daerah.

3.2.1. Isu Strategis Global

Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030 atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Goals dan 169 Target SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

- a. Tujuan 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
- b. Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
- c. Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
- d. Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- e. Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi:

- a. Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- b. Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- c. Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- d. Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;

- e. Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Pilar Pembangunan Sosial, meliputi:

- a. Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- b. Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- c. Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- d. Tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- e. Tujuan 14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
- f. Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, meliputi:

- a. Tujuan 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Untuk memastikan pelaksanaan SGD's berjalan dengan baik maka peran negara dan semua pemangku kepentingan pembangunan sangat penting dalam pencapaian tujuan SDG's.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi Indonesia masih dihadapkan pada berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yang meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan.

Berikut merupakan isu dan tantangan pembangunan Indonesia kedepan:

1. Kemiskinan
2. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa
3. Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah
4. Integrasi Domestik Terbatas
5. Rendahnya Tingkat Produktivitas
6. IPTEKIN dan Riset Lemah
7. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah
8. Pariwisata di Bawah Potensinya
9. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil terhadap Perekonomian

10. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah
11. Ekonomi Laut Belum Optimal
12. Pembangunan Belum Berkelanjutan
13. *Hyper Regulation* dan Kualitas Regulasi Rendah

3.2.3. Isu Strategis Provinsi NTT

Beberapa isu strategis di Provinsi NTT antara lain:

1. Kemiskinan
2. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (Masih Banyaknya Daerah Tertinggal)
3. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerostan nilai-nilai Budaya
4. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) berbasis komoditas unggulan
5. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata
6. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau
7. Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana
8. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan
9. Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan

Isu-Isu strategis yang ada di Provinsi NTT berkaitan dengan isu-isu yang terjadi secara global, nasional maupun regional menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perlindungan lingkungan dan mitigasi bencana peningkatan tata kelola pemerintahan serta penegakan supremasi hukum di Provinsi NTT.

3.2.4. Isu Strategis Kabupaten Timor Tengah Selatan

1. **Kemiskinan dan *stunting***

Kemiskinan menjadi isu strategis yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dan mendukung visi pembangunan nasional. Secara provinsi, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2023 menempati peringkat ke delapan kabupaten termiskin dengan tingkat kemiskinan sebesar 25,18%. Tingginya angka kemiskinan ini juga mempengaruhi meningkatnya angka *stunting* sebesar 22,30% pada tahun 2023 yang disebabkan belum terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk menurunkan angka kemiskinan dan *stunting* maka pemerintah daerah meningkatkan akses terhadap ketersediaan pangan yang berkelanjutan, pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan layak, air minum, sanitasi layak dan aman serta rasio elektrifikasi, diversifikasi ekonomi berupa pengembangan sektor pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan sektor jasa lainnya, pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha, pelatihan kewirausahaan dan dukungan dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam hal koordinasi

tentang perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk daya saing daerah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah yang meliputi beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain sistem pendidikan yang bermutu, peningkatan kapasitas melalui Diklat, kompetensi serta pembinaan sehingga tercipta tenaga yang profesional dan terampil. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM maka perlu kerja sama berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 3,11% dan menjadi 3,21% pada tahun 2023. Pertumbuhan ini belum maksimal karena masih terdapat potensi yang belum dikelola dengan baik. Potensi-potensi dimaksud, berupa potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan investasi. Untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dimaksud, maka pemanfaatan IPTEK, pembukaan lapangan kerja baru, peningkatan potensi ekspor serta rehabilitasi dan pembangunan baru infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang perlu diperhatikan.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan antar aktor dioptimalkan (kolaboratif) dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pekerjaan, memperpendek rentang kendali dengan mengoptimalkan penerapan SPBE. Hal tersebut perlu didukung dengan ketersediaan peralatan sarana prasarana serta sumber daya aparatur yang berintegritas dan berdaya saing agar tercapainya pembangunan berkelanjutan.

5. Peningkatan supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum

Untuk meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum dilakukan melalui upaya penegakan hukum yang harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum, peningkatan pemahaman masyarakat yang dilakukan melalui penyelenggaraan sosialisasi/lokakarya baik ditingkat masyarakat maupun lembaga pendidikan, perlindungan HAM untuk menjamin rasa keadilan masyarakat, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum yang adil tanpa memihak.

6. Mewujudkan pembangunan yang berperspektif/berwawasan sosial budaya dan berketahanan ekologi

Untuk meningkatkan pembangunan berperspektif/ berwawasan sosial budaya dan berketahanan ekologi, perlu adanya kebijakan berwawasan lingkungan dan pendayagunaan SDA untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, sumber daya manusia yang produktif dan berkemampuan dalam pemahaman wawasan lingkungan, pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan, peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM, pengembangan kebudayaan sebagai modal pembangunan daerah, sinergitas kebijakan antara pemangku kepentingan pemerintah, sektor terkait dan masyarakat.

7. Pembangunan sarana prasarana berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan

Isu strategis pembangunan sarana prasarana yang berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan menjadi salah satu persyaratan penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah dalam hal kelancaran, keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa serta upaya upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Penyediaan sarana dan prasarana juga diperuntukkan bagi seluruh masyarakat (peningkatan layanan infrastruktur dasar, sarana prasarana pendidikan, kesehatan yang merata inklusif yang memperhatikan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus) untuk mendukung aktivitas serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan sarana dan prasarana tetap berprinsip lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan sarana dan prasarana, isu keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan daerah ke depan. Isu ini tidak terlepas dari kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestariannya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Berikut merupakan keterkaitan antara permasalahan pokok dan isu strategis di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2025-2045.

Tabel 45: Masalah pokok dan Isu Strategis

MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS
<p>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat 2. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat 3. Belum optimalnya perlindungan sosial masyarakat <p>Aspek Daya Saing Daerah</p>	<p>Kemiskinan dan <i>stunting</i></p> <p>Peningkatan Kualitas SDM untuk daya saing daerah</p>

MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS
1. Belum terpenuhinya infrastruktur dasar untuk penanganan kemiskinan dan <i>stunting</i>	
Aspek Daya Saing Daerah 1. Rendahnya nilai produksi pertanian dan perkebunan 2. Rendahnya kualitas SDM 3. Belum optimalnya pendapatan daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
Aspek Pelayanan Umum 1. Belum optimalnya Integritas aparatur dalam melayani 2. Belum optimalnya pelayanan publik berbasis digital 3. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Aspek Pelayanan Umum 1. Belum optimalnya penegakan hukum 2. Belum optimalnya tingkat keaman dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum
Aspek Geografi dan Demografi 1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup Aspek Daya Saing Daerah 1. Masih rendahnya dukungan sektor pariwisata dalam pengembangan ekonomi makro 2. Kurangnya peminatan akan pelestarian budaya 3. Belum optimalnya pembangunan kualitas keluarga dan indeks ketimpangan gender 4. Belum optimalnya pengembangan lahan pertanian	Mewujudkan Pembangunan yang berperspektif/berwawasan sosial budaya dan berketahanan ekologi
Aspek Geografi dan Demografi 1. Kurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat 2. Menurunnya kualitas lingkungan Aspek Daya Saing Daerah 1. Belum Optimalnya pemerataan pembangunan 2. Belum optimalnya pembangunan pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah 3. Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana yang merata, yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1. Belum optimalnya layanan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana prasarana berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan

MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS
2. Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana yang merata, yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan	

Dari tabel 45 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh isu strategis memiliki keterkaitan dengan permasalahan-permasalahan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan . Permasalahan yang ada merupakan tantangan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan , yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk melihat seberapa besar masalah tersebut mampu memberikan dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik penting, mendasar dan mendesak untuk kemudian disimpulkan sebagai isu-isu strategis yang akan sangat menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam 20 tahun ke depan.

Isu-Isu strategis sebagaimana yang dikemukakan di atas tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana setiap isu strategis memiliki keterkaitan atau akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan memperhatikan isu-isu yang terjadi secara global, nasional, provinsi NTT dan isu KLHS RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan 2025-2045.

3.3. KESELARASAN ISU STRATEGIS RPJPD DENGAN KLHS RPJPD

Identifikasi dan perumusan isu strategis dilakukan dalam rangka membantu menentukan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan maupun target RPJPD 2025-2045. Isu strategis menunjukkan kondisi, keadaan, kejadian atau hal yang apabila tidak diantisipasi/ditanggulangi akan menimbulkan dampak yang merugikan dan menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Strategis yang dimaksud adalah hal yang menunjukkan komitmen terhadap pencapaian TPB. Rumusan isu strategis pembangunan berkelanjutan dalam KLHS RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 46: Keselarasan Isu Strategis RPJPD dengan KLHS RPJPD

NO	TUJUAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJPD Kab TTS 2025-2045	ISU STRATEGIS DAERAH
1.	Mengakhiri segala bentuk Kemiskinan	1 Penurunan tingkat kemiskinan masih relatif lambat. Masih terdapat 40,20 ribu penduduk miskin pada tahun 2023.	1 Masih terdapat masyarakat Kabupaten TTS yang hidup di bawah garis kemiskinan	1 Kemiskinan dan <i>Stunting</i>
		2 Masih kurangnya kepedulian jajaran desa dan kelurahan dalam memberikan layanan masyarakat secara optimal	2 Optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat berkebutuhan sosial	
		3 Alokasi pembiayaan pemerintah untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) untuk pengentasan	3 Kolaborasi antar institusi untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem masih lemah	

NO	TUJUAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJPD Kab TTS 2025-2045	ISU STRATEGIS DAERAH
		kemiskinan cenderung menurun		
		4 Sistem perlindungan sosial belum terintegrasi	4 Mengurangi kerentanan terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan bencana	
		5 Peserta jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan nasional masih rendah	5 Mobilisasi sumber daya untuk pengentasan kemiskinan	
		6 Lingkungan dan kesempatan berusaha dan bekerja belum inklusif	6 Peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing	
		7 Kesiapsiagaan bencana masih rendah	7 Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	
		8 Tingkat kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi (khususnya bencana kekeringan dan cuaca ekstrim) tinggi		
2.	Menghilangkan Kelaparan Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang baik	1 Prevalensi stunting masih relatif tinggi (21,52% di tahun 2022) meskipun cenderung menurun	1 Ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1 Kemiskinan dan <i>Stunting</i>
		2 Prevalensi malnutrisi masih relatif tinggi (11, 24 di tahun 2022) meskipun cenderung menurun	2 Keanekaragaman pangan dan keberlanjutan sistem pangan	
		3 Pola konsumsi rumah tangga masih banyak yang belum memenuhi kaidah gizi	3 Produktivitas tenaga kerja pertanian dan nilai tambah produk pertanian masih rendah	
		4 Tingkat pengetahuan pangan dan gizi ibu rumah tangga masih rendah	4 Konversi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain	
		5 Potensi kehilangan pangan dan sampah makanan (<i>food loss dan waste</i>) cukup tinggi (28,5% timbulan sampah berupa sampah sisa makanan)	5 Percepatan pencegahan stunting wasting	
		6 Perubahan iklim berpotensi menurunkan produktifitas tanaman pangan dan peningkatan resiko gagal panen	6 Inflasi dan kelangkaan stok pangan	
		7 Keterlambatan distribusi barang dari pelabuhan angkut ke pelabuhan bongkar		
3.	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Sejahtera	1 Angka kematian ibu (AKI) masih relatif tinggi (115/100.000 kelahiran hidup) dan cenderung naik selama tahun 2018-2022	1 Perubahan iklim dan lingkungan	1 Kemiskinan dan <i>Stunting</i>
		2 Angka kelahiran perempuan usia 15-19 tahun (ASFR) masih tinggi dan cenderung naik dari 51,1 menjadi 53,1 per 1.000 kelahiran	2 Intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (kusta dan filariasis)	
		3 Cakupan HIV testing dan pengetasan HIV masih terbatas	3 Kesehatan reproduksi dan KB	

NO	TUJUAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJPD Kab TTS 2025-2045	ISU STRATEGIS DAERAH
		4 Kesehatan reproduksi ibu dan remaja perempuan masih perlu ditingkatkan	4 Cakupan jaminan kesehatan nasional 5 <i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan 6 Cakupan HIV Testing dan pengetasan HIV	
4.	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata	1 Kesenjangan partisipasi pendidikan yang berkualitas berkontribusi pada rendahnya daya saing	1 Daya saing SDM 2 Program wajib belajar 12 tahun 3 APK PAUD, SD dan SMP atau sederajat 4 APM SD dan SMP atau sederajat 5 Kualitas guru 6 Kualitas pengajaran dan pembelajaran 7 Aksesibilitas pendidikan yang belum merata 8 Penguatan pendidikan satu tahun pra sekolah 9 Optimalisasi pendidikan dan pelatihan khusus 10 Sarana dan prasarana dan kebutuhan fasilitas belajar	2 Peningkatan kualitas SDM untuk daya saing daerah
5.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	1 Masih lemahnya tingkat pemahaman kesetaraan gender 2 Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 3 Partisipasi perempuan terhadap pengambilan keputusan masih relatif rendah 4 Kurangnya anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan responsif gender dan pemberdayaan perempuan	1 Kekerasan terhadap perempuan dan anak 2 Optimalisasi penyelesaian masalah penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 3 Partisipasi perempuan terhadap pengambilan keputusan masih rendah 4 Kompresivitas layanan terhadap korban kekerasan 5 <i>Unmet need</i> KB	5 Peningkatan supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum
6.	Pengelolaan air bersih dan sanitasi layak	1 Infrastruktur air bersih dan sanitasi belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten TTS 2 Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup masih rendah 3 Perubahan iklim dan bencana kekeringan mengancam ketersediaan air 4 Kualitas air baku (air permukaan) cenderung menurun yang di indikasikan dengan penurunan IKA dari 52,50 tahun 2020 menjadi 51,11 tahun 2022	1 Akses air minum dan sanitasi aman 2 Efisiensi penggunaan air 3 Indeks Kualitas Air (IKA) cenderung menurun 4 Tingginya pencemaran air tanah 5 Pengelolaan limbah domestik dan limbah industry 6 Sanitasi lingkungan 7 Infrastruktur sanitasi 8 Penyediaan kebutuhan air baku dari sumber terlindung relatif terbatas 9 Teknologi pengelolaan sumber daya air	7 Pembangunan sarana prasarana berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan
11.	Kota dan pemukiman berkelanjutan	1 Program perumahan masih terfokus pada rumah yang dibangun	1 Akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau	7 Pembangunan sarana prasarana

NO	TUJUAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJPD Kab TTS 2025-2045	ISU STRATEGIS DAERAH
		secara formal untuk dimiliki dan dijual		berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan
		2 Timbulnya permukiman kumuh	2 Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak	
		3 Belum optimalnya kelembagaan perumahan dan keterbatasan sumber daya	3 Akses terhadap transportasi umum	
		4 Masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah	4 Partikel halus (PM2.5, PM10) dan indeks kualitas udara	
		5 Terbatasnya sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana	5 Pengurangan resiko bencana	
		6 Kerentangan terhadap potensi bencana kekeringan dan cuaca ekstrim kategori tinggi	6 Edukasi siaga bencana	
			7 Akses jalan dan drainase kota	
			8 Ketersediaan prasarana dan fasilitas umum yang sesuai standar	
			9 Pengelolaan sampah	
			10 Implementasi tata ruang	
			11 Ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan	
12.	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	1 Data kehilangan pangan (<i>food loss</i>) dan sampah makanan (<i>food waste</i>) belum tersedia namun diperkirakan tinggi karena 28,5 persen sampah di Kabupaten TTS berupa sampah sisa makanan	1 Polusi dan kerusakan lingkungan	3 Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
		2 Penanganan <i>food loss</i> dan <i>waste</i> masih terbatas	2 <i>Food loss</i> dan <i>waste</i>	
		3 Kinerja pengelolaan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular masih terbatas	3 Belum terpenuhi layanan terhadap pengelolaan sampah domestik dan limbah B3	
		4 Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah	4 Belum membudayakannya gaya hidup ramah lingkungan	
			5 Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri	
			6 Pengurangan produksi sampah	
			7 Daur ulang sampah	
13.	Penanganan perubahan iklim dan penanggulangan bencana	1 Potensi dampak perubahan iklim di wilayah yang berkategori tinggi hingga sangat tinggi	1 Kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana	7 Pembangunan sarana prasarana berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan
		2 Kesiapsiagaan bencana belum optimal	2 Peningkatan koordinasi dan perencanaan penanganan bencana akibat perubahan iklim	
		3 Belum ada rencana aksi mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim khususnya pada sektor air dan sektor kesehatan yang masuk dalam level top prioritas dan prioritas	3 Pencegahan dan penanggulangan bencana	
			4 Dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air, produktifitas pertanian,	

NO	TUJUAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJPD Kab TTS 2025-2045		ISU STRATEGIS DAERAH		
				dan kesehatan masyarakat			
			5	Meningkatnya bencana hidrometeorologi di pesisir akibat perubahan iklim			
			6	Revegetasi dan penghijauan pada lahan kritis			
			7	Pengurangan alih fungsi lahan			
			8	Daur ulang sampah			
			9	Penurunan dampak ekonomi perubahan iklim			
15.	Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem daratan	1	Rendahnya peran serta masyarakat dalam menghijaukan lahan kritis	1	Pengurangan alih fungsi lahan	6	Mewujudkan pembangunan yang berperspektif/berwawasan sosial budaya dan berketahanan ekologi
		2	Potensi berkurangnya keanekaragaman hayati akibat dampak perubahan iklim	2	Adanya aktifitas pembangunan yang tidak mempertimbangkan DDDTLH dan tata ruang		
		3	Munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru memicu meningkatnya alih fungsi lahan	3	Rehabilitas lahan kritis		
				4	Perlindungan ekosistem penting		
				5	Hilangnya keanekaragaman hayati		
7.	Menjamin akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan	1	Kurangnya kapasitas SDM dalam pengelolaan sumber-sumber energi	1	Masih rendahnya pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan	7	Pembangunan sarana prasarana berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan
		2	Pengembangan EBT memerlukan waktu lama dan berbiaya mahal	2	Kapasitas SDM dalam pengelolaan sumber-sumber energi		
8.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	1	Keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha	1	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	3	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
		2	Inklusi keuangan bagi UMKM masih terbatas	2	Produktifitas tenaga kerja		
		3	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri masih sangat terbatas	3	Pertumbuhan PDRB per kapita masih rendah		
		4	Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah	4	Masih terdapat penduduk yang belum memiliki pekerjaan dan mengalami pemutusan hubungan kerja		
		5	Daya saing destinasi dan industri pariwisata masih rendah	5	Ketersediaan lapangan kerja		
				6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan setengah pengangguran masih tinggi		
				7	Akses UMKM terhadap lembaga keuangan		
				8	Promosi pariwisata berkelanjutan		
				9	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		

NO	TUJUAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS RPJPD Kab TTS 2025-2045		ISU STRATEGIS DAERAH		
			10	Partisipasi masyarakat lokal dalam industri pariwisata			
			11	Perlunya peningkatan kreatifitas masyarakat			
9.	Membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	1	Kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian Kabupaten TTS cenderung menurun	1	Proporsi anggaran riset terhadap DPRB	7	Pembangunan sarana prasarana berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan
		2	Masih terbatasnya diversitas industri	2	Akses terhadap jasa dan pasar keuangan bagi koperasi dan UMKM		
		3	Nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri masih rendah	3	Perlunya peningkatan kapasitas pelaku usaha dan kualitas produk		
		4	Terbatasnya kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi UMKM	4	Kontinuitas usaha dan hasil produksi		
		5	Daya saing produk dan usaha kreatif masih rendah	5	Pemasaran produk UMKM		
			6	Nilai tambah industri kecil			
10.	Mengurangi kesenjangan	1	Tingkat kesenjangan ekonomi masih relatif tinggi searah dengan tingkat kemiskinan	1	Adanya kesenjangan ekonomi (Rasio Gini)	3	Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
		2	Adanya kesenjangan pembangunan dan infrastruktur ekonomi antar wilayah kecamatan	2	Indeks kebebasan sipil		
		3	Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang peningkatan ekonomi bagi PKL (Pedagang Kaki Lima)	3	Pemetaan potensi ekonomi		
				4	Pemerataan pembangunan dan infrastruktur ekonomi		
				5	Ketepatan sasaran bantuan sosial		
				6	Ekonomi kerakyatan berbasis kemandirian		
17.	Menguatkan kemitraan untuk mencapai tujuan	1	Pengelolaan pajak daerah belum optimal sehingga proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak daerah masih rendah	1	Kerja sama antar pihak dalam pemenuhan kelengkapan data untuk pengukuran capaian pembangunan daerah	4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan baik
		2	Perlu upaya optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah	2	Penguatan kapasitas kelembagaan		
				3	Optimalisasi kerjasama antar pihak		
				4	Kolaborasi antar lembaga		
				5	Perluasan akses transportasi digital		
				6	Penerimaan pajak		
16.	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai menyediakan akses keadilan untuk semua dan kelembagaan tangguh	1	Pelayanan publik belum prima	1.	Pengurangan segala bentuk kekerasan terhadap anak	5	Peningkatan supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum
		2	Perilaku koruptif yang masih langgeng	2	Transformasi birokrasi		
		3	Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal	3	Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk penegakan hukum dan akses keadilan		
		4	Inefisiensi regulasi dan birokrasi	4	Perilaku anti korupsi		
5	Cakupan administrasi kependudukan						

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Perumusan visi dan misi pembangunan untuk RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan gambaran cita-cita dan harapan pembangunan daerah di masa depan dengan memperhatikan kondisi eksisting, permasalahan dan isu strategis serta merujuk pada Dokumen Perencanaan RPJPN dan RPJPD Provinsi NTT. Perumusan visi dan misi harus merefleksikan kekuatan dan potensi khas Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4.1. VISI

Visi menjelaskan arah/kondisi yang ingin dimasa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi. Perumusan visi mempertimbangkan faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), serta menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan. Perumusan visi pembangunan pada masalah utama atau isu strategis pembangunan. Isu strategis pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan , yaitu: (1) Kemiskinan dan *stunting*; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk daya saing daerah; (3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; (4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; (5) Peningkatan supremasi hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum; (6) Mewujudkan pembangunan yang berperspektif/berwawasan sosial budaya dan berketahanan ekologi; (7) Pembangunan sarana prasarana berkesinambungan, berwawasan lingkungan dan kebencanaan. Visi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 adalah:

**“TIMOR TENGAH SELATAN
NEKAFMESE
(BERINTEGRITAS, KREATIF, MAJU, BERBUDAYA, SEJAHTERA,
BERKELANJUTAN)
MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**

Nekafmese berasal dari Bahasa Dawan Atoin Meto yang artinya satu hati. Secara harafiah Nekafmese terdiri dari dua suku kata yakni: **Nekaf** (= hati) adalah sesuatu sebagai tempat menyimpan segala perasaan batin serta **Mese** (= satu, menyatu) adalah sepakat dan atau bersatu hati. Sehingga Nekafmese dapat diartikan sebagai sebuah proses sekaligus hasil yang berintikan perpaduan berpikir dan bertindak secara bersama-sama.

Penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu Berintegritas, Kreatif, Maju, Berbudaya, Sejahtera dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Berintegritas

Mewujudkan pelayanan publik dan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, transparan dan memperhatikan kesetaraan.

2. Kreatif

Terwujudnya kabupaten yang unggul, senantiasa berinovasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai daerah yang diperlihatkan oleh kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap IPTEK dan berdaya saing.

3. Maju

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui pemanfaatan kekuatan potensi sumber daya lokal yang dimiliki dan didukung oleh pemanfaatan peluang eksternal sebagai bagian dari proses pembangunan secara integratif dan menyeluruh bagi seluruh umat manusia.

4. Berbudaya

Mewujudkan masyarakat yang cinta akan budaya dan nilai-nilai adat dan agama di Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga dapat mengolaborasikan nilai modern bersama tradisional untuk pengembangan potensi wilayah.

5. Sejahtera

Seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, papan dan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan layanan sosial; serta memiliki pendapatan yang mencukupi secara berkeadilan.

6. Berkelanjutan

Pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan berorientasi pada keberlanjutan dalam bidang ekonomi (*economic prosperity*), sosial (*social equity*), budaya (*cultural vitality*) dan lingkungan hidup (*environmental sustainability*), demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.2. SASARAN VISI

Untuk mencapai visi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan maka disusun sasaran visi yang tetap merujuk pada Sasaran Visi RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi NTT 2025-2045. Adapun sasaran visi RPJPN 2025-2045 sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*.

Sedangkan sasaran Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045 adalah:

1. Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Daya saing daerah yang meningkat.
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif.
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.

Memperhatikan sasaran visi nasional dan Provinsi NTT maka sasaran visi Kabupaten Timor Tengah Selatan ditetapkan sama dengan Provinsi NTT yaitu:

1. Pendapatan per kapita terus meningkat.
2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3. Daya saing daerah yang meningkat.
4. Sumber daya manusia yang berdaya saing, adaptif dan inovatif.
5. Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Merujuk pada sasaran visi yang ada maka dapat disusun sasaran visi dengan *baseline* tahun 2025 dan target sampai dengan tahun 2045 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 47: Sasaran Visi

No	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Baseline 2025	Target 2045
1.	Pendapatan per kapita terus meningkat.	PDRB Perkapita (Rp Juta)	21.612.202	37.612.202
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah	0	90,65
2.	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	24,91	0
		Rasio Gini (Indeks)	0,28	0,26
3.	Daya saing daerah yang meningkat.	Indeks Reformasi Hukum*	53,2	80
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,0	8,00
		Indeks Pelayanan Publik	N/A	5
4.	Sumber daya manusia yang berdaya saing, adaptif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	65,58	85,58
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	86,46 - 86,51	94,63 - 95,15
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5.3	7.3
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,438	0,112
5.	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	73,26	76,12

4.3. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Visi **Timor Tengah Selatan “NEKAFMESE” Menuju Indonesia Emas 2045** akan dapat terwujud melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah dengan memperhatikan agenda pembangunan pada RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi NTT yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 66: Visi dan Misi Kabupaten TTS Tahun 2025-2045



Adapun penjabaran 6 (enam) misi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial

Transformasi Sosial untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing dan kreatif. Dengan transformasi sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menjamin bahwa masyarakat memiliki hak yang sama dan inklusif dalam mendapatkan pelayanan dasar.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Transformasi Ekonomi untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif sektor unggulan daerah dengan berkolaborasi pada pengembangan ekonomi modern maupun tradisional. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan menggerakkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

Transformasi Tata Kelola untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang berintegritas, akuntabel dan transparan dalam pelayanan pada masyarakat serta menciptakan pemerintahan yang dapat bekerjasama dengan swasta untuk pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

4. Mewujudkan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi dan Politik

Dalam mendukung visi Kabupaten Timor Tengah Selatan maka diperlukan supremasi hukum yang dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun. Dengan adanya penegakan hukum baik maka akan menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat serta menciptakan peluang investasi yang aman bagi investor untuk ikut terlibat dalam pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi maka perlu adanya kerjasama antara pihak eksekutif, legislatif dan yudikatif.

5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan harus tetap memperhatikan ketahanan budaya dengan pertimbangan bahwa budaya masyarakat dapat berubah karena terjadi perubahan era tradisional menuju modernisasi akan tetapi dalam pembangun perlu tetap memelihara nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Untuk pembangunan menuju Indonesia emas maka selain budaya juga perlu diperhatikan perihal pembangunan yang menciptakan lingkungan yang berkualitas, kesetaraan gender, kemandirian pangan, ketahanan air dan energi serta siap menghadapi perubahan iklim dan bencana.

6. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Inklusif, Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan

Arah pembangunan kewilayahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaksanakan secara merata dan melibatkan *stakeholders* dengan tetap merujuk pada potensi dan karakteristik masing-masing

kecamatan. Pengembangan pembangunan yang merata bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan harus tetap berprinsip pada pembangunan sarana prasarana yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Pembangunan akan dilaksanakan dengan prinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" sehingga perlu memperhatikan dampak dari setiap tindakan pengembangan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup yang akan dituangkan secara berkesinambungan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

4.4. KESELARASAN VISI DAN MISI RPJPD KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DENGAN VISI DAN MISI RPJPD PROVINSI NTT SERTA VISI DAN MISI RPJPN TAHUN 2025-2045

Visi dan misi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan telah diselaraskan dengan visi dan misi RPJPD Provinsi NTT serta visi dan misi yang tertuang dalam RPJPN seperti yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 48: Keselarasan Visi dan Misi RPJPN, RPJPD Provinsi NTT dan Kabupaten TTS

No	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045
	Visi		
	Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.	Nusa Tenggara Timur yang Mandiri, Maju dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.	Timor Tengah Selatan "NEKAFMESE" Menuju Indonesia Emas 2045.
	Sasaran Visi		
1.	Pendapatan per kapita setara negara maju.	Pendapatan per kapita terus meningkat sebagai kontribusi terhadap pendapatan per kapita nasional setara negara maju.	Pendapatan per kapita terus meningkat.
2.	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.	Kemiskinan menuju satu digit dan ketimpangan berkurang.	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.
3.	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.	Daya saing daerah yang meningkat.	Daya saing daerah yang meningkat.
4.	Daya saing sumber daya manusia meningkat.	Sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, adaptif dan inovatif .	Sumber daya manusia yang berdaya saing, adaptif, dan inovatif.
5.	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK	Pembangunan yang ramah lingkungan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

No	RPJPN 2025-2045	RPJPD Provinsi NTT Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten TTS Tahun 2025-2045
		menuju <i>net zero emission</i> .	
	Misi		
1.	Transformasi Sosial	Sumber daya manusia NTT yang berdaya saing dan terlindungi hak dasarnya	Mewujudkan Transformasi Sosial
2.	Transformasi Ekonomi	Membangun ekonomi NTT yang maju dan berdaya saing berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3.	Transformasi Tata Kelola	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif dan adaptif	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4.	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Ketangguhan Diplomasi	Meningkatkan supremasi hukum yang menjamin keadilan, kepastian, stabilitas ekonomi dan demokrasi	Mewujudkan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi dan Politik
5.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Pembangunan yang inklusif dan berketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6.	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Inklusif, Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan
7.	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	
8.	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	Kestinambungan pembangunan daerah	

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi perencanaan pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir RPJP Nasional 2025-2045 serta hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2005-2025. Tabel di bawah ini merupakan rumusan capaian indikator makro, sasaran, indikator dan arah kebijakan lima tahunan rencana pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 49: Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial	Pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi masyarakat	Percepatan pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang berkualitas dan inklusi	Penguatan pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang berdaya saing	Pemantapan layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi masyarakat TTS yang unggul dan berkelanjutan
Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Pemenuhan infrastruktur dasar pusat-pusat pertumbuhan dan/atau kawasan strategis pertanian, perikanan, perkebunan	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan/atau kawasan strategis pertanian, perikanan, perkebunan	Penguatan inovasi dan digitalisasi dalam mendorong produktivitas dan efisiensi produk hasil pertanian, perkebunan dan perikanan	Terwujudnya TTS sebagai pusat pertumbuhan Ekonomi yang menghasilkan produk komoditas dan bernilai tambah tinggi

MISI	ARAH KEBIJAKAN			
	Periode 1 2025-2029	Periode 2 2030-2034	Periode 3 2035-2039	Periode 4 2040-2045
Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Penguatan Kelembagaan, Peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Percepatan Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN Berkualitas, regulasi berbasis teknologi informasi, partai politik berintegrasi dan masyarakat sipil partisipatif	Pemantapan Kelembagaan adaptif, ASN kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri	Mewujudkan regulasi Tata Kelola yang adaptif dan berintegritas
Misi 4: Mewujudkan Supremasi Hukum	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas sebagai landasan transformasi dan pembangunan	Memantapkan supremasi hukum, stabilitas untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi & pembangunan	TTS yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, berdemokrasi substansial, aman dan nyaman	Mewujudkan TTS yang adil, aman dan damai
Misi 5: Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan Ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan Ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Pembangunan TTS yang berkelanjutan
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Inklusif, Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan	Memperluas pemerataan pembangunan dan Inklusif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Mempercepat pemerataan pembangunan dan inklusif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Memperkuat pembangunan yang berdaya saing dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Mewujudkan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan

Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah perlu menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 50: Arah Kebijakan Transformatif Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
TRANSFORMASI SOSIAL	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.				
	Pemerataan distribusi tenaga medis dan kesehatan dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan.				
	Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.				
	Penuntasan <i>Stunting</i> dan eliminasi Malaria.				
	Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi, serta sarana prasarana penanganan limbah medis.				
	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).				
	Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kekerjaan tinggi.				
	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.				
	Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif.				
	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM Sosial.				
	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.				
	Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.				
TRANSFORMASI EKONOMI	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru termasuk sentra-sentra produksi komoditas, sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran.				
	Pengembangan sektor primer pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan di kawasan perdesaan.				
	Pengembangan sektor sekunder pada sentra-sentra pengolahan dan sentra pemasaran di kawasan perkotaan.				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
	Pengembangan kawasan pariwisata untuk meningkatkan jumlah dan minat wisatawan lokal yang berfokus pada perpanjangan lama tinggal wisatawan.				
	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperluas jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata yang menargetkan segmen pasar tertentu seperti wisata <i>ecotourism</i> .				
	Pengembangan ekonomi kreatif penopang sektor pariwisata khususnya tenun pada sentra-sentra ekonomi lokal.				
	Penerapan pertanian organik dan pengembangan sistem pertanian regeneratif dengan pembentukan korporasi petani.				
	Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat yang dikembangkan secara klaster melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah (<i>added value</i>) tinggi yang berorientasi ekspor.				
	Pelaksanaan afirmasi <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> bagi angkatan kerja, terutama di bidang perikanan, perkebunan, pariwisata, dan industri.				
	Penyiapan sentra produksi di kawasan perdesaan dan sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan, serta perkuatan keterkaitan desa-kota.				
	Penguatan BLK dan BRIDA dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.				
	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.				
	Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.				
	Peningkatan produktivitas BUMD.				
	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga.				
	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i>				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
TRANSFORMASI TATA KELOLA	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah.				
	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.				
	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.				
	Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.				
	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.				
	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.				
	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.				
	Penguatan kerja sama antar daerah, dengan mengoptimalkan kembali kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya.				
	Penguatan Integritas Partai Politik.				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
KEAMANAN DAERAH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI DAERAH	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.				
	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif terutama KPBU, peningkatan kualitas Belanja Daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.				
	Penguatan pengendalian inflasi daerah.				
	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.				
KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKOLOGI	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.				
	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.				
	Peningkatan upaya pelestarian adat, tradisi, budaya, dan lingkungan sebagai identitas dan citra daerah dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal.				
	Penguatan kerja sama dan pelibatan tokoh adat/agama sebagai penggerak masyarakat dan mitra utama				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
	pemerintah dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan.				
	Pengembangan pangan lokal untuk mendukung diversifikasi pangan (padi, jagung, dan sorgum) di sentra-sentra produksi pangan/ <i>food estate</i> termasuk kawasan transmigrasi lokal yang didukung penyediaan sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi pertanian dan irigasi yang berbasis teknologi termasuk pertanian regeneratif sebagai penopang kegiatan ekonomi wilayah serta mendukung kemandirian pangan lokal.				
	Pengelolaan risiko bencana melibatkan multiaktor <i>pentahelix</i> dalam pembangunan dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan potensi bahaya dan pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di wilayah rawan bencana tinggi.				
	Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan serta penghambatan laju deforestasi				
	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.				
	Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air melalui pengembangan infrastruktur penyimpanan, distribusi (seperti embung, bendungan, dll), konservasi air seperti <i>rainwater harvesting</i> , diversifikasi pangan, riset dan inovasi sistem dan teknologi pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan khususnya lokasi prioritas kekeringan.				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
	Modernisasi irigasi.				
	Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.				
IMPLEMENTASI TRANSFORMASI	Peningkatan pelaksanaan reformasi agraria.				
	Pelaksanaan kerja sama antardaerah khususnya antar kabupaten/kota dalam menopang pembangunan pariwisata dan penggerak ekonomi lainnya serta meningkatkan kerja sama perdagangan antardaerah.				
	Peningkatan kegiatan ekonomi dan keamanan perbatasan.				
	Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air masyarakat sehari-hari.				
	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.				
	Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.				
	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.				
	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.				
	Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.				

ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH (DALAM RANCANGAN RPJP DAERAH KABUPATEN)		PERIODE PELAKSANAAN PADA RPJMD			
		PERIODE 1 2025-2030	PERIODE 2 2030-2034	PERIODE 3 2035-2039	PERIODE 4 2040-2045
TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN				
	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.				
	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).				
	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.				
	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten TTS.				
	Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.				
	Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.				
	Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.				
	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau yang sesuai dengan karakteristik wilayah.				
	Meningkatkan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan.				

5.2. SASARAN POKOK RPJPD TAHUN 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 51: Sasaran Pokok Daerah Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket.	
				Baseline 2025	Target 2045		
Misi 1: “Mewujudkan Transformasi Sosial”							
1	Terwujudnya kesehatan untuk semua	Kesehatan untuk semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	67,37	73,37	
			2	Kesehatan Ibu dan Anak:			
				a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	11	0	
				b) Angka Kematian Bayi dan Balita (per 1.000 kelahiran hidup)	82	0	
				c) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,30	5,00-0	
			3	Penanganan Tuberkulosis:			
				a) Insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk	633	0	
				b) Cakupan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)*	100	100	
			4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98	100	
			2	Terwujudnya Pendidikan		5	Hasil pembelajaran:

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket.	
				Baseline 2025	Target 2045		
	yang berkualitas dan merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
			i. Literasi Membaca (SD)	31,34	100		
			ii. Numerasi (SD)	24,21	100		
			iii. Literasi Membaca (SMP)	21,38	100		
			iv. Numerasi (SMP)	17,66	100		
			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
			i. Literasi Membaca (SD)	31,34	100		
			ii. Numerasi (SD)	24,21	100		
			iii. Literasi Membaca (SMP)	21,38	100		
			iv. Numerasi (SMP)	17,66	100		
			c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	11,66	13,66		
			d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,09	17,40		
6			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang		11,30-12,16	22,99-23,31	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket.
					Baseline 2025	Target 2045	
				Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)			
			7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	34,92	61,40	
3	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Perlindungan sosial yang adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	24,91	0	
			9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	26,33	100	
			10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal**	N/A	15	
Misi 2: "Mewujudkan Transformasi Ekonomi"							
4	Terwujudnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1	Rasio PDRB	0,66	3,32	
			1	Industri Pengolahan (%)			
			1	Pengembangan Pariwisata			
			a)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,08	0,48	
			b)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	140	340	
1	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,66	10				
			1	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
			a)	Persentase koperasi aktif (%)	36	100	
			b)	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	N/A	5	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket.
					Baseline 2025	Target 2045	
			1 5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,71	0,72	
			1 6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,81	65,00	
			1 7	Tingkat Penguasaan IPTEK			
5	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	1 8	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			
			a)	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	-	90,65	
			b)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	7,26	17,26	
6	Terwujudnya Transformasi Digital	Transformasi Digital	1 9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi*	5,3	7,3	
7	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	2 0	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten*	11,49	5,89	
			2 1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	33,78	38,64	
			2 2	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-22,14	24,95	
8	Terwujudnya Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	2 3	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			
			a)	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	64,74	95,00	
			b)	Persentase kemantapan	51,09	72,00	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket.	
				Baseline 2025	Target 2045		
				jalan Kabupaten (%)			
				c) Persentase Desa Mandiri (%)	0	1,38	
Misi 3: "Mewujudkan Transformasi Tata Kelola"							
9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif	2	Indeks Reformasi Hukum	53,20	80,00	
			4				
			2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	8	
			5				
			2	Indeks Pelayanan Publik	N/A	5	
			6				
			2	Indeks Integritas Nasional	65,65	79,08	
			7				
Misi 4: "Mewujudkan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi dan Politik"							
10	Kepatuhan Hukum, Keamanan dan Demokrasi	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	2	Tingkat Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak (%)	91,04	99	
			8				
			2	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	67,25	99	
			9				
			3	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi	
			0				
Misi 5: "Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan"							
11	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,16	1,5	
			1				
			3	Tingkat Inflasi (%)	2,42	0,8	
			2				
			3	Intermediasi sektor keuangan			
			3	a) Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan (Miliar)	6	10	
			3	Inklusi Keuangan* (%)	92	99	
			4				
12	Efektifitas Kepemimpinan Daerah	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya	3	Konflik SARA (Jumlah Peristiwa)	0	0	
			5				

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket.
					Baseline 2025	Target 2045	
		Gentar Kawasan	3 6	Efektifitas Kebijakan Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah			
				a) Pemekaran Wilayah Desa dan atau Kecamatan	Ada	Ada	
				b) Pemekaran Wilayah Kabupaten	-	Ada	
13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	3 7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	51,09- 51,11	62,36- 62,79	
			3 8	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	86,46 - 86,51	94,63 - 95,15	
14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	3 9	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	60,1- 60,14	64,16- 64,47	
			4 0	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,438	0,112	
Misi 6: “Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Inklusif, Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan”							
15	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	4 1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0	0,75	
			4 2	Kualitas Lingkungan Hidup			
				a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,26	76,12	
				b) Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	0	40	
				c) Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%)	61,43	100	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Ket.	
				Baseline 2025	Target 2045		
			d) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	75,15	90,00		
16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	4 3	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
			a) Ketahanan Energi				
			- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	93	99		
			b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	N/A	2,1		
			c) Ketahanan Air				
			- Kualitas air Sungai Sebagai Sumber Air Baku (IKA)	46,32	57,85		
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	62,30	100		
			- Cakupan Layanan Air Minum Layak	60,66	90,00		
17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	4 4	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	155,67	143,67	
			4 5	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	0	33,73	

5.3. Upaya Transformasi Super Prioritas Kabupaten Timor Tengah Selatan (Game Changers Kabupaten Timor Tengah Selatan)

Secara umum, arahan RPJPN Tahun 2025-2045 terkait Upaya Transformasi Super Prioritas atau *Game Changers* diadopsi sebanyak 17 (tujuh belas) oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai kebutuhan dan kesesuaian dengan konteks Kabupaten Timor Tengah Selatan seperti pada Tabel di bawah ini.

Tabel 52: Game Changers Kabupaten TTS Tahun 2025-2045

TRANSFORMASI	GAME CHANGERS
TRANSFORMASI SOSIAL	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun Pra Sekolah dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
	2. Investasi pelayanan primer, penuntasan <i>stunting</i> , serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tidak menular (terutama <i>tuberculosis</i>)
	3. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi
TRANSFORMASI EKONOMI	4. Peningkatan anggaran IPTEKIN Kabupaten TTS menuju komersialisasi oleh industri
	5. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
	6. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi pada kawasan wisata unggulan <i>agroecoforestry</i> Mutis – Fatumnasi, dan Kawasan Oetune – Kolbano sepanjang pantai, Kawasan Wisata Budaya Air Berubah Menjadi Anggur – Sonaf Niki-Niki dan sekitarnya – Kampung Adat Suku Boti, pengembangan tenun ikat tradisional Timor Tengah Selatan sentra produksi dan pengolahan serta sentra pemasaran di kawasan perkotaan
TRANSFORMASI TATA KELOLA	7. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau berupa pengembangan potensi EBT Tenaga Surya, Tenaga Angin, Tenaga Air dan Biomassa
	8. Transformasi manajemen ASN dan pemberantasan korupsi
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS DAN KEPEMIMPINAN	9. Penguatan integritas partai politik
	10. Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBD; serta transformasi kelembagaan perencanaan fiskal
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	11. Reformasi energi terbarukan dan penyaluran pupuk bersubsidi tepat waktu dan tepat sasaran
	12. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
	13. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
PEMBANGUNAN YANG MERATA, RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN	14. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (<i>food, energy, water</i>)
	15. Penuntasan sarana prasarana infrastruktur dasar sebagai peningkatan aksesibilitas dalam upaya pemenuhan ketersediaan dan kualitas.
	16. Pemenuhan akses air minum, serta sanitasi aman berkelanjutan dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
	17. Pengelolaan dan pemilahan sampah terpadu di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler.

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk periode kurun waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Timor Tengah Selatan .

Visi jangka panjang Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu **“Timor Tengah Selatan NEKAFMESE (Berintegritas, Kreatif, Maju, Berbudaya, Sejahtera, Berkelanjutan) Menuju Indonesia Emas 2045”**. Upaya untuk mencapai visi tersebut dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi RPJPD Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu 1) Mewujudkan Transformasi Sosial; 2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi; 3) Mewujudkan Transformasi Tata Kelola; 4) Mewujudkan Supremasi Hukum, Stabilitas Ekonomi dan Politik; 5) Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; serta 6) Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Inklusif, Ramah Lingkungan dan Berkesinambungan.

Pencapaian visi dan misi Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk 20 tahun mendatang akan berhasil bila ada komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, peran aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Timor Tengah Selatan serta adanya komitmen untuk mempertahankan konsistensi terhadap perencanaan yang telah disepakati.

Pj. BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

SEPERIUS E. SIPA